



UNIVERSITAS INDONESIA

PENGARUH BELANJA MODAL PEMERINTAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROVINSI SUMATERA BARAT :
2000-2006

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Universitas Indonesia

ANASMEN

NPM : 0706299151

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
DEPOK
November 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Anasmen
NPM : 0706299151
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Pengaruh Belanja Modal Pemerintah
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
di Provinsi Sumatera Barat : 2000-2006

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof.Robert A. Simanjuntak Ph.D. (.....)

Penguji : B. Raksaka Mahi Ph.D. (.....)

Penguji : Iman Rozani, SE., M.Soc.Sc. (.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anasmen
NPM : 0706299151
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat: 2000 – 2006.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di:
Pada tanggal:
Yang menyatakan

(Anasmen)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi, Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1). Prof. Robert A. Simanjuntak Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini, memberi petunjuk dan saran yang sangat berguna dalam penyelesaian tesis ini.
- (2). Arindra A. Zainal Ph.D. selaku Ketua Jurusan dan Dr. Andi Fahmi selaku Sekretaris Jurusan atas segala bantuan yang penulis terima.
- (3). Pengelola, Dosen pengajar, dan staf MPKP yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- (4). Pusbindiklatren Bappenas yang telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pengembangan SDM Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (5). Rekan-rekan MPKP UI Angkatan XVII pagi Salemba atas segala bantuan yang diberikan.
- (6). Kedua orangtuaku dengan segala doa dan jerih payah telah mendidik, membimbing, membesarkan penulis untuk mencari dan menuju masa depan serta memberi dorongan untuk terus maju. Begitu pula dengan kedua orang tua di Padang, yang telah memberikan jalan keluar bagi penulis dari beban masalah keluarga selama studi.
- (7). Istriku Ade, atas pengorbanan, pengertian, ketabahan, dan bantuan kepada penulis. Sungguh tanpa kesabaran dan dukunganmu yang tak kunjung henti,

usaha penulis menyelesaikan studi sungguh sulit terwujud. Tentunya kepada anakku Rhafie, yang telah lama ditinggal tanpa kehadiran penulis. Kita telah kehilangan banyak waktu dan kesempatan bersama. Kita berjanji untuk menjejarnya bersama dimasa yang akan datang.

- (8). Saudaraku Datuak, Hendra, Iwan, dan Delvi atas bantuan, dorongan, saran, kritikan, selama mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tesis ini. Tanpa itu semua, sungguh sulit studi ini akan terselesaikan.
- (9). Uni sekeluarga di Serang serta Adik-adikku di Padang, atas segala bantuan yang diberikan sehingga penulis tidak terbebani dengan masalah keluarga pada waktu studi.
- (10). Begitu juga kepada seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam tulisan ini. Semoga amal baiknya dibalas oleh Allah SWT, Amin.

Akhirnya kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa mamfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, November 2009

Anasmen

ABSTRAK

Nama : Anasmen
Program Studi : Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah
Judul : Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat : 2000 – 2006

Tesis ini membahas hubungan antara Belanja Modal Pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian adalah melihat pengaruh besarnya Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Investasi Swasta dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (2000-2006). Penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan metode regresi berganda dan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal Pemerintah tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Investasi Swasta signifikan mempengaruhi Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Jumlah Penduduk juga signifikan mempengaruhi Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto .

Kata kunci :

Belanja Modal Pemerintah, Investasi Swasta, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

ABSTRACT

Name : Anasmen
Study Program : Finance Economic of Country and Local
Judul : The effect of Government Capital Expenditure to Economic
Growth in West Sumatera Province : 2000 – 2006

The focus of this study describe relation between government capital expenditure and economic growth. The purpose of this study observe the effect of government capital expenditure, private investment, and population to the gross regional domestic product growth of regency and municipality in West Sumatera Province (2000-2006). This research is quantitative descriptive with multiple regression and panel data method. The research show that government capital expenditure is statistically not significant to effect the gross regional domestic product growth. Private investment is statistically significant to effect the gross regional domestic product growth. Population is statistically significant to effect the gross regional domestic product growth.

Key words :

Government Capital Expenditure, Private Investment, Population, Gross Regional Domestic Product Growth.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Ruang Lingkup Penelitian	8
1.5. Hipotesa	9
1.6. Data dan Sumber Data	9
1.7. Sistematika Pembahasan	10
2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Model Pertumbuhan Ekonomi	11
2.1.1. Model Harrod Domar	11
2.1.2. Model Solow	13
2.1.3. Teori Pertumbuhan Baru (New Growth Theory)	17
2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya	18
3. KONDISI UMUM PEREKONOMIAN MAKRO DAN KONDISI KEUANGAN	21
3.1. Kondisi Umum Perekonomian Makro di Provinsi Sumatera Barat	21
3.2. Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	43
4. METODOLOGI PENELITIAN	60
4.1. Spesifikasi Model	60
4.2. Asumsi Model	66
4.3. Perumusan Model	67
4.3.1. Modelling Ekonometrika	67
4.3.2. Model Regresi Linier dan Berganda	67
4.3.3. Uji t Koefisien Regresi Parsial	68
4.3.4. Uji Hipotesis Koefisien Regresi Secara Menyeluruh: Uji F	68
4.4. Model Regresi Data Panel	68
4.4.1. Koefisien tetap antar waktu dan individu (Common effect)	70
4.4.2. Slope konstan tetapi intersep berbeda antar individu (Fixed Effect)	70
4.4.3. Estimasi Dengan Pendekatan Random Effect	70
4.4.4. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel	71

4.5. Asumsi Dasar	71
4.5.1. Multikolinieritas	71
4.5.2. Heteroskedastisitas	71
4.5.3. Autokorelasi	72
5. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	73
5.1. Analisa Data Hasil Regresi	73
5.2. Analisis Uji Asumsi Dasar	97
6. KESIMPULAN DAN SARAN	98
6.1. Kesimpulan	98
6.2. Saran Untuk Studi Lebih Lanjut	99
6.3. Rekomendasi kebijakan	99
DAFTAR REFERENSI	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1.1. Grafik Ln(Belanja Modal Pemerintah Riil Tahun 2005) Terhadap Ln(Perubahan PDRB Riil Tahun 2005) Kabupaten/Kota di Provin-.... si Sumatera Barat	7
Gambar.4.1. Perbandingan Pengelompokan Belanja Daerah Sebelum Tahun 2003 . dan Setelah tahun 2003 APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumate- . ra Barat	62

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel.3.15. Nilai Tambah Sektor Pertanian Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006 (dalam milyar rupiah).	106
Tabel.3.16. Persentase Kontribusi Nilai Tambah Sektor Pertanian Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000 –2006	107
Tabel.3.17. Nilai Tambah Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006 (dalam milyar rupiah).	108
Tabel.3.18. Persentase Kontribusi Nilai Tambah Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006.	109
Tabel.3.19. Nilai Tambah Sektor Industri dan Pengolahan Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006 (dalam milyar rupiah).	110
Tabel.3.20. Persentase Kontribusi Nilai Tambah Sektor Industri dan Pengolahan Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006	111
Tabel.3.21. Nilai Tambah Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006 (dalam milyar rupiah).	112
Tabel.3.22. Persentase Kontribusi Nilai Tambah Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006	113
Tabel.3.23. Nilai Tambah Sektor Bangunan Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006 (dalam milyar rupiah).	114
Tabel.3.24. Persentase Kontribusi Nilai Tambah Sektor Bangunan Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006	115
Tabel.3.25. Nilai Tambah Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006 (dalam milyar rupiah).	116
Tabel.3.26. Persentase Kontribusi Nilai Tambah Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006.	117
Tabel.3.27. Nilai Tambah Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006 (dalam milyar rupiah).	118
Tabel.3.28. Persentase Kontribusi Nilai Tambah Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006.	119
Tabel.3.29. Nilai Tambah Sektor Keuangan Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006 (dalam milyar rupiah)	120
Tabel.3.30. Persentase Kontribusi Nilai Tambah Sektor Keuangan Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006	121

Tabel.3.31. Nilai Tambah Sektor Jasa Pemerintahan Terhadap Total PDRB Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006 (dalam milyar rupiah).	122
Tabel.3.32. Persentase Kontribusi Nilai Tambah Sektor Jasa Pemerintahan Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006	123
Tabel.3.33. Nilai Tambah Sektor Jasa Swasta Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006 (dalam milyar rupiah).....	124
Tabel.3.34. Persentase Kontribusi Nilai Tambah Sektor Jasa Swasta Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel.1.1.	Belanja Modal Pemerintah Tahun 2005, PDRB Deflator, Belanja Mo- dal Pemerintah Riil Tahun 2005, Ln(Belanja Modal Pemerintah Riil.... Tahun 2005) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat...	5
Tabel.1.1.	Produk Domestik Regional Bruto Riil Tahun 2005 Harga Konstan Ta- hun 2000, Produk Domestik Regional Bruto Riil Tahun 2004 Harga Konstan Tahun 2000, Perubahan PDRB Riil Tahun 2005, Ln (Peruba- han PDRB Riil Tahun 2005), Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi . Sumatera Barat “sambungan”	6
Tabel.3.1.	PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000–2006.. (dalam milyar rupiah) Harga Konstan 2000.....	25
Tabel.3.2.	Tingkat Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006	41
Tabel.3.3.	Jumlah Angkatan Kerja, Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pen- ngangguran di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2004-2006	42
Tabel.3.4.	Pendapatan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peme-.... rintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006 ... (dalam jutaan rupiah)	44
Tabel.3.5.	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Dae- ... rah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006	45
Tabel.3.6.	Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah. Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2003-2006.....	47
Tabel.3.7.	Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Pemerintah.. Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2003-2006.....	48
Tabel.3.8.	Alokasi Belanja Modal Per Sektor Pemerintah Kabupaten Agam dan.... Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2002(%)	49
Tabel.3.9.	Alokasi Belanja Modal Per Sektor Pemerintah Kabupaten Padang Pa- .. riaman dan Pasaman di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2002(%).	50
Tabel.3.10.	Alokasi Belanja Modal Per Sektor Pemerintah Kabupaten Pesisir Se- ... latan dan Sawahlunto Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2002(%)	51
Tabel.3.11.	Alokasi Belanja Modal Per Sektor Pemerintah Kabupaten Solok dan Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2002(%)	52
Tabel.3.12.	Alokasi Belanja Modal Per Sektor Pemerintah Kota Bukittinggi dan.... Padang di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2002(%)	53
Tabel.3.13.	Alokasi Belanja Modal Per Sektor Pemerintah Kota Padang Panjang dan Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2002(%)	54
Tabel.3.14.	Alokasi Belanja Modal Per Sektor Pemerintah Kota Sawahlunto dan Solok di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2002(%).....	55
Tabel.5.1.	Hasil Regresi Model	73
Tabel.5.1.	Hasil Regresi Model “sambungan”.....	74
Tabel.5.2.	Hasil Regresi Model	77
Tabel.5.2.	Hasil Regresi Model “sambungan”	78
Tabel.5.3.	Hasil Regresi Model	81
Tabel.5.3.	Hasil Regresi Model “sambungan”	82
Tabel.5.4.	Hasil Regresi Model	85

Tabel.5.4. Hasil Regresi Model “sambungan”	86
Tabel.5.5. Hasil Regresi Model	89
Tabel.5.5. Hasil Regresi Model “sambungan”	90
Tabel.5.6. Hasil Regresi Model	94
Tabel.5.6. Hasil Regresi Model “sambungan”	95

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan bahwa : perkembangan arah kebijakan fiskal dan RAPBN 2008 mengalami perubahan orientasi kebijakan fiskal sebelum tahun 2006 yang ditujukan untuk konsolidasi fiskal, sementara itu sejak tahun 2006 kebijakan fiskal lebih diarahkan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian (“Pemerintah Jaga” para. 4).

Pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal 2008 pada upaya peningkatan daya beli masyarakat (dorongan peningkatan konsumsi) dan dorongan investasi guna mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 6,8%. Pemerintah menaruh pertumbuhan ekonomi itu didukung dengan kebijakan fiskal. Ada dua yang paling kritis yaitu konsumsi masyarakat dan dorongan investasi.

Untuk mendorong peningkatan konsumsi itu, pemerintah sudah menyiapkan berbagai program yang dapat meningkatkan income riil masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Di lain pihak, pemerintah berupaya menekan laju inflasi sehingga tingkat bunga tidak meningkat.

Sementara dalam upaya mendorong peningkatan investasi, pemerintah akan meningkatkan belanja pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur yang diharapkan mendorong adanya investasi dari dunia usaha.

Pemerintah akan mengalokasikan jumlah anggaran dengan peningkatan yang cukup signifikan dalam belanja infrastruktur, makanya beberapa waktu lalu disebutkan bahwa anggaran untuk sektor pekerjaan umum dan perhubungan naik signifikan dalam anggaran (“Kebijakan Fiskal” para.1-2,4,6,8).

Sedangkan menyangkut kebijakan belanja daerah, Anggito Abimanyu mengatakan bahwa: pemerintah akan melakukan konsolidasi defisit APBN dan APBD, serta pemantapan desentralisasi fiskal guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Terkait dengan hal tersebut pemerintah akan mengupayakan pengurangan kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah, dengan meningkatkan kapasitas daerah untuk menggali

potensi pendapatan asli daerah (PAD)

Menurut Anggito, bahwa “pengalihan secara bertahap dana konsentrasi dan tugas pembantuan yang ditujukan untuk mendanai kegiatan yang sudah menjadi tanggung jawab daerah ke (DAK) (“Pemerintah Jaga” para.9-11).

Menurut Nurjoni, bahwa : Tak diragukan lagi, infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sektor ini menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih merata dan lebih menyejahterakan masyarakat.

Lebih lanjut Nurjoni menjelaskan bahwa: ”Keterbatasan pembangunan infrastruktur menyebabkan melambatnya laju investasi di tanah air dalam beberapa tahun terakhir ini. Di sisi lain, harus diakui infrastruktur di Indonesia masih belum bisa meningkatkan daya saing sektor riil” (Nurjoni, para.1-2)

Dengan program peningkatan belanja modal, mau tak mau menyentuh langsung peningkatan pembangunan beragam infrastruktur, seperti sarana pertanian, transportasi, dan infrastruktur lain yang langsung menopang produktivitas dan kesejahteraan rakyat. Itu berarti di masa mendatang, semua belanja akan berorientasi ke daerah, karena membangun bangsa adalah pembangunan daerah serta membentuk kapital atau modal yang semakin besar di daerah. Trans-Sumatera, trans-Sulawesi, hingga trans-Kalimantan harus diwujudkan. Untuk kepentingan rakyat, semua itu harus dibesarkan anggarannya.

Karena anggaran infrastruktur, sektor pertanian, kesehatan dan transportasi akan dilipatgandakan, biaya operasional, perjalanan dinas, atau pun belanja modal yang tidak produktif harus diturunkan. Itu berarti para birokrat tidak bisa lagi seenaknya bermain-main dengan belanja operasional atau mencatat perjalanan dinas.

Yang terpenting, pemerintah sudah memberi isyarat mengenai perubahan orientasi pembangunan. Fokus tidak lagi ke perkotaan, melainkan ke

daerah. Infrastruktur akan dilengkapi agar daerah memiliki daya saing untuk menarik modal asing (“Produktivitas Anggaran” para.5-7).

Pembangunan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja mendapat perhatian pemerintah mengingat fondasi utama untuk mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi hanya akan terjadi jika terjadi peningkatan stok dan perbaikan kualitas infrastruktur (“RAPBN 2008” para.11)

Definisi Infrastruktur, (World Bank, World Development Report 1994) sebagai jasa-jasa publik (energi listrik, fasilitas air, pekerjaan publik (jalan), dan transportasi yang lain (pelabuhan dan bandar udara).

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat dikatakan adanya hubungan yang kuat antara belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, dalam kenyataannya tidak selalu bahwa peningkatan belanja pemerintah dalam bidang infrastruktur akan merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi.

Banyak penelitian empiris yang menjelaskan hubungan belanja modal pemerintah (infrastruktur) dengan pertumbuhan ekonomi.

Secara teoritis, pengeluaran pemerintah yang lebih besar cenderung mengurangi pertumbuhan ekonomi (Ram 76:191-203). Pertama, disebabkan kegiatan pemerintah sering dilakukan tidak dengan efisien. Kedua, proses pengaturan yang memberikan beban yang berlebihan dan biaya pada sistem ekonomi. Ketiga, banyak kebijakan fiskal dan moneter pemerintah cenderung mendistorsi insentif ekonomi dan produktivitas yang lebih rendah dari sistem. Pada sisi lain peran pemerintah dalam proses pembangunan ekonomi mencakup; (i) peran pemerintah dalam mengharmonisasikan konflik diantara kepentingan sosial dan swasta, (ii) mencegah eksploitasi negara oleh asing, (iii) mengarahkan kepada peningkatan investasi yang produktif dan menyediakan pilihan optimal secara sosial untuk pembangunan dan pertumbuhan (Gonzales-Paramo dan Martinez 33:184-205) (Pascual dan Garcia 2).

Aschauer menunjukkan dampak signifikan dari modal publik terhadap pertumbuhan ekonomi (177-200). Hasil ini, menunjukkan hal yang berbeda terutama untuk kasus Amerika Serikat (Holtz-Eakin 12-21). Penelitian lain

menjelaskan dampak modal publik atas tingkat pertumbuhan dari output seperti regresi antar negara. Hasilnya menunjukkan investasi publik/GDP berpengaruh positif tetapi tidak cukup signifikan dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi (Barro 407-43) (Robles vol.16 no.1:98-9).

Easterly dan Rebelo menjelaskan dampak positif dan signifikan dari investasi pemerintah terhadap pertumbuhan output (vol.32 no.3:417-58). Devarajan dan Zhou menemukan hubungan signifikan dan negatif diantara rasio pengeluaran komunikasi dan transportasi terhadap total pengeluaran dan pertumbuhan ekonomi (vol.37 no.3:313-44) (Robles vol.16 no.1:99).

Lin menekankan cara-cara yang berbeda dimana pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan (melalui barang-barang publik dan infrastruktur, jasa-jasa sosial, dan campur tangan yang direncanakan). Disisi lain, perpajakan pemerintah dapat mengarah kepada misalokasi sumber daya, tidak produktif dan pengeluaran yang tidak efisien (26:83-94) (Pascual dan Garcia 2).

Cheng dan Lee menemukan bahwa di Taiwan pengeluaran pemerintah yang terlampau besar tidak mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi menghambat pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh *crowding out effect* atau peningkatan pajak (27:1051-66) (Pascual dan Garcia 2).

Hal yang menyebabkan perbedaan adalah pada masalah ekonometri tertentu seperti *unit roots* dan *spurious correlation* (Jorgenson, Februari), *endogeneity of public capital* (Cashin 42:237-69), serta *measurement errors in the public capital proxies* (Baltagi dan Pinnoi vol.20 no.2:351-59).

Pada penelitian ini, istilah belanja modal pemerintah, belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, belanja modal publik, investasi pemerintah, investasi publik, mempunyai arti yang sama.

Dari berbagai hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa hubungan diantara belanja modal pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil positif dan negatif. Hal ini mendorong penulis untuk melihat bagaimana pengaruh belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mengambil studi kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (2000-2006).

Sebagai gambaran untuk permasalahan penelitian ini, disajikan data Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005, Pro-

Tabel 1.1
 Belanja Modal Pemerintah Tahun 2005, PDRB Deflator,
 Belanja Modal Pemerintah Riil Tahun 2005, Ln(Belanja Modal Pemerintah Riil
 Tahun 2005) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Belanja Modal Pemerintah Tahun 2005	PDRB Deflator Tahun 2005	Belanja Modal Pemerintah Riil Tahun 2005	Ln (Belanja Modal Pemerintah Riil) Tahun 2005
Kab. Agam	18,389,067,000	1.453	12,657,813,974	23.26
Kab. Lima Puluh Kota	29,374,061,000	1.449	20,266,489,422	23.73
Kab. Padang Pariaman	198,406,719,000	1.527	129,895,536,859	25.59
Kab. Pasaman	47,328,225,000	1.520	31,145,497,620	24.16
Kab. Pesisir Selatan	49,613,161,000	1.399	35,456,409,769	24.29
Kab. Sawahlunto Sijunjung	65,335,869,000	1.510	43,278,687,083	24.49
Kab. Solok	47,779,225,000	1.507	31,699,360,871	24.18
Kab. Tanah Datar	44,037,857,000	1.461	30,135,589,205	24.13
Kota Bukittinggi	34,922,521,000	1.425	24,506,624,345	23.92
Kota Padang	44,052,159,000	1.456	30,253,586,775	24.13
Kota Padang Panjang	49,471,700,000	1.505	32,877,302,953	24.22
Kota Payakumbuh	52,132,902,000	1.477	35,291,353,249	24.29
Kota Sawahlunto	31,023,928,000	1.393	22,267,133,838	23.83
Kota Solok	28,438,128,000	1.457	19,513,153,129	23.69

Sumber : BPS " Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2004-2005", BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/Kota Tahun 2002-2006, BPS Sumatera Barat & Bappeda Sumatera Barat "Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2004 dan 2005 dan "telah diolah kembali".

duk Domestik Bruto Deflator Tahun 2005, Belanja Modal Pemerintah Riil Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005, Ln(Belanja Modal Pemerintah Riil Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005), Produk Domestik Regional Bruto Riil Tahun 2005 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Harga Konstan Tahun 2000, Produk Domestik Regional Bruto Riil Tahun 2004 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Harga Konstan Tahun 2000, Perubahan Produk Domestik Regional Bruto Riil Tahun 2005 serta Ln(Perubahan Produk Domestik Regional Bruto Riil Tahun 2005) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1.

Apabila Ln (Belanja Modal Pemerintah Riil Kabupaten/Kota di Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2005 dihubungkan terhadap Ln(Perubahan Produk Domestik Regional Bruto Riil Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005) akan memunculkan berbagai variasi hubungan diantara kedua variabel tersebut antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.1

Produk Domestik Regional Bruto Riil Tahun 2005 Harga Konstan Tahun 2000,
Produk Domestik Regional Bruto Riil Tahun 2004 Harga Konstan Tahun 2000,
Perubahan PDRB Riil Tahun 2005, Ln(Perubahan PDRB Riil Tahun 2005),
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
“sambungan”

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto Riil Tahun 2005 (H. Kons. Tahun 2000)	Produk Domestik Regional Bruto Riil Tahun 2004 (H. Kons. Tahun 2000)	Perubahan Produk Domestik Regional Bruto Riil Tahun 2005	Ln(Perubahan Produk Domestik Regional Bruto Riil Tahun 2005)
Kab. Agam	2,325,161,690,000	2,190,815,660,000	134,346,030,000	25.62
Kab. Lima Puluh Kota	2,125,656,740,000	2,009,422,020,000	116,234,720,000	25.48
Kab. Padang Pariaman	2,962,222,710,000	2,743,529,920,000	218,692,790,000	26.11
Kab. Pasaman	3,010,965,540,000	2,834,538,250,000	176,427,290,000	25.9
Kab. Pesisir Selatan	1,625,743,400,000	1,546,833,850,000	78,909,550,000	25.09
Kab. Sawahlunto				
Sijunjung	1,869,478,960,000	1,773,933,730,000	95,545,230,000	25.28
Kab. Solok	2,094,981,800,000	1,979,670,140,000	115,311,660,000	25.47
Kab. Tanah Datar	1,961,820,260,000	1,863,489,970,000	98,330,290,000	25.31
Kota Bukittinggi	762,433,070,000	719,828,860,000	42,604,210,000	24.48
Kota Padang	9,110,697,440,000	8,652,900,060,000	457,797,380,000	26.85
Kota Padang Panjang	311,166,400,000	294,286,330,000	16,880,070,000	23.55
Kota Payakumbuh	644,374,030,000	609,186,760,000	35,187,270,000	24.28
Kota Sawahlunto	444,671,740,000	436,113,320,000	8,558,420,000	22.87
Kota Solok	394,216,630,000	372,398,890,000	21,817,740,000	23.81

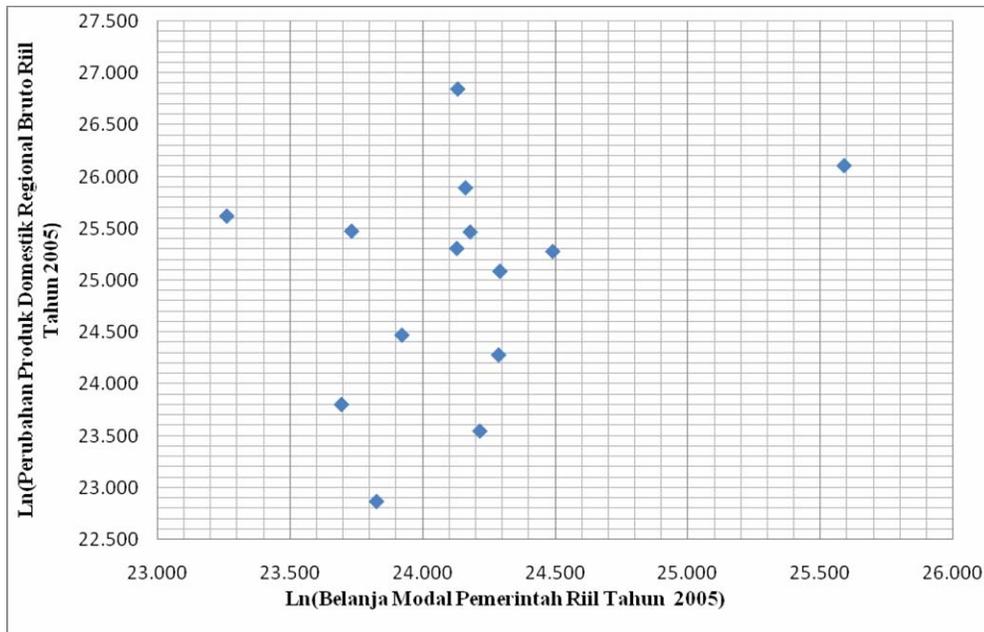
Sumber : BPS " Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2004-2005", BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/Kota Tahun 2002-2006, BPS Sumatera Barat & Bappeda Sumatera Barat "Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2004 dan 2005 dan "telah diolah kembali".

Hubungan yang lebih jelas dapat dilihat pada grafik Ln(Belanja Modal Pemerintah Riil Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005) terhadap Ln(Perubahan Produk Domestik Regional Bruto Riil Kabupaten/Kota di

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 sebagaimana disajikan pada gambar 1.1.

Analisis juga dapat diperluas dengan melihat hubungan antara Belanja Modal Pemerintah Riil Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat terhadap Perubahan Produk Domestik Regional Bruto Riil Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode (2000-2006).

Gambar.1.1



Grafik Ln(Belanja Modal Pemerintah Riil Tahun 2005) Terhadap Ln(Perubahan PDRB Riil Tahun 2005) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Sumber : BPS " Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2004-2005", BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/Kota Tahun 2002-2006, BPS Sumatera Barat & Bappeda Sumatera Barat "Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2004 dan 2005 dan "telah diolah kembali".

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berpengaruh positif atau negatif pada Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota untuk masing-masing Kabupaten/Kota (2000-2006).

Pada tabel dan gambar diatas, belanja modal pemerintah yang dimaksud sesuai dengan Belanja Modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2005.

Namun demikian, investasi swasta dan jumlah penduduk juga dilihat pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota untuk masing-masing Kabupaten/Kota (2000-2006).

1.2. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana pengaruh Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (2000-2006).

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk melihat pengaruh besarnya Belanja Modal Pemerintah, Investasi Swasta, dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (2000-2006).

Manfaat penelitian:

- a) Kontribusi empiris, untuk memperkuat penelitian sebelumnya, berkenaan dengan pengaruh besarnya belanja modal Pemerintah terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dilakukan secara empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat;
- b) Kontribusi kebijakan, memberikan masukan baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dari APBN, APBD, UU, PP serta PERDA yang menyertainya; dan
- c) Kontribusi teori, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

- a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun (2000-2006).
- b) Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun (2000-2006)
- c) Investasi Swasta Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun

(2000-2006).

d) Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun (2000-2006).

1.5. Hipotesa

Berdasarkan konsep dan temuan-temuan tersebut diatas maka dikembangkan hipotesis yang menyangkut dengan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Dugaan yang dikemukakan adalah bahwa besarnya Belanja Modal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun (2000-2006).

1.6. Data dan Sumber Data

Sementara data yang dianalisis adalah data sekunder dengan time series dan cross section dari tahun 2000-2006. Sumber data melalui Biro Pusat Statistik Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Biro Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Pusat Statistik dan Bank Indonesia Cabang Sumatera Barat

Data statistik mengenai perekonomian makro Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat seperti: data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun (2000-2006), data Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Barat Tahun (2000-2006), data Jumlah angkatan kerja dan partisipasi angkatan kerja di Provinsi Sumatera Barat (Tahun 2000-2006) diperoleh melalui data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dan Biro Pusat Statistik.

Data Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun (2000-2006) diperoleh melalui laporan dari APBD Kabupaten/Kota yang diperiksa oleh BPKP serta data melalui Biro Pusat Statistik Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Biro Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Biro Pusat Statistik.

Data Investasi Swasta Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun (2000-2006) diperoleh melalui data Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Pusat Statistik dan Bank Indonesia Cabang Sumatera Barat.

Data Jumlah Penduduk menurut kelompok umur Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun (2000-2006) diperoleh dari data Biro Pusat Statistik Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Biro Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Biro Pusat Statistik.

1.7. Sistematika Pembahasan

Tesis ini diuraikan dalam 6 BAB dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Hipotesa, Data dan Sumber Data, dan Sistematika Pembahasan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA yang berisi argumen teoritis mengenai kaitan antara belanja modal pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.

BAB 3: KONDISI UMUM PEREKONOMIAN MAKRO DAN KONDISI KEUANGAN yang berisi gambaran umum perekonomian makro Provinsi Sumatera Barat dan kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

BAB 4: METODE PENELITIAN yang terdiri dari Spesifikasi Model, Asumsi Model dan Perumusan Model.

BAB 5: HASIL DAN PEMBAHASAN yang merupakan inti dari tesis yang membahas pengaruh besarnya belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (2000-2006).

BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Model Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1. Model Harrod Domar

Model pertumbuhan ekonomi Harrod Domar memberikan arah kepada pertumbuhan dinamik. Kita ingin menentukan tingkat pertumbuhan ekuilibrium g untuk perekonomian. Misalkan Y adalah GDP dan S adalah tabungan. Tingkat tabungan adalah fungsi dari GDP, dimana $S = sY$. Tingkat modal K dibutuhkan untuk menghasilkan output Y yang ditentukan oleh persamaan $K = \sigma Y$ dimana σ dinamakan capital-output ratio. Investasi adalah variabel paling penting untuk perekonomian disebabkan investasi mempunyai dua peran.

Investasi merupakan komponen penting untuk permintaan output sebagaimana peningkatan dalam stok modal. Dengan demikian $\Delta K = \sigma \Delta Y$. Untuk ekuilibrium, seharusnya ada keseimbangan penawaran dan permintaan untuk output nasional. Dalam kasus sederhana, kondisi ekuilibrium menghasilkan $I = S$.

$$I = \Delta K = \sigma \Delta Y \quad (2.1.)$$

$$I = S \quad (2.2.)$$

sehingga:

$$\sigma \Delta Y = sY \quad (2.3.)$$

Oleh karenanya tingkat pertumbuhan ekuilibrium ditentukan oleh:

$$g = \frac{\Delta Y}{Y} = s/\sigma \quad (2.4.)$$

Dengan kata lain, tingkat pertumbuhan ekuilibrium sama dengan rasio marginal propensiti tabungan dan capital-output ratio. Ini adalah hasil yang sangat signifikan. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana perekonomian dapat tumbuh dimana pertumbuhan kapasitas ekonomi untuk memproduksi sama dengan permintaan untuk output perekonomian (Watkins, Valley, Alley, para.1-4).

Prediksi utama adalah pertumbuhan GDP proporsional terhadap pengeluaran investasi dalam GDP. Asumsinya adalah adanya tenaga kerja yang men-

ganggur sehingga tidak ada batasan untuk penawaran tenaga kerja serta produksi adalah proporsional terhadap stok mesin.

Kita ingin menentukan tingkat pertumbuhan GDP, yang didefinisikan sebagai berikut:

$$G(Y) = (\text{perubahan}Y / Y) \quad (2.5)$$

Dimana $Y = \text{GDP}$

Untuk mendapatkan ini, kita mengestimasi Capital Output Ratio (COR), yang diukur dalam efisiensi modal.

$$ICOR = (\text{perubahan}K / \text{perubahan}Y) \quad (2.6)$$

dimana $K = \text{stok modal}$

ICOR tinggi menunjukkan produktivitas modal lebih rendah. Bila modal diasumsikan hanya berpengaruh kepada batasan produksi, investasi (I) dalam model Harrod Domar didefinisikan sebagai pertumbuhan stok modal.

$$I = (\text{perubahan}K) \quad (2.7)$$

Tetapi investasi juga sama dengan tabungan, dimana sama dengan rata-rata propensiti tabungan dikali dengan GDP(Y). Misalkan $APS = s$.

$$I = S = APS * Y = s * Y \quad (2.8)$$

sehingga:

$$ICOR = (sY) / (\text{perubahan}Y) \quad (2.9)$$

setelah disusun kembali menjadi:

$$G(Y) = (\text{perubahan}Y) / Y = s / ICOR \quad (2.10)$$

(Thornton, para 1-8)

2.1.2. Model Solow.

Tahap awal dengan tingkat pengembalian konstan dari fungsi produksi: $Y = f(K,L)$. Tingkat pengembalian konstan secara tidak langsung menunjukkan perkalian masing-masing input dengan faktor z , perubahan output sama dengan perkalian faktor yang sama : $zY = f(zK,zL)$.

Dalam kasus ini, misalkan $z = 1/L$. Ini berarti:

$$Y * 1/L = f(K * 1/L, L * 1/L) \quad (2.11)$$

atau

$$Y/L = f(K/L, 1) \quad (2.12)$$

Misalkan $y = Y/L$ dan $k = K/L$, sehingga fungsi produksi sekarang dapat ditulis sebagai berikut:

$$y = f(k) \quad (2.13)$$

Dimana y adalah output per pekerja dan k adalah modal per pekerja.

Fungsi produksi menunjukkan produksi barang. Kita sekarang melihat permintaan untuk barang. Permintaan untuk barang, dalam model yang sederhana, terdiri dari konsumsi ditambah investasi.

$$y = c + i \quad (2.14)$$

Dimana, $y = Y/L$, $c = C/L$, $i = I/L$. Investasi menciptakan tambahan terhadap stok modal. Fungsi konsumsi dalam model yang sederhana adalah $C = (1 - s) Y$, yang dapat ditulis sebagai $c = (1 - s) y$ dimana “ s ” adalah tingkat tabungan dan $0 < s < 1$. Kembali ke permintaan barang, $y = c + i$, kita dapat menulis kembali sebagai:

$$y = (1 - s)y + i \quad (2.15)$$

$$y = y - sy + i \quad (2.16)$$

sehingga,

$$y - y - sy = i \quad (2.17)$$

Ini berarti bahwa $sy = i$, tabungan sama dengan investasi. Investasi ditambahkan kepada stok modal (investasi diciptakan melalui tabungan):

$$i = sy = sf(k) \quad (2.18)$$

Tingkat yang lebih tinggi dari output, jumlah yang lebih besar pada investasi.

Asumsikan bahwa jumlah tertentu dari stok kapital dikonsumsi masing-masing periode. Depresiasi terjadi terhadap stok modal. Misalkan δ adalah tingkat depresiasi. Ini berarti masing-masing periode, $\delta \cdot k$ jumlah modal yang dikonsumsi.

Kita dapat melihat pengaruh dari investasi dan depresiasi atas stok modal.

$$\Delta k = I - \delta k \quad (2.19)$$

Yang menunjukkan penambahan stok modal dari penambahan investasi dan penurunan yang disebabkan oleh depresiasi. Ini dapat ditulis sebagai $\Delta k = s \cdot f(k) - \delta k$.

Tingkat steady state stok modal adalah pada kondisi investasi dan depresiasi mengimbangi satu sama lain : $\Delta k = 0$.

Aturan umum tingkat akumulasi modal adalah steady state dengan tingkat paling tinggi dalam konsumsi. Ide dibelakang aturan umum seandainya pemerintah dapat menggerakkan perekonomian menuju steady state baru dimana yang diinginkan. Jawabannya adalah mereka akan memilih steady state pada konsumsi

maksimum. Untuk menciptakan steady state, pemerintah harus mengubah tingkat tabungan.

Bila $y = c + i$, kemudian $c = y - i$, yang dapat ditulis kembali sebagai $c = f(k) - sf(k)$. Dimana pada steady state berarti $c = f(k) - \delta k$. Ini menunjukkan bahwa untuk konsumsi maksimum, kita ingin membuat perbedaan yang paling besar diantara y dan depresiasi.

Bila kita ingin untuk memaksimalkan $c = f(k) - \delta k$, kita melakukan turunan pertama dan menjadikan sama dengan nol:

$$dc = \frac{\partial f}{\partial k} dk - \delta dk = 0 \quad (2.20)$$

Bila kita lihat perubahan pada k , $dk = 1$, yang mengarahkan kita dengan hasil dimana, marjinal produk modal harus sama dengan tingkat depresiasi : $MP_k = \delta$.

Misalkan “ n ” menunjukkan pertumbuhan angkatan kerja. Sebagaimana pertumbuhan terjadi, $k = K/L$ menurun (peningkatan dalam L) dan $y = Y/L$ juga menurun (peningkatan dalam L). Dengan demikian, pertumbuhan L , perubahan pada k sekarang:

$$\Delta k = s * f(k) - \delta * k - n * k \quad (2.21)$$

Dimana $n*k$ mewakili penurunan stok modal per unit tenaga kerja dari lebih banyak tenaga kerja. Kondisi steady state sekarang dimana $s*f(k) = (\delta+n)*k$. Pada steady state, tidak ada perubahan pada k sehingga tidak ada perubahan pada y . Ini berarti bahwa output per pekerja dan modal per pekerja keduanya konstan. Bila, tenaga kerja tumbuh pada tingkat n (L menaik pada tingkat n), Y juga menaik pada tingkat n , Dengan cara yang sama, K menaik pada tingkat n .

Kita akan mengasumsikan bahwa kemajuan teknologi terjadi disebabkan oleh peningkatan efisiensi tenaga kerja. Ide ini dapat digabungkan pada fungsi

produksi dengan asumsi sederhana masing-masing periode, tenaga kerja mampu untuk menghasilkan lebih banyak output dibandingkan periode sebelumnya.

$$Y = f(K, L * E) \quad (2.22)$$

Dimana E mewakili efisiensi tenaga kerja. Kita akan mengasumsikan bahwa E tumbuh pada tingkat g. Masih dengan asumsi tingkat pengembalian konstan terhadap skala, fungsi produksi dapat sekarang ditulis sebagai:

$$Y / L * E = f(K / L * E, L / L * E) = f(K) \quad (2.23)$$

dimana $k = K / L * E$.

Kita sekarang melihat output per efisiensi unit tenaga kerja dan modal per efisiensi unit tenaga kerja. Bila $k = K / L * E$, kita dapat melihat bahwa k berubah sepanjang waktu.

$$\begin{aligned} dk &= \frac{1}{L * E} dk - \frac{K}{L^2 * E} dL - \frac{K}{L * E^2} dE \\ &= \frac{K}{L * E} \frac{dK}{K} - \frac{K}{L * E} \frac{dL}{L} - \frac{K}{L * E} \frac{dE}{E} \\ &= k\delta - kn - kg \end{aligned} \quad (2.24)$$

Dimana, tanda bagian pertama disebelah kanan, $k\delta$ adalah negatif disebabkan modal dikonsumsi oleh depresiasi ($dK/K < 0$).

Kondisi steady state dimodifikasi dengan merefleksikan kemajuan teknologi:

$$\Delta k = s * f(k) - (\delta + g + n) * k \quad (2.25)$$

Dimana $\Delta k = 0$, $s * f(k) = (\delta + g + n) * k$. Pada steady state, y dan k adalah konstan. Bila $y = Y / L * E$, dan L tumbuh pada tingkat n ketika E tumbuh pada tingkat

g, kemudian Y seharusnya tumbuh pada tingkat $n + g$. Dengan cara yang sama bila $k = K/L \cdot E$, K seharusnya tumbuh pada tingkat $n+g$.

Aturan umum tingkat akumulasi modal dengan model lebih rumit ini diperoleh dengan maksimum konsumsi pada steady state, dimana hasilnya mempunyai hubungan sebagai berikut:

$$\frac{\partial f}{\partial K} - \delta = n + g \quad (2.26)$$

Yang mana secara sederhana menunjukkan marjinal produk kapital netto dari depresiasi seharusnya sama dengan jumlah penduduk dan kemajuan teknologi (“Solow Growth” para.1-11).

2.1.3. Teori Pertumbuhan Baru (New Growth Theory)

Teori pertumbuhan baru menekankan bahwa hasil pertumbuhan dari peningkatan pengembalian yang diasosiasikan dengan pengetahuan baru. Pengetahuan mempunyai kepemilikan berbeda dibandingkan barang ekonomi lain (non rival, dan excludable). Kemampuan untuk perekonomian tumbuh dengan peningkatan pengetahuan dibandingkan tenaga kerja atau modal menciptakan kesempatan untuk mendekati tanpa batas pertumbuhan.

Kegagalan pasar untuk menghasilkan pengetahuan yang cukup disebabkan oleh inovator tidak dapat mengambil semua keuntungan yang diasosiasikan dengan penciptaan teknologi baru. Disebabkan pengetahuan dapat menuju biaya marjinal nol, perusahaan yang menggunakan pengetahuan dapat menghasilkan keuntungan monopoli.

Teori pertumbuhan baru dan peningkatan pengembalian pengetahuan mempunyai banyak implikasi untuk kebijaksanaan pembangunan ekonomi. Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya investasi dalam penciptaan pengetahuan baru untuk mempertahankan pertumbuhan. Pembuat kebijaksanaan akan membutuhkan perhatian yang lebih besar kepada faktor yang menyediakan insentif untuk penciptaan pengetahuan (riset dan pembangunan, sistem pendidikan, kewirausa-

haan dan toleransi keberagaman, ekspektasi makroekonomi, keterbukaan terhadap perdagangan (Cortright ii).

2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

Banyak penelitian sekarang memfokuskan pertanyaan kontroversial dan kompleks yang menyangkut apakah investasi swasta dan investasi publik saling melengkapi, substitusi, atau lebih banyak pada asumsi model makroekonomi, independen satu dengan yang lain (Barth dan Cordes 235-242: Aschauer 17-25: Munnell 3-22: Looney 1985: Ramirez 1994:1-17 1993:173-190: Riedel 1992 dan Shah no.100:1-37) (Razmi dan Ramirez vol.15 no.1:68).

Khan dan Kumar menjelaskan bagaimana speed of convergence dalam pendapatan perkapita riil diantara negara berkembang dipengaruhi oleh kontribusi investasi swasta atau publik. Hasil menunjukkan bahwa investasi publik dan swasta mempunyai pengaruh berbeda pada pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Bagian yang lebih tinggi dari investasi publik menyebabkan penurunan pada speed of convergence (vol.9 no.3:440).

Model yang digunakan adalah model pertumbuhan neoklasik (Khan dan Kumar vol.9 no.3:444). Metode yang dipakai Ordinary Least Square, Two Stage Least Square dan Panel Data (Khan dan Kumar vol.9 no.3:451). Untuk sampel digunakan panel data 95 negara berkembang periode 1970-1990 (Khan dan Kumar vol.9 no.3:441).

Robles menyimpulkan bahwa pengaruh positif modal publik terhadap tingkat pertumbuhan output selama transisi menuju steady state (vol.16 no.1:106) Model yang digunakan berdasarkan kepada fungsi produksi Cobb Douglas (Robles vol.16 no.1:106-7) Metode yang dipakai Ordinary Least Square. Untuk sampel digunakan data cross section 57 negara di 5 benua. Periode 1970-1985 dan 1980-1992 untuk sampel besar dan 1970-1985 untuk Amerika Latin (Robles vol.16 no.1:100)

Erden dan Holcombe menyimpulkan bahwa investasi publik melengkapi investasi swasta. Dalam jangka panjang, peningkatan 1% investasi publik akan meningkatkan investasi swasta 0.54 %. Dalam jangka pendekpun menunjukkan hasil yang positif. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tingkat bunga tidak

mempunyai pengaruh signifikan pada tingkat investasi (vol.32 no.3:490). Model yang digunakan adalah berdasarkan kepada model neoklasik (Erden dan Holcombe vol.32 no.3:481). Metode yang dipakai metode co-integration (cointegration methode) (Erden dan Holcombe vol.32 no.3:487). Untuk sampel digunakan panel data 19 negara periode 1980-1997 (Erden dan Holcombe vol.32 no.3:486).

Chao Wei menyimpulkan perbedaan *conditional convergence* yang lebih tinggi dan nilai yang lebih rendah dari elastisitas output dihubungkan terhadap modal. Tingkat yang lebih tinggi dari *conditional convergence* disebabkan lebih kepada aktivitas kebijakan dengan penekanan pada peningkatan aspek spesifik propinsi terhadap fungsi produksi agregat (Chao Wei 25). Model yang digunakan berdasarkan model neoklasik dan fungsi produksi Cobb Douglas (Chao Wei 14). Metode yang dipakai Ordinary Least Square (Chao Wei 16). Untuk sampel digunakan panel data 12 provinsi dan 1 wilayah teritorial di Negara Kanada periode 1971-2000 (Chao Wei 19).

Amarullah membahas tentang signifikansi pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia (ii). Terdapat hubungan yang positif antara pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi regional yang ditandai oleh peningkatan pendapatan perkapita penduduk (Amarullah ii). Dari hasil analisis didapatkan bahwa jalan, listrik, telepon, air bersih, pendidikan dan investasi mempunyai hubungan positif dengan output (Amarullah 104). Model yang digunakan adalah fungsi produksi Cobb Douglas (Amarullah 43). Metode yang dipakai Pooled Least Square, fixed effect dengan data panel (Amarullah 84). Untuk sampel, digunakan data cross section 26 propinsi di Indonesia periode 1994-2002 (Amarullah 11).

Karim membahas tentang jenis infrastruktur apa yang dampaknya paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi ataupun seberapa besar mamfaat infrastruktur tertentu terhadap output ekonomi (PDB) sehingga didapat kombinasi pembangunan infrastruktur yang paling baik dampaknya (Karim ii). Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur terbukti secara signifikan dan positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Karim 71). Dari infrastruktur yang ada, infrastruktur jalan yang mempunyai elastisitas paling besar diikuti oleh telepon dan listrik (Karim 71). Model yang digunakan adalah model pertumbuhan ekonomi Solow (Ka-

rim 23). Metode yang dipakai Pooled Least Square, Fixed Effect dan Random Effect dengan data panel (Karim 8). Untuk sampel, digunakan data cross section 26 propinsi di Indonesia periode 1994-2003 (Karim 8).

Azwar membahas tentang pengaruh masing-masing investasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat baik investasi pemerintah dalam bentuk proyek sektoral, bantuan inpres, Dana PAD ditambah Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak maupun investasi swasta yang berasal dari kredit investasi perbankan, PMDN dan PMA, menganalisis pengaruh kesempatan kerja dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan melihat pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian Sumatera Barat selama periode analisis serta perkembangan berbagai jenis investasi yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat (Azwar 7). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh pengeluaran pembangunan (investasi), pengeluaran daerah sendiri dan kesempatan kerja (Azwar 84). Investasi swasta dan penanaman modal negara dan asing serta dana perbankan dalam bentuk kredit perbankan seperti kredit investasi kecil dan kredit modal kerja permanen juga kurang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Azwar 86). Model yang digunakan adalah fungsi produksi Cobb Douglas (Azwar 30). Metode yang dipakai regresi linier berganda (Azwar 34). Untuk sampel digunakan data time series provinsi Sumatera Barat periode 1976-1996 (Azwar 41).

BAB 3 : KONDISI UMUM PEREKONOMIAN MAKRO DAN KONDISI KEUANGAN

3.1. Kondisi Umum Perekonomian Makro di Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat berada di bagian barat tengah pulau Sumatera dengan luas 42.297,30 km². Provinsi ini memiliki dataran rendah di pantai barat, serta dataran tinggi vulkanik yang dibentuk Bukit Barisan yang membentang dari barat laut ke tenggara. Kepulauan Mentawai yang terletak di Samudera Hindia termasuk dalam provinsi ini. Garis pantai Sumatera Barat seluruhnya bersentuhan dengan Samudera Hindia sepanjang 375 km (“Profil Pisik” para.1).

Sumatera Barat, salah satu propinsi di Indonesia di wilayah pulau Sumatera, dilengkapi dengan keanekaragaman hayati. Dengan kondisi wilayah yang dikelilingi oleh laut dan juga barisan pergunungan, maka mengakibatkan daerah Sumatera Barat dikelilingi oleh hutan hujan tropis, dengan kondisi curah hujan dan kelembaban yang mendukung bagi berbagai jenis tanaman tropis. Oleh karena itu, hampir 70% wilayah hutan di Sumatera Barat dijadikan hutan konservasi (32%) dan hutan lindung (35%). Dukungan geografi tersebut membuat sektor pertanian menjadi unggulan di Sumatera Barat dari sembilan jenis usaha lainnya (“Potensi Sektor” para.1).

Perekonomian Sumatera Barat sampai saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian walaupun peranan sektor pertanian memperlihatkan kecenderungan yang menurun dari tahun ke tahun. Peranan sektor pertanian rata-rata sekitar 29,2 % dalam periode 1990-1993, dan turun menjadi 20,19 % pada awal krisis ekonomi pertengahan tahun 1997. Setelah krisis ekonomi, peranan sektor pertanian cenderung meningkat dan mencapai 25,16 % dari total PDRB pada tahun 2004.

Perkembangan di atas memperlihatkan bahwa peranan sektor pertanian masih tetap dominan dan diperkirakan akan tetap menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat di masa depan dimana sebagian besar penduduk Sumatera Barat menggantungkan kehidupannya pada sektor ini. Karena itu, pembangunan sektor pertanian pada tahun 2006-2010 akan menjadi prioritas pembangunan dalam kerangka pengembangan ekonomi Sumatera Barat. Peranan sektor industri dalam perekonomian daerah selama 1990-1993 sekitar 12% dan meningkat menjadi 14,97% pada tahun 1997. Sejak tahun 1998 peran

sektor industri menurun hingga menjadi 13,03 % pada tahun 2004. Dibandingkan dengan rata-rata nasional, peranan sektor industri Sumatera Barat relatif kecil. Keadaan ini menunjukkan masih lemahnya peran sektor industri dalam perekonomian daerah. Rendahnya pertumbuhan ekonomi sektor industri (barang dan jasa) mencerminkan semakin beratnya tantangan dalam penyediaan lapangan kerja di masa mendatang.

Krisis ekonomi telah mengakibatkan terjadinya keterbatasan dana pembangunan daerah. Hal ini disebabkan antara lain oleh penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp.64,3 milyar pada tahun anggaran 1997/1998 menjadi hanya Rp.44,0 milyar pada tahun 1998/1999. Penurunan yang sangat besar terjadi pada penerimaan retribusi daerah dan pajak daerah. Keadaan mencerminkan dampak kelesuan kegiatan perekonomian daerah sejak krisis ekonomi. Upaya peningkatan PAD dilakukan guna meningkatkan dana pembangunan untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah. Sejak beberapa tahun terakhir PAD Sumatera Barat memperlihatkan perkembangan yang positif. Nilai PAD meningkat dari Rp. 85,2 milyar pada tahun 2000 menjadi Rp. 299,1 milyar dan Rp. 406,5 milyar pada tahun 2004 dan 2005. Jumlah PAD yang relatif rendah memperlihatkan kendala yang dihadapi pemerintah daerah memacu kegiatan pembangunan.

Keterbatasan dana pembangunan karena rendahnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) harus dapat diisi oleh dana investasi dari swasta nasional atau asing. Namun demikian, upaya peningkatan investasi swasta tersebut sering mendapat hambatan karena kondisi stabilitas dalam negeri akibat ketidakpastian politik, hukum dan keamanan nasional. Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) selama periode 1993-1996 menunjukkan kecenderungan menurun. Demikian pula Penanaman Modal Asing yang juga menunjukkan kecenderungan menurun pada periode yang sama. Namun demikian, setelah tahun 1998 pertumbuhan PMDN kembali meningkat dan mencapai sekitar 8,2% pada periode 2001-2004. Sedangkan pada periode yang sama, pertumbuhan PMA cenderung menurun tetapi dengan pertumbuhan cukup tinggi yaitu sekitar 11,6 %. Untuk mendorong peningkatan investasi swasta tersebut maka upaya untuk

meningkatkan kegiatan promosi tentang peluang investasi di Sumatera Barat berikut pelayanan administrasi yang profesional perlu terus ditingkatkan.

Kondisi investasi di atas disebabkan oleh iklim investasi di daerah yang belum begitu kondusif seperti birokrasi perizinan yang masih panjang. Walaupun otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang lebih banyak kepada daerah, namun demikian perizinan penanaman modal masih banyak berada di tangan pemerintah pusat. Sementara itu, biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh investor dalam pengurusan izin masih dirasakan cukup tinggi. Kesemuanya ini menyebabkan timbulnya ekonomi biaya tinggi yang sangat mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya termasuk di Provinsi Sumatera Barat.

Pemahaman yang kurang tepat tentang otonomi daerah, kondisi sosial dan ekonomi yang kurang kondusif, menyebabkan para investor, baik yang berasal dari luar daerah maupun luar negeri sangat berhati-hati dan bahkan menunda untuk menanam modal mereka di daerah ini. Disamping itu, kondisi geografis daerah juga kurang menguntungkan bagi kegiatan investasi karena letaknya yang jauh dari pasar, dan moda transportasi yang belum mendukung, mengakibatkan biaya yang diperlukan dalam melakukan kegiatan produksi dan distribusi produk menjadi lebih mahal.

Pendapatan perkapita riil masyarakat Sumatera Barat pada awalnya mengalami penurunan drastis karena rendahnya tingkat pertumbuhan pendapatan dan tingginya tingkat inflasi. Keadaan ini dapat dilihat dari perkembangan penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Penduduk miskin di Sumatera Barat pada tahun 1999 sekitar 601.500 jiwa atau 13,2 % dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin terus menurun mencapai 496.400 atau 11,6 % (2000) menjadi 501.100 jiwa (11,2 %) pada tahun 2003 dan 472.400 jiwa (10,5%) pada tahun 2004. Namun demikian berdasarkan survey terakhir persentase penduduk miskin pada tahun 2005 ternyata jauh lebih besar yaitu mencapai 22,07 % atau mendekati 1 juta jiwa.

Memperhatikan kondisi di atas, maka pembangunan ekonomi Sumatera Barat dalam pada tahun 2006-2010 harus dapat mengatasi masalah utama yaitu: kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan atau ketidakadilan dalam setiap aspek pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pembangunan

ekonomi Sumatera Barat didasarkan pada potensi SDA dan SDM daerah, sesuai dengan permasalahan dan tantangan masa depan. Kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam menggerakkan pembangunan daerah Sumatera Barat harus mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan.
- b) Pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan kemampuan daya dukung SDA, lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK. Keterbatasan potensi SDA dan besarnya tingkat kemiskinan serta rendahnya kualitas SDM merupakan tantangan besar agar upaya peningkatan pendapatan tidak merusak lingkungan hidup atau kelestarian alam Sumatera Barat.
- c) Pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan antara Usaha Kecil, Menengah (UKM) dan Koperasi dengan perusahaan swasta dan pemerintah.
- d) Pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisiensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif dari produk andalan tertentu dengan mengakomodasi kemajuan teknologi.
- e) Pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan keterbukaan ekonomi sesuai dengan perkembangan ekonomi global melalui peningkatan hubungan dan kerjasama dengan provinsi dan negara tetangga.
- f) Pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga dapat memacu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
- g) Pembangunan ekonomi dipercepat dengan pembangunan infrastruktur yang dapat memperlancar dan mempercepat mobilitas orang dan barang keluar masuk Sumatera Barat (“Permasalahan Pembangunan” para.1-7).

Untuk mendapatkan gambaran secara lebih lengkap mengenai keadaan perekonomian di Provinsi Sumatera Barat, kita akan melihat indikator-indikator perekonomian untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Kita akan menganalisis terlebih dahulu mengenai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (2000-2006). Dengan melihat PDRB masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, kita akan memperoleh gambaran total PDRB baik untuk masing-masing Kabupaten maupun Kota. Selanjutnya, analisis juga dapat dilakukan mengenai variasi PDRB diantara Kabupaten/Kota, serta perkembangan PDRB Kabupaten/Kota dari tahun ke tahun.

Tabel 3.1.

PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2000-2006 (dalam milyar rupiah)
Harga Konstan 2000

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	1,801	1,874	1,963	2,067	2,191	2,325	2,469
Kab. Lima Puluh Kota	1,669	1,734	1,811	1,904	2,009	2,126	2,255
Kab. Padang Pariaman	2,282	2,372	2,488	2,611	2,744	2,962	3,382
Kab. Pasaman	2,313	2,412	2,532	2,673	2,835	3,011	3,196
Kab. Pesisir Selatan	1,315	1,359	1,416	1,477	1,547	1,626	1,711
Kab. Sawahlunto Sijunjung	1,473	1,537	1,609	1,683	1,774	1,869	1,983
Kab. Solok	1,648	1,712	1,788	1,876	1,980	2,095	2,220
Kab. Tanah Datar	1,566	1,618	1,685	1,768	1,863	1,962	2,076
Kota Bukittinggi	591	617	646	681	720	762	810
Kota Padang	7,066	7,353	7,742	8,172	8,653	9,111	9,577
Kota Padang Panjang	246	254	266	279	294	311	330
Kota Payakumbuh	504	524	549	577	609	644	684
Kota Sawahlunto	438	427	426	419	436	445	449
Kota Solok	311	324	338	353	372	394	419

Sumber: BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2006 "dan "telah diolah kembali"

Secara umum perekonomian Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan peningkatan

PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2000-2006 sebagaimana terlihat pada tabel 3.1.

Dari tabel 3.1, kita dapat menyimpulkan bahwa secara umum terjadinya peningkatan PDRB riil masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat setiap tahun terkecuali untuk Kota Sawahlunto dari tahun 2000 hingga tahun 2003.

Kota Sawahlunto mengalami penurunan PDRB pertahun mulai tahun 1998 hingga tahun 2003. Namun setelah tahun 2003, PDRB Kota Sawahlunto kembali mengalami peningkatan. Sektor pertambangan yang merupakan penyumbang cukup besar pada PDRB Kota Sawahlunto, mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB dari tahun 1998.

Dari hal yang telah dikemukakan diatas, kita belum memperoleh gambaran mengenai nilai tambah masing-masing sektor ekonomi serta perkembangannya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (2000-2006). Demikian pula, kontribusi nilai tambah masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB dan perkembangan kontribusi nilai tambah masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten/Kota (2000-2006).

Pembahasan dimulai dengan sektor pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan dan hotel & restoran, pengangkutan dan komunikasi, jasa keuangan, jasa pemerintahan serta jasa swasta.

Nilai tambah sektor pertanian untuk masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dan bagaimana perubahan nilai tambah sektor pertanian terhadap masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2000-2006 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.15. di lampiran.

Dari tabel 3.15. terlihat untuk daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor pertanian menyumbang nilai tambah bervariasi diantara 434,12 – 790,99 milyar rupiah. Nilai tambah sektor pertanian meningkat dari (2000-2006) untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan untuk daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor pertanian menyumbang nilai tambah lebih rendah dibandingkan daerah

Kabupaten diantara 21,38 – 370,87 milyar rupiah. Nilai tambah sektor pertanian juga meningkat untuk Kota di Provinsi Sumatera Barat (2000-2006).

Untuk sektor pertanian, kontribusi nilai tambah sektor pertanian kepada masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dan bagaimana perubahan kontribusi nilai tambah sektor pertanian terhadap masing–masing PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2000-2006 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.16. di lampiran.

Dari tabel 3.16. terlihat untuk daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor pertanian menyumbang kontribusi nilai tambah cukup besar pada PDRB diantara 31,22%- 40,78%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, kegiatan perekonomian lebih banyak bergerak di sektor pertanian. Kontribusi nilai tambah sektor pertanian terhadap PDRB untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat sesudah tahun 2000 cenderung naik turun. Namun demikian, untuk Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat, kontribusi nilai tambah sektor pertanian terhadap PDRB malah meningkat mencapai 42%. Kenyataan ini disebabkan Kabupaten Solok merupakan daerah yang cocok untuk kegiatan sektor pertanian sehingga jumlah produksi kegiatan pertanian semakin meningkat yang berdampak pada kontribusi nilai tambah sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Solok.

Sedangkan untuk daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor pertanian menyumbang kontribusi nilai tambah lebih rendah dibandingkan daerah Kabupaten diantara 4,87% - 11,90%. Untuk daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat, kegiatan perekonomian lebih banyak dilakukan diluar sektor pertanian karena keterbatasan lahan maupun kesempatan untuk kegiatan sektor jasa yang lebih terbuka. Kontribusi nilai tambah sektor pertanian terhadap PDRB untuk Kota di Provinsi Sumatera Barat bervariasi naik dan turun sesudah tahun 2000. Untuk beberapa Kota di Provinsi Sumatera Barat, kontribusi nilai tambah sektor pertanian cenderung menaik seperti Kota Sawahlunto sesudah tahun 2000 hingga mencapai 7,16% tahun 2006.

Hal ini disebabkan kegiatan sektor pertanian menjadi pilihan setelah berkurangnya kesempatan usaha di sektor pertambangan. Namun demikian, ada kota di Provinsi Sumatera Barat, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB malah menurun seperti Kota Bukittinggi mencapai 2,6 % tahun 2006. Dengan

demikian, penurunan kontribusi nilai tambah sektor pertanian didorong oleh kegiatan sektor jasa perdagangan yang semakin meningkat. Walaupun nilai tambah sektor pertanian untuk Kabupaten/Kota meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi kontribusi nilai tambah sektor pertanian terhadap PDRB ada yang semakin menurun pada beberapa Kabupaten/Kota.

Untuk mendapatkan kondisi riil di lapangan, kita melihat kondisi sektor pertanian untuk Kabupaten Pasaman.

Kabupaten Pasaman sebagai salah satu daerah agraris di Sumatera Barat. Pada tahun 2007 mampu memproduksi padi sawah sekitar 228.270 ton. Nilai ini jika dibandingkan produksi tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar 17,82 persen, dimana pada tahun 2006 total produksi padi sawah tercatat sebesar 193.742 ton. Dari informasi yang ada bahwa meningkatnya produksi padi sawah pada tahun ini adalah karena terjadinya peningkatan luas panen sekitar 5,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika diperhatikan potensi masing-masing kecamatan di Kab. Pasaman dalam kapasitasnya terhadap luas panen dan produksi padi sawah ini, sekitar 50 persen dari total produksi Kab. Pasaman di dominasi oleh 4 (empat) kecamatan dari 12 kecamatan yang ada. Kecamatan dimaksud adalah Kec. Panti, Padang Gelugur, Lubuk Sikaping dan Kec. Tigo Nagari.

Disamping komoditi padi sawah, karena hampir semua kecamatan di Kab. Pasaman dikelilingi oleh daerah perbukitan, hal ini juga membuat masyarakat Pasaman tidak terbatas hanya pada pemanfaatan lahan sawah saja, sehingga ladangpun merupakan harapan untuk ditanami padi gogo (padi ladang). Hal ini dapat dilihat dari hasil produksi padi ladang pada tahun 2007 ini tercatat sebesar 4.753 ton dengan luas panen 1.802 Ha, dan sekitar 46,39 persen produksinya terdapat di Kec. Mapat Tunggul.

Untuk jenis komoditi jagung, ubi ayu dan kacang tanah merupakan tanaman yang diminati oleh seluruh kecamatan yang ada di Kab. Pasaman. Pada tahun 2007 ini, disamping diminati tanaman tersebut diperkirakan cocok dengan kondisi tanah dan iklim wilayah tersebut. Berbeda halnya dengan komoditi ubi jalar, kacang kedelai dan kacang hijau.

Produksi komoditi jagung pada tahun 2007 tercatat 4.083 ton dengan luas

panen 999 Ha atau rata-rata produksi 4,09 ton/ha dengan produksi terbesar terdapat di Kec. Tigo Nagari sekitar 1.727 ton dan Kec. Panti tercatat sebanyak 705 ton.

Ubi kayu dengan luas panen sekitar 208 Ha menghasilkan sekitar 2.534 on, atau rata-rata produksi 12,18 ton/ha. Ubi jalar total produksinya 776 ton dengan luas tanam 95 Ha, kacang tanah produksinya 710 ton dengan luas panen 586 Ha dan kacang kedelai produksinya 141 ton dengan luas panen 120 ha serta komoditi kacang hijau dengan total produksi tercatat 119 ton dan luas panen 111 Ha, atau rata-rata produksi kacang hijau 1,07 ton/ha.

Jenis tanaman perkebunan terluas yang tercatat adalah tanaman karet seluas 24.641 Ha dengan produksi 14.903,20 ton. Jika dilihat per kecamatan, tanaman karet merupakan tanaman perkebunan potensial di Kecamatan Mapat Tunggul.

Area hutan menurut jenis peruntukan tercatat seluas 386.328,181 ha terdiri dari cagar alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversikan serta areal penggunaan lainnya. Dari 6 jenis hutan tersebut yang terluas adalah hutan lindung yaitu 232.606,249 Ha.

Data yang disajikan disini meliputi ternak besar (kuda, sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba) serta unggas (ayam ras, ayam buras dan itik). Populasi ternak besar dan kecil menurut jenis ternak kambing merupakan jumlah ternak terbanyak, yaitu tercatat 6.520 ekor. Sedangkan populasi unggas jenis ayam kampung tercatat sebanyak 221.295 ekor, itik 102.904 ekor, ayam ras pedaging 45.300 ekor, dan ayam ras petelur 16.100 ekor.

Luasnya areal pemeliharaan ikan di kolam, sawah dan perairan umum seperti sungai, danau, rawa dan telaga. Kabupaten Pasaman merupakan salah satu produsen ikan air tawar yang terbesar di Sumatera Barat. Pada tahun 2007 ini luas kolam di Kabupaten Pasaman adalah seluas 2.106 Ha. Hampir 44,50 persen atau 937,2 Ha berada di Kecamatan Rao Selatan yang merupakan area kolam terluas dibandingkan kecamatan lainnya (“Profil Ekonomi” para.1-10).

Nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian untuk masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dan bagaimana perubahan nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian terhadap masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2000-2006 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.17. di lampiran.

Dari tabel 3.17. terlihat untuk daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang nilai tambah bervariasi diantara 19,5 – 166,39 milyar rupiah. Nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian naik turun dari (2000-2006) untuk beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan untuk daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang nilai tambah diantara 0,23 – 160,19 milyar rupiah. Nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian juga naik dan turun untuk beberapa Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun (2000-2006).

Untuk sektor pertambangan dan penggalian, kontribusi nilai tambah kepada masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dan bagaimana perubahan kontribusi nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian terhadap masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 1996-2006 dapat dilihat pada tabel 3.18. di lampiran.

Dari tabel 3.18. terlihat untuk daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang nilai tambah pada PDRB diantara 1,49% - 11,3%. Kontribusi nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat naik dan turun diantara Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat sesudah tahun 2000. Hal ini disebabkan kegiatan sektor pertambangan dan penggalian sangat tergantung akan ketersediaan sumber daya alam.

Sedangkan untuk daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang nilai tambah pada PDRB diantara 0,039 – 36,54%. Nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian cukup besar terhadap PDRB untuk Kota Sawahlunto mencapai 36,54%. Hal ini menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian cukup dominan dalam kegiatan perekonomian di Kota Sawahlunto karena didukung oleh sumber daya alam yang tersedia berupa mineral batubara.

Namun demikian, kontribusi nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB untuk Kota Bukittinggi cukup rendah hanya sekitar 0,039%. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya mineral yang tersedia. Kontribusi nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB

cenderung menurun sesudah tahun 2000 untuk Kota Sawahlunto maupun Kota lain di Provinsi Sumatera Barat.

Yang menjadi penyebab adalah kegiatan penambangan semakin menurun. Disisi lain, sumber daya alam yang sudah ditemukan belum mendapat izin penambangan maupun belum adanya investor yang tertarik.

70% dari seluruh daerah di Sumatera Barat didominasi oleh bagian bentangan pegunungan bukit barisan. Mengingat bukit barisan merupakan jenis lempengan tektonik maka sudah dapat diperkirakan bumi Sumatera Barat kaya akan sumber mineral batuan. Salah satu indikasinya adalah adanya pabrik Semen Padang di Sumatera Barat, yang menunjukkan bahwa adanya sumber batuan kapur. Beberapa daerah yang terkenal dengan hasil pertambangan tembaga, timah, dan peraknya adalah area Sawahlunto dan Kabupaten Tanah Datar. Tanah Datar pada tahun 2005 berhasil membukukan nilai produksi batuan kapur sebesar Rp.123 juta hanya untuk satu Kabupaten.

Sawahlunto pernah menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat dengan spesifikasi batu bara. Kondisi topografi Sawahlunto yang terdiri dari perbukitan yang terjal mendukung untuk dikembangkannya areal pertambangan batu bara. Dari seluruh penggunaan tanah di Sawahlunto, sebenarnya areal pertambangan hanya memanfaatkan sebesar 3.25% dan terluas adalah penggunaan untuk pertanian. Namun, dengan areal yang sedikit tersebut mampu memiliki cadangan yang siap diproduksi sebesar 53.176 juta ton batu bara, yang dihasilkan dari empat blok pertambangan, telah melampaui kebutuhan domestik Sumatera Barat sendiri yang berkisar pada angka 1.3 juta ton/tahun.

Kondisi ini memberikan implikasi masih kurangnya investasi di bidang pertambangan di Sawahlunto untuk meningkatkan hasil produksi batu baranya. Data BPS menunjukkan rata-rata nilai produksi batu bara Sumatera Barat mencapai nilai 212 milyar rupiah, dengan kondisi masih jauh dibawah potensial daerah. Oleh karena itu, masih besar potensi pertambangan yang harus dieksplorasi di Sumatera Barat (“Potensi Sektor” para.7-9).

Nilai tambah sektor industri dan pengolahan untuk masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dan bagaimana perubahan nilai tambah sektor industri dan pengolahan terhadap masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2000-

2006 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.19. di lampiran.

Dari tabel 3.19. terlihat untuk daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor industri dan pengolahan menyumbang nilai tambah bervariasi diantara 90,31 – 414,78 milyar rupiah. Nilai tambah sektor industri dan pengolahan naik dari (2000-2006) untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan untuk daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor industri dan pengolahan memberikan nilai tambah diantara 31,00 – 1.278,97 milyar rupiah. Nilai tambah sektor industri dan pengolahan juga meningkat untuk Kota di Provinsi Sumatera Barat (2000-2006).

Untuk sektor industri dan pengolahan, kontribusi nilai tambah untuk masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dan bagaimana perubahan kontribusi nilai tambah sektor industri dan pengolahan terhadap masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2000-2006 dapat dilihat pada tabel 3.20. di lampiran.

Pada daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor industri dan pengolahan menyumbang kontribusi nilai tambah pada PDRB diantara 6,13% - 15,42%. Kontribusi sektor industri dan pengolahan cukup besar terhadap PDRB untuk Kabupaten Agam dibandingkan Kabupaten lain di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini disebabkan banyaknya industri rumah tangga yang menghasilkan produksi makanan olahan, serta perlengkapan pakaian. Kontribusi sektor industri dan pengolahan terhadap PDRB untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat cenderung menurun sesudah tahun 2000.

Sedangkan daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2000, sektor industri dan pengolahan menyumbang kontribusi nilai tambah pada PDRB diantara 6,63% - 18,10%. Kontribusi sektor industri dan pengolahan cukup besar terhadap PDRB untuk Kota Padang dibandingkan Kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Faktor pendorong adalah kota Padang sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat, dimana fasilitas-fasilitas penunjang sektor industri dan pengolahan seperti infrastruktur dan pelabuhan yang cukup tersedia dibandingkan kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Kontribusi sektor industri dan pengolahan terhadap PDRB untuk Kota di Provinsi Sumatera Barat cenderung naik turun sesudah tahun 2000. Namun untuk Kota Sawahlunto, kontribusi sektor industri dan pengolahan terhadap PDRB naik mencapai 13% tahun 2006 dibandingkan

10,44% tahun 2000. Hal ini disebabkan penurunan peran sektor pertambangan dan penggalian yang beralih ke sektor industri dan pengolahan.

Kita dapat melihat kondisi di lapangan menyangkut sektor industri dan pengolahan dengan melihat kegiatan sektor industri dan pengolahan di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.

Industri kecil dan rumah tangga di Kabupaten Sijunjung masih mendominasi dunia usaha dibidang industri, tahun 2004 tercatat 148 unit usaha industri kecil dan rumah tangga sebanyak 141 unit dengan total investasi 5.05 milyar yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 707 orang.

Dari jumlah tersebut sebanyak 73 unit atau sekitar 49,32 persen bergerak dalam usaha industri hasil pertanian dan kehutanan, sedangkan yang bergerak dalam industri aneka hanya tercatat sebanyak 14 unit atau hanya 9,45 persen dari total industri kecil dan rumah tangga. Kegiatan industri kecil terbanyak adalah industri hasil pertanian.

Jumlah investasi terbesar terdapat pada usaha industri hasil pertanian yang tercatat sebesar 81 persen, sedangkan yang berada pada industri aneka hanya 3,3 persen (“Industri dan Perdagangan” para.1-3).

Nilai tambah sektor listrik, gas dan air bersih untuk masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dan bagaimana perubahan nilai tambah sektor listrik, gas dan air bersih terhadap masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2000-2006 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.21. di lampiran.

Dari tabel 3.21. terlihat untuk daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor listrik, gas dan air bersih memberikan nilai tambah bervariasi diantara 4,17 – 22,43 milyar rupiah. Nilai tambah sektor listrik, gas dan air bersih naik dari (2000-2006) untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan untuk daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor listrik, gas dan air bersih memberikan nilai tambah diantara 1,81 – 106,16 milyar rupiah. Nilai tambah sektor listrik, gas dan air bersih juga meningkat untuk Kota di Provinsi Sumatera Barat (2000-2006).

Untuk sektor listrik, gas dan air bersih, kontribusi nilai tambah untuk masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dan bagaimana perubahan kontribusi nilai

tambah sektor listrik, gas dan air bersih terhadap masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2000-2006 dapat dilihat pada tabel 3.22. di lampiran.

Dari tabel 3.22. terlihat untuk daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor listrik, gas dan air bersih menyumbang kontribusi pada PDRB diantara 0,21% - 0,983%. Hal ini menunjukkan sektor ini tidak menyumbang kontribusi yang besar pada PDRB karena penduduk lebih banyak menggunakan sumber air yang tersedia di daerahnya. Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat cenderung naik sesudah tahun 2000.

Sedangkan untuk daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor listrik, gas dan air bersih menyumbang kontribusi pada PDRB diantara 0,41% - 2,38%. Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB untuk Kota di Provinsi Sumatera Barat cenderung naik sesudah tahun 2000.

Nilai tambah sektor bangunan untuk masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dan bagaimana perubahan nilai tambah sektor bangunan terhadap masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2000-2006 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.23. di lampiran.

Dari tabel 3.23. untuk daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor bangunan memberikan nilai tambah bervariasi diantara 43,37 – 143,89 milyar rupiah. Nilai tambah sektor bangunan naik dari (2000-2006) untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan untuk daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor bangunan memberikan nilai tambah diantara 16,55 – 294,38 milyar rupiah. Nilai tambah sektor bangunan juga meningkat untuk Kota di Provinsi Sumatera Barat (2000-2006).

Untuk sektor bangunan, kontribusi nilai tambah terhadap masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dan bagaimana perubahan kontribusi nilai tambah sektor bangunan terhadap masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2000-2006 dapat dilihat pada tabel 3.24. di lampiran.

Dari tabel 3.24. terlihat untuk daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor bangunan menyumbang kontribusi nilai tambah pada PDRB

diantara 2,59% - 9,77%. Kontribusi sektor bangunan terhadap PDRB untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat cenderung naik turun sesudah tahun 2000.

Sedangkan untuk daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor bangunan menyumbang kontribusi pada PDRB diantara 4,08% - 12,93%. Kontribusi sektor bangunan terhadap PDRB untuk Kota di Provinsi Sumatera Barat cenderung bervariasi naik turun sesudah tahun 2000.

Nilai tambah sektor perdagangan dan hotel & restoran untuk masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dan bagaimana perubahan nilai tambah sektor perdagangan dan hotel & restoran terhadap masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2000-2006 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.25. di lampiran.

Dari tabel 3.25. untuk daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor perdagangan dan hotel & restoran memberikan nilai tambah bervariasi diantara 188,81 – 506,21 milyar rupiah. Nilai tambah sektor perdagangan dan hotel & restoran naik dari (2000-2006) untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan untuk daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor perdagangan dan hotel & restoran memberikan nilai tambah diantara 33,42 – 1.580,23 milyar rupiah. Nilai tambah sektor perdagangan dan hotel & restoran juga meningkat untuk Kota di Provinsi Sumatera Barat (2000-2006).

Untuk sektor perdagangan dan hotel & restoran, kontribusi nilai tambah untuk masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dan bagaimana perubahan kontribusi sektor perdagangan dan hotel & restoran terhadap masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2000-2006 dapat dilihat pada tabel 3.26. di lampiran.

Dari tabel 3.26. untuk daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor perdagangan dan hotel & restoran menyumbang kontribusi nilai tambah pada PDRB diantara 12,08% - 22,37%. Kontribusi sektor perdagangan dan hotel & restoran terhadap PDRB untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat cenderung naik turun sesudah tahun 2000.

Sedangkan untuk daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sek-

tor perdagangan dan hotel & restoran menyumbang kontribusi pada PDRB diantara 9,82% - 22,36%. Kontribusi nilai tambah sektor perdagangan dan hotel & restoran terhadap PDRB untuk Kota di Provinsi Sumatera Barat cenderung naik turun sesudah tahun 2000.

Untuk mendapatkan gambaran kondisi sektor perdagangan, kita melihat bagaimana kondisi sektor perdagangan di Kota Bukittinggi.

Posisi strategis yang dimiliki Kota Bukittinggi secara ilmiah sangat membuka peluang untuk tumbuh sebagai kota utama di Sumatera Barat, ditambah lagi dengan masuknya IMT-GT dan IMS-GT dimana untuk hubungan darat Bukittinggi dengan segala pertumbuhan yang telah dimiliki saat ini membuka peluang untuk menjadi gerbang utama Sumatera Barat untuk segitiga pertumbuhan tersebut.

Disamping itu juga di Bukittinggi terdapat 4 pusat pasar yaitu Pasar Atas, Pasar Bawah, Pasar Aur, dan Pasar Banto yang berperan dalam perdagangan barang dan jasa berskala regional. Bagi jasa perdagangan skala kecil/eceran, berperan sebagai pusat perdagangan untuk wilayah Sumatera Barat bagian utama, untuk jasa perdagangan berskala menengah dan besar melayani antar provinsi di Sumatera Barat dan Jawa (“Bidang Perdagangan” para.1-2).

Nilai tambah sektor pengangkutan dan komunikasi untuk masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dan bagaimana perubahan nilai tambah sektor pengangkutan dan komunikasi terhadap masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2000-2006 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.27. di lampiran.

Dari tabel 3.27. untuk daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan nilai tambah bervariasi diantara 34,65 – 145,71 milyar rupiah. Nilai tambah sektor pengangkutan dan komunikasi naik dari (2000-2006) untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan untuk daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan nilai tambah diantara 36,19 – 1.586,32 milyar rupiah. Nilai tambah sektor pengangkutan dan komunikasi juga meningkat untuk Kota di Provinsi Sumatera Barat (2000-2006).

Untuk sektor pengangkutan dan komunikasi, kontribusi nilai tambah untuk masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dan bagaimana perubahan kontribusi

sektor pengangkutan dan komunikasi terhadap masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2000-2006 dapat dilihat pada tabel 3.28. di lampiran.

Dari tabel 3.28. terlihat untuk daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor pengangkutan dan komunikasi menyumbang kontribusi nilai tambah pada PDRB diantara 2,63% - 8,843%. Kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi terhadap PDRB untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat cenderung bervariasi naik turun sesudah tahun 2000.

Sedangkan untuk daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor pengangkutan dan komunikasi menyumbang kontribusi pada PDRB diantara 8,2% - 22,52%. Kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi terhadap PDRB untuk Kota di Provinsi Sumatera Barat cenderung bervariasi naik turun sesudah tahun 2000.

Untuk melihat kondisi sektor pengangkutan, kita melihat bagaimana perkembangan sektor pengangkutan di Kota Padang.

Jumlah angkutan umum pada tahun 2003 mengalami peningkatan kecuali pada jenis Bemo dan Oplet. Jumlah mikrolet pada tahun 2003 adalah sebanyak 1.756 buah, bus kota sebanyak 423 buah dan taksi sebanyak 621 buah.

Untuk angkutan udara, peningkatan tahun 2003 mengalami yang sangat signifikan. Pada tahun 2003 jumlah keberangkatan adalah 5.009 kali dan kedatangan 5.003 kali, yang dilayani oleh kurang lebih 9 maskapai penerbangan, sedangkan tahun 2002 hanya sebanyak 3.200 untuk keberangkatan dan 3.200 kali untuk kedatangan.

Pada angkutan laut terjadi penurunan aktifitas, ini terlihat dari jumlah berat kapal yang bersandar di pelabuhan teluk bayur, pada tahun 2003 hanya 323.634 ton, sedangkan pada tahun 2002 sebesar 1.181.374 ton (“Sarana dan Prasarana” para.3-5).

Nilai tambah sektor keuangan untuk masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dan bagaimana perubahan nilai tambah sektor keuangan terhadap masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2000-2006 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.29. di lampiran.

Dari tabel 3.29. untuk daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor keuangan memberikan nilai tambah bervariasi diantara 36,65 – 77,61

milyar rupiah. Nilai tambah sektor keuangan naik dari (2000-2006) untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan untuk daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor keuangan memberikan nilai tambah diantara 21,73 – 516,61 milyar rupiah. Nilai tambah sektor keuangan juga meningkat untuk Kota di Provinsi Sumatera Barat (2000-2006).

Untuk sektor keuangan, kontribusi nilai tambah untuk masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dan bagaimana perubahan kontribusi nilai tambah sektor keuangan terhadap masing–masing PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2000-2006 dapat dilihat pada tabel 3.30. di lampiran.

Dari tabel 3.30. untuk daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor keuangan menyumbang kontribusi pada PDRB diantara 2,22% - 4,64%. Kontribusi sektor keuangan terhadap PDRB untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat cenderung bervariasi naik turun sesudah tahun 2000.

Sedangkan untuk daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor keuangan menyumbang kontribusi pada PDRB diantara 4,28% - 9,91%. Kontribusi sektor keuangan terhadap PDRB untuk Kota di Provinsi Sumatera Barat cenderung bervariasi naik turun sesudah tahun 2000.

Nilai tambah sektor jasa pemerintahan untuk masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dan bagaimana perubahan nilai tambah sektor jasa pemerintahan terhadap masing–masing PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2000-2006 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.31. di lampiran.

Dari tabel 3.31. untuk daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor jasa pemerintahan memberikan nilai tambah bervariasi diantara 188.42 – 330.36 milyar rupiah. Nilai tambah sektor jasa pemerintahan naik dari (2000-2006) untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan untuk daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor jasa pemerintahan memberikan nilai tambah diantara 45.14 – 637.55 milyar rupiah. Nilai tambah sektor jasa pemerintahan juga meningkat untuk Kota di Provinsi Sumatera Barat (2000-2006).

Untuk sektor jasa pemerintahan, kontribusi nilai tambah untuk masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dan bagaimana perubahan kontribusi nilai tambah

sektor jasa pemerintahan terhadap masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2000-2006 dapat dilihat pada tabel 3.32. di lampiran.

Dari tabel 3.32. terlihat untuk daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor jasa pemerintahan menyumbang kontribusi pada PDRB diantara 11,43% - 17,52%. Kontribusi sektor jasa pemerintahan terhadap PDRB untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat cenderung bervariasi naik turun sesudah tahun 2000.

Sedangkan untuk daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor jasa pemerintahan menyumbang kontribusi pada PDRB diantara 9,02% - 17,06%. Kontribusi sektor jasa pemerintahan terhadap PDRB untuk Kota di Provinsi Sumatera Barat cenderung bervariasi naik turun sesudah tahun 2000.

Nilai tambah sektor jasa swasta untuk masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dan bagaimana perubahan nilai tambah sektor jasa swasta terhadap masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2000-2006 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.33. di lampiran.

Dari tabel 3.33. untuk daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor jasa swasta memberikan nilai tambah bervariasi diantara 38,56 – 80,60 milyar rupiah. Nilai tambah sektor jasa swasta naik dari (2000-2006) untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan untuk daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor jasa swasta memberikan nilai tambah diantara 19,68 – 575,70 milyar rupiah. Nilai tambah sektor jasa swasta juga meningkat untuk Kota di Provinsi Sumatera Barat (2000-2006).

Untuk sektor jasa swasta, kontribusi nilai tambah untuk masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dan bagaimana perubahan kontribusi nilai tambah sektor jasa swasta terhadap masing-masing PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2000-2006 dapat dilihat pada tabel 3.34. di lampiran.

Dari tabel 3.34.. terlihat untuk daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, sektor jasa swasta menyumbang kontribusi pada PDRB diantara 1,66% - 5,14%. Kontribusi sektor jasa swasta terhadap PDRB untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat cenderung bervariasi naik turun sesudah tahun 2000.

Sedangkan untuk daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000,

sektor jasa swasta menyumbang kontribusi pada PDRB diantara 8,00% - 12,72%. Kontribusi sektor jasa swasta terhadap PDRB untuk Kota di Provinsi Sumatera Barat cenderung bervariasi naik turun sesudah tahun 2000.

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kegiatan sektor jasa swasta, kita melihat pada sektor kesehatan di kota Padang panjang.

Jaringan pelayanan kesehatan di Kota Padang Panjang tersebar di dua kecamatan yang ada. Kota Padang Panjang mempunyai dua buah Rumah Sakit. Satu buah Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah berskala Internasional dan satu lagi Rumah Sakit Islam milik Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI Yarsi).

Rumah Sakit Umum Kota Padang Panjang yang siap sedia 24 jam ini selain menyediakan pelayanan pengobatan terhadap berbagai penyakit umum juga berkonsentrasi pada penanganan terhadap segala jenis pengobatan penyakit dan gangguan alat pernafasan. RSUD Padang Panjang hadir dengan fasilitas, sarana dan prasarana serta tenaga medis yang hampir sama dengan Rumah Sakit Mahkota Medical Center di Malaysia.

Selain Rumah Sakit Umum, Pemerintah Kota Padang Panjang juga menyediakan dua Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan tujuh Puskesmas Pembantu yang tersebar merata di kedua Kecamatan yang ada. Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan meliputi klinik bayi, kesehatan ibu, bantuan untuk orang yang cacat, serta rujuk ke Dokter Spesialis.

RSI Yarsi adalah sebuah Rumah Sakit Swasta yang dilengkapi prasarana tempat tidur sebanyak 50 buah. Rumah Sakit ini melayani perawatan bedah, ibu hamil, paediatric dan perawatan medis, dan lain-lain Rumah ("Rumah Sakit" para.1-3).

Stabilitas harga di Provinsi Sumatera Barat untuk masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2000-2006 dapat dilihat dari tingkat inflasi yang terjadi pertahun di masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana terlihat pada tabel 3.2.

Inflasi yang terjadi di masing-masing Kabupaten/Kota tahun 2000 berkisar antara 4,07% - 6,59%. Inflasi tertinggi tahun 2000 terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, disisi lain inflasi terendah di tahun 2000 terjadi di Kota Padang Panjang.

Untuk Kabupaten di Sumatera Barat, inflasi berkisar antara 4,12% - 6,59%.

Inflasi tertinggi di tahun 2000 terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun demikian, inflasi yang terendah tahun 2000 di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 3.2.
Tingkat Inflasi
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2000-2006

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	5.1	7.83	8.51	5.69	5.85	10.98	9.43
Kab. Lima Puluh Kota	6.59	8.09	7.43	5.91	6.58	10.59	11.68
Kab. Padang Pariaman	6.08	8.67	8.95	6.22	6.3	14.26	10.46
Kab. Pasaman	4.5	8.12	8.62	6.38	7.29	13.37	10.88
Kab. Pesisir Selatan	5.78	6.25	6.06	5.61	5.67	11.26	10.89
Kab. Sawahlunto Sijunjung	4.68	8.97	8.18	6.73	6.65	12.51	11.21
Kab. Solok	5.84	8.4	9.11	5.63	6.87	12.9	10.75
Kab. Tanah Datar	4.12	8.08	8.28	5.74	6.15	11.25	11.89
Kota Bukittinggi	5.21	8.44	6.95	5.07	4.98	11.39	9.96
Kota Padang	5.29	9.32	9.48	5.44	5.4	9.48	9.67
Kota Padang Panjang	4.07	8.33	9.15	6.11	6.54	12.57	10.54
Kota Payakumbuh	4.23	7.91	9.11	4.93	7.54	11.19	12.05
Kota Sawahlunto	6.3	8.21	7.61	6.3	5.6	6.59	8.22
Kota Solok	4.75	8.59	8.8	5.11	6.51	10.17	10.79

Sumber: BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2006" dan "Sumatera Barat dalam Angka Tahun 1996-2006" dan "telah diolah kembali".

Sedangkan untuk Kota di Sumatera Barat, inflasi berkisar antara 4,07% - 6,3%. Inflasi tertinggi di tahun 2000 terjadi di Kota Sawahlunto. Untuk inflasi yang terendah tahun 2000 di Kota Padang Panjang.

Secara umum tingkat inflasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat menurun tahun 2000, kemudian meningkat di tahun 2001 dan 2002. Di tahun 2003 dan 2004, tingkat inflasi kembali mengalami penurunan dan kecenderungan menaik di tahun 2005 dan 2006.

Tingkat pengangguran pada tahun 2004-2006 di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari besarnya angkatan kerja yang menganggur sebagaimana terlihat dari tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2004-2006

Kabupaten/Kota	2004		2005		2006	
	Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran(%)	Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran(%)	Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran(%)
Kab. Agam	181,490	8.16	184,286	11.14	190,719	7.73
Kab. Lima Puluh Kota	141,405	8.51	156,464	5.09	149,443	6.51
Kab. Padang Pariaman	204,331	10.99	205,767	13.59	211,741	12.28
Kab. Pasaman	262,153	8.86	239,740	11.2	267,077	8.86
Kab. Pesisir Selatan	174,559	18.9	182,406	17.7	187,879	20.69
Kab. Sawahlunto Sijunjung	149,865	8.93	159,503	6.57	162,330	7.66
Kab. Solok	207,747	13.22	211,736	6.98	220,523	8.2
Kab. Tanah Datar	135,989	12.28	153,263	7.75	149,587	10.4
Kota Bukittinggi	45,766	11.1	44,688	11.84	49,562	11.65
Kota Padang	299,640	20.99	316,697	18.09	343,856	19.23
Kota Padang Panjang	18,903	9.53	18,756	10.92	22,303	10.33
Kota Payakumbuh	49,274	9.79	45,217	7.74	48,405	10.65
Kota Sawahlunto	22,953	12.22	22,418	10.45	24,938	10.51
Kota Solok	22,794	16.43	22,391	12.01	23,436	10.43

Sumber: BPS Sumatera Barat "Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2004-2006" dan "telah diolah kembali".

Tabel tersebut hanya menyajikan angkatan kerja dan tingkat pengangguran untuk tahun 2004-2006 disebabkan oleh data yang tersedia hanya untuk tahun tersebut.

Tingkat pengangguran untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2004 berkisar antara 8,16% - 18,9%. Tingkat pengangguran yang terendah pada Kabupaten Agam dan tingkat pengangguran yang tertinggi pada Kabupaten Pesisir Selatan.

Tingkat pengangguran untuk Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2004 berkisar antara 9,53% - 20,99%. Tingkat pengangguran yang terendah pada Kota Padang Panjang dan tingkat pengangguran yang tertinggi pada Kota Padang. Tingkat pengangguran masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat bervariasi setelah tahun 2004.

3.2. Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Kondisi keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, pada sisi penerimaan daerah meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya sumber penerimaan yang tersedia baik dari sumber penerimaan daerah sendiri maupun yang berasal dari pemerintah pusat.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan terdiri dari :

- a) Bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumberdaya alam
- b) Dana Alokasi Umum
- c) Dana Alokasi Khusus

Dana perimbangan yang terealisasi pada APBD Propinsi Sumatera Barat tahun 2001 sebesar Rp. 263,570 milyar (56,3% dari total pendapatan daerah) dan untuk tahun 2002 adalah Rp.269.752 (48,0% dari total pendapatan daerah). Untuk tahun 2002 dari realisasi dana perimbangan ini terdiri dari : bagi hasil pajak sebesar Rp. 37,325 milyar, bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 4,746 milyar, dana alokasi umum sebesar Rp. 193.519 milyar dan penyeimbang sebesar Rp. 34,160 milyar.

Terjadi peningkatan penerimaan bagian dana perimbangan tahun 2001 dan tahun 2002 sekitar sebesar Rp. 6,182 milyar (2,3%). Pada bagi hasil pajak terjadi peningkatan Rp. 9,598 milyar (34,6%), pada bagi hasil bukan pajak terjadi penurunan Rp. 1,415 milyar (23,0%)., begitu juga pada dana alokasi umum terjadi penurunan sebesar Rp. 34,163 milyar (15,0%). Bagian dana darurat untuk tahun 2002 tidak ada tapi ada dana penyeimbangan sebesar Rp. 34,160 milyar.

Bagian dari bagi hasil pajak pada tahun 2002 berasal dari : pajak bumi dan bangunan sebesar Rp, 16,906 milyar, bea atas perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp. 1,120 milyar, bagi hasil pajak penghasilan sebesar Rp. 18,377 milyar, biaya pemungutan PBB Rp. 921 juta. Bagi hasil bukan pajak berasal dari provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp. 1,381 milyar,

pemberian hak atas tanah negara sebesar Rp. 173 juta, iuran kuasa usaha pertambangan (IKP) sebesar Rp. 3.177 milyar.

Pada realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) pada kabupaten/kota terjadi peningkatan dari tahun 2001 yang sebesar Rp 80,010 milyar menjadi Rp. 105,123 milyar pada tahun 2002 atau terjadi peningkatan penerimaan PBB sebesar Rp. 25,113 milyar (31,4%). Penyumbang PBB terbesar pada tahun 2002 dari kabupaten/kota adalah kota Padang sebesar Rp. 12,678 milyar, diikuti oleh kabupaten Pasaman sebesar Rp. 10,958 milyar, kabupaten Sawahlunto Sijunjung sebesar Rp. 9,684 milyar, kabupaten Solok sebesar Rp. 9,092 milyar (“Perimbangan Keuangan” para.1-5).

Tabel 3.4.

Pendapatan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2000-2006 (dalam jutaan rupiah)

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	73,273.53	181,044.14	228,696.88	276,075.34	281,833.62	291,426.50	459,931.85
Kab. Lima Puluh Kota	66,594.44	135,021.83	167,311.21	218,079.07	265,788.66	257,351.21	509,429.87
Kab. Padang Pariaman	81,428.73	240,272.78	350,876.76	475,207.50	554,982.97	635,138.42	933,351.64
Kab. Pasaman	80,010.57	206,736.86	242,547.04	306,595.95	308,972.52	350,145.71	707,824.80
Kab. Pesisir Selatan	74,544.74	163,895.02	194,688.33	255,971.29	280,585.14	285,728.72	463,949.70
Kab. Sawahlunto Sijunjung	78,938.19	153,408.75	219,999.89	327,665.68	284,372.37	301,094.14	591,578.08
Kab. Solok	75,163.50	199,609.79	230,266.64	293,374.51	318,989.20	304,768.26	601,848.31
Kab. Tanah Datar	63,482.39	140,682.35	222,695.01	265,097.27	246,449.96	265,203.54	435,100.38
Kota Bukittinggi	36,154.01	83,812.18	119,041.26	162,109.37	182,192.76	179,895.75	271,624.87
Kota Padang	145,534.68	278,579.85	330,834.59	399,857.77	448,173.17	500,672.00	710,983.68
Kota Padang Panjang	24,500.75	54,037.24	88,949.50	127,274.31	148,839.17	163,421.82	222,232.30
Kota Payakumbuh	35,772.29	90,478.58	130,677.57	181,954.50	192,308.93	199,502.33	275,677.85
Kota Sawahlunto	29,232.82	72,923.29	101,344.49	108,574.00	133,441.37	143,738.64	212,139.94
Kota Solok	24,600.76	56,952.21	92,993.12	137,706.42	132,702.41	148,644.44	314,611.64

Sumber : BPS " Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2000-2006"

Untuk mendapatkan gambaran pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah masing-masing Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, disajikan data dari tahun 2000-2006 pada tabel 3.4.

Pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat meningkat dari tahun ke tahun, baik yang berasal dari sumber penerimaan sendiri berupa pendapatan asli daerah maupun yang berasal dari pemerintah pusat seperti dana perimbangan.

Bagaimana proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000-2006 disajikan dalam persentase pada tabel 3.5.

Tabel 3.5.

Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap
Total Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	3.336	1.968	2.839	4.245	4.143	4.496	3.76
Kab. Lima Puluh Kota	2.07	2.031	3.368	5.851	3.818	4.319	3.295
Kab. Padang Pariaman	2.156	2.152	2.772	4.495	5.491	4.313	3.856
Kab. Pasaman	2.575	2.908	4.918	5.383	2.938	5.951	3.712
Kab. Pesisir Selatan	2.372	1.768	2.898	3.782	2.618	3.141	2.62
Kab. Sawahlunto Sijunjung	3.601	4.655	7.573	6.088	6.533	6.036	4.763
Kab. Solok	3.235	2.545	4.624	4.212	3.686	5.255	3.608
Kab. Tanah Datar	2.795	3.467	4.407	4.501	6.245	6.569	6.362
Kota Bukittinggi	12.172	10.039	10.255	9.426	9.914	15.349	8.982
Kota Padang	23.381	14.101	16.005	15.989	15.317	21.054	13.861
Kota Padang Panjang	4.7	4.334	4.923	5.271	5.599	4.312	4.207
Kota Payakumbuh	5.851	5.142	4.971	7.538	10.463	10.965	8.379
Kota Sawahlunto	3.53	3.225	5.102	7.769	7.389	9.184	7.721
Kota Solok	4.448	3.78	4.501	5.274	6.441	3.237	5.526

Sumber : BPS " Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2000-2006" dan telah diolah kembali"

Dari tabel 3.5, persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000 masih rendah yakni sekitar 2,07% -23%. Sedangkan untuk Kota Padang dan Kota

Bukittinggi, persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah cukup tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat yakni 23,38% dan 12,17%.

Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sesudah tahun 2000 bervariasi diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah sesudah tahun 2000. Kota di Provinsi Sumatera Barat yang mengalami kenaikan persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah seperti Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kota Sawahlunto.

Namun ada juga Kota di Provinsi Sumatera Barat yang mengalami penurunan persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah seperti Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang.

Dilihat dari sisi pengeluaran daerah juga meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya tuntutan pelayanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Apalagi dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam mengelola pengeluaran daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah masing-masing sehingga dituntut pengelolaan pengeluaran daerah yang transparan dan akuntabel.

Untuk mendapatkan gambaran Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, disajikan dari tahun 2003-2006 pada tabel 3.6.

Penyajian tahun 2003-2006, didasari oleh pengelompokan Belanja daerah kepada Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik dimulai sejak tahun 2003. Belanja Modal juga disajikan secara terpisah semenjak tahun 2003 dalam kelompok tersendiri.

Belanja Daerah juga meningkat dari tahun ke tahun baik untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (sebelum tahun 2003), maupun belanja Aparatur Daerah maupun belanja Pelayanan Publik (setelah tahun 2003). Perubahan yang mendasar terjadi setelah otonomi daerah, dimana pemerintah Kabupaten/Kota diberi keleluasaan dalam mengelola belanja daerah. Belanja yang

dimaksud adalah belanja daerah setelah dikurangi dengan belanja rutin untuk gaji pegawai. Penekanan disini adalah alokasi anggaran untuk berbagai kegiatan pemerintah Kabupaten/Kota dalam periode satu anggaran.

Tabel 3.6.

Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2003-2006(dalam jutaan rupiah)

Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	247,621.90	255,092.96	288,711.50	352,148.30
Kab. Lima Puluh Kota	212,575.40	234,789.67	234,228.09	338,564.85
Kab. Padang Pariaman	405,012.34	473,620.32	620,815.70	817,359.98
Kab. Pasaman	272,143.89	278,487.43	346,552.18	538,217.31
Kab. Pesisir Selatan	249,762.93	246,522.09	283,798.49	392,517.88
Kab. Sawahlunto Sijunjung	230,427.10	246,915.48	300,768.89	425,237.43
Kab. Solok	261,158.00	290,043.89	302,694.71	544,411.15
Kab. Tanah Datar	220,971.30	236,626.25	265,203.54	362,114.75
Kota Bukittinggi	135,956.75	159,292.32	173,462.85	224,543.72
Kota Padang	388,433.10	406,617.35	494,557.00	614,440.06
Kota Padang Panjang	107,947.21	110,197.75	153,741.32	170,959.85
Kota Payakumbuh	155,850.79	158,857.30	193,084.68	216,424.89
Kota Sawahlunto	107,735.36	117,975.71	137,238.64	191,842.04
Kota Solok	84,663.51	99,045.65	123,414.52	170,079.33

Sumber : BPS " Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2003-2006"

Untuk melihat seberapa besar proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2003-2006 disajikan dalam persentase pada tabel 3.7.

Persentase Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah bervariasi diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2003. Untuk tahun 2003, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai persentase Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah cukup tinggi berkisar antara 30,17% - 46,59% yakni Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang.

Sedangkan persentase Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah setelah

tahun 2003, bervariasi naik dan turun untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.7.

Persentase Belanja Modal Terhadap
Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2003-2006

Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	15.4	6.87	6.37	10.93
Kab. Lima Puluh Kota	25.67	22.77	12.54	29.21
Kab. Padang Pariaman	30.17	28.4	31.96	32.5
Kab. Pasaman	23.49	19.82	13.66	29.89
Kab. Pesisir Selatan	23.68	16.39	17.48	26.05
Kab. Sawahlunto Sijunjung	23.91	17.92	21.72	29.69
Kab. Solok	20.69	17.3	15.78	26.62
Kab. Tanah Datar	31.09	18.22	16.61	20.34
Kota Bukittinggi	28.09	21.85	20.13	26.69
Kota Padang	7.9	4.29	8.91	13.42
Kota Padang Panjang	35.09	22.47	32.18	36.42
Kota Payakumbuh	46.59	27.65	27	23.57
Kota Sawahlunto	44.86	21.74	22.61	28.31
Kota Solok	24.02	26.85	23.04	27.95

Sumber : BPS " Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2003-2006" dan "telah diolah kembali"

Analisis juga dapat dilakukan menyangkut ke sektor mana dan besarnya alokasi belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun (2000-2006). Alokasi belanja modal per sektor dinyatakan dalam persentase belanja sektor terhadap total belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dalam satu tahun. Pengelompokan belanja modal pemerintah per sektor dilakukan hingga tahun 2002.

Sesuai dengan lingkup penelitian ini, analisis belanja modal per sektor hanya dilakukan dari tahun 2000 hingga tahun 2002.

Alokasi belanja modal per sektor untuk Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2000-2002 dapat dilihat pada tabel 3.8. Dari tabel 3.8 untuk Kabupaten Agam sektor Transportasi, Metereologi & Geofisika mendapat

porsi yang paling besar untuk tahun 2000 sebesar 33,637%, tahun 2001 sebesar 51,436% dan tahun 2002 sebesar 26,663%.

Tabel 3.8.

Alokasi Belanja Modal Per Sektor
Pemerintah Kabupaten Agam dan Lima Puluh Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2002(%)

Sektor	Kab. Agam			Kab. Lima Puluh Kota		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
Industri	0.488	0.312	0.338	0.384	0.239	0.227
Pertanian dan Kehutanan	4.430	3.337	1.464	3.707	2.732	2.729
Sumber Daya Air dan Irigasi	0.060	1.390	8.162	0.220	0.512	0.912
Tenaga Kerja	0.000	0.157	0.212	0.079	0.000	0.091
Perdagangan, Peng.Usaha Daerah, Keuangan&Koperasi	12.734	4.764	3.466	4.607	1.701	2.086
Transportasi, Metereologi & Geofisika	33.637	51.436	26.663	33.003	48.480	37.579
Pertambangan dan Energi	0.192	0.590	0.153	0.000	0.255	0.475
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	0.583	1.302	1.254	0.784	0.285	0.901
Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	2.130	9.087	25.155	13.975	3.939	1.261
Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	2.933	1.320	2.950	3.651	0.255	1.944
Pendidikan, Kebudayaan, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olahraga	10.354	5.848	8.221	7.839	4.179	7.126
Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	0.114	0.172	0.095	0.000	0.159	0.151
Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	6.610	4.886	3.546	5.372	2.271	5.311
Perumahan dan Pemukiman	11.457	2.640	5.021	14.110	3.248	6.996
Agama	0.504	0.835	0.893	0.424	0.397	0.368
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	0.370	0.809	0.566	0.674	0.835	1.214
Hukum	0.362	0.191	0.612	0.108	0.141	0.630
Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	12.819	10.014	10.884	10.671	9.068	15.129
Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	0.222	0.878	0.314	0.292	0.133	1.175
Keamanan dan Ketertiban Umum	0.000	0.031	0.032	0.099	0.046	0.138
Subsidi Pembangunan Kepada daerah Bawahan	0.000	0.000	0.000	0.000	21.124	13.557

Sumber : BPS " Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2000-2002" dan "telah diolah kembali"

Sedangkan untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, sektor Transportasi,

Metereologi & Geofisika juga mendapat porsi yang paling besar untuk tahun 2000 sebesar 33,003%, tahun 2001 sebesar 48,480% dan tahun 2002 sebesar 37,579%.

Tabel 3.9.

**Alokasi Belanja Modal Per Sektor
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Pasaman
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2002(%)**

Sektor	Kab. Padang Pariaman			Kab. Pasaman		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
Industri	0.280	0.476	0.383	0.332	0.272	0.404
Pertanian dan Kehutanan	5.348	4.229	4.167	3.483	2.331	2.099
Sumber Daya Air dan Irigasi	0.505	3.843	4.528	2.494	5.084	6.167
Tenaga Kerja	0.151	0.111	0.175	0.000	0.114	0.175
Perdagangan, Peng.Usaha Daerah, Keuangan&Koperasi	5.552	2.876	7.007	4.752	4.022	7.051
Transportasi, Metereologi & Geofisika	34.608	42.002	36.700	44.876	36.398	22.408
Pertambangan dan Energi	0.035	0.266	0.239	0.000	0.079	0.248
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	0.603	0.701	2.285	0.530	0.586	0.348
Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	2.895	9.072	4.528	2.109	0.814	0.506
Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	3.331	1.287	2.336	4.106	1.774	4.145
Pendidikan, Kebudayaan, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olahraga	17.044	5.203	7.650	13.653	15.867	17.934
Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	0.000	0.026	0.017	0.240	0.104	0.067
Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	1.024	4.234	3.636	2.168	5.619	6.507
Perumahan dan Pemukiman	16.755	10.993	5.789	7.010	2.792	3.177
Agama	0.136	0.219	1.432	0.739	1.208	3.475
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.687	2.468	1.396	1.422	0.694	0.459
Hukum	0.213	0.506	0.349	0.451	0.314	0.300
Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	9.491	10.865	16.827	11.407	21.172	23.554
Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	0.151	0.425	0.162	0.148	0.696	0.884
Keamanan dan Ketertiban Umum	0.192	0.198	0.395	0.082	0.059	0.093
Subsidi Pembangunan Kepada daerah Bawahan	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Sumber : BPS " Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2000-2002" dan "telah diolah kembali"

Alokasi belanja modal per sektor untuk Kabupaten Padang Pariaman dan

dan Kabupaten Pasaman tahun 2000-2002 dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.10.

Alokasi Belanja Modal Per Sektor
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Sawahlunto Sijunjung
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2002(%)

Sektor	Kab. Pesisir Selatan			Kab. Sawahlunto Sijunjung		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
Industri	0.159	0.239	0.851	0.201	0.122	0.000
Pertanian dan Kehutanan	4.174	1.983	9.360	4.928	2.735	0.000
Sumber Daya Air dan Irigasi	0.047	3.372	4.201	0.814	2.264	0.000
Tenaga Kerja	0.000	0.189	0.180	0.149	0.295	0.000
Perdagangan, Peng.Usaha Daerah, Keuangan&Koperasi	3.885	4.299	3.402	4.176	2.538	51.101
Transportasi, Metereologi & Geofisika	40.512	34.912	26.563	23.917	41.228	0.000
Pertambangan dan Energi	0.000	0.854	2.103	0.447	0.588	0.000
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	0.555	0.667	0.860	0.353	0.122	0.670
Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	2.861	1.197	1.390	15.666	2.107	0.000
Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	5.077	3.744	3.280	2.933	0.605	0.310
Pendidikan, Kebudayaan, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olahraga	13.585	13.677	11.345	11.795	17.398	14.261
Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	0.000	0.000	0.000	0.309	0.000	0.000
Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	6.443	2.811	4.183	4.056	7.721	15.788
Perumahan dan Pemukiman	13.535	7.483	10.044	20.633	4.077	0.000
Agama	0.709	1.074	2.558	1.129	3.159	2.515
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	0.761	0.721	1.565	1.618	3.370	0.000
Hukum	0.128	0.600	0.479	0.304	0.283	0.181
Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	7.429	21.999	9.102	6.071	10.742	14.912
Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	0.107	0.144	0.263	0.307	0.508	0.090
Keamanan dan Ketertiban Umum	0.032	0.036	0.264	0.194	0.138	0.171
Subsidi Pembangunan Kepada daerah Bawahan	0.000	0.000	8.007	0.000	0.000	0.000

Sumber : BPS " Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2000-2002" dan "telah diolah kembali"

Dari tabel 3.9 untuk Kabupaten Padang Pariaman, sektor Transportasi, Metereologi & Geofisika mendapat porsi yang paling besar untuk tahun 2000

sebesar 34,608%, tahun 2001 sebesar 42,002% dan tahun 2002 sebesar 36,70%.

Tabel 3.11.

Alokasi Belanja Modal Per Sektor
Pemerintah Kabupaten Solok dan Tanah Datar
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2002(%)

Sektor	Kab. Solok			Kab. Tanah Datar		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
Industri	0.182	0.676	0.091	0.602	0.000	0.616
Pertanian dan Kehutanan	3.771	3.576	4.635	4.611	7.326	3.553
Sumber Daya Air dan Irigasi	0.000	2.287	4.461	0.689	4.274	5.185
Tenaga Kerja	0.000	0.377	0.629	0.266	0.302	0.784
Perdagangan, Peng.Usaha Daerah, Keuangan&Koperasi	5.810	3.156	3.859	7.208	4.589	2.133
Transportasi, Metereologi & Geofisika	38.387	34.949	37.522	21.663	38.692	23.714
Pertambangan dan Energi	0.115	0.419	0.231	0.381	0.173	0.204
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	0.884	1.326	0.760	0.586	1.789	1.505
Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	5.049	4.476	1.875	16.818	13.947	30.739
Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	3.842	1.807	1.214	4.106	2.298	0.419
Pendidikan, Kebudayaan, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olahraga	17.341	15.617	13.097	13.244	7.640	8.508
Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	0.135	0.220	0.344	1.396	0.226	0.241
Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	3.467	4.581	2.920	5.156	3.141	3.774
Perumahan dan Pemukiman	11.414	2.741	4.754	13.161	3.941	0.633
Agama	0.520	2.332	0.594	0.752	1.245	1.455
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	0.785	1.191	1.038	2.082	1.528	0.908
Hukum	0.216	0.128	0.113	0.158	0.286	0.234
Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	7.745	19.495	20.952	6.962	7.813	9.811
Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	0.182	0.281	0.654	0.160	0.185	0.167
Keamanan dan Ketertiban Umum	0.155	0.364	0.257	0.000	0.605	0.000
Subsidi Pembangunan Kepada daerah Bawah	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.417

Sumber : BPS " Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2000-2002" dan "telah diolah kembali"

Sedangkan untuk Kabupaten Pasaman, sektor Transportasi, Metereologi & Geofisika juga mendapat porsi yang paling besar untuk tahun 2000 sebesar

44,876%, tahun 2001 sebesar 36,398%. Sedangkan tahun 2002 sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan mendapat porsi paling besar yakni sebesar 23,544%.

Tabel 3.12.

Alokasi Belanja Modal Per Sektor
Pemerintah Kota Bukittinggi dan Padang
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2002(%)

Sektor	Kota Bukittinggi			Kota Padang		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
Industri	0.255	0.676	1.200	0.477	0.460	0.129
Pertanian dan Kehutanan	0.949	1.463	1.132	1.592	2.056	3.091
Sumber Daya Air dan Irigasi	0.000	0.000	0.000	1.686	1.315	0.343
Tenaga Kerja	0.000	0.000	0.000	0.098	0.124	0.104
Perdagangan, Peng.Usaha Daerah, Keuangan&Koperasi	4.328	0.580	0.276	3.460	4.836	8.190
Transportasi, Metereologi & Geofisika	30.227	28.737	0.012	28.762	19.802	16.078
Pertambangan dan Energi	0.000	0.000	0.000	1.803	9.409	0.000
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	1.141	4.528	0.458	1.513	0.561	0.490
Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	1.469	18.538	69.538	8.388	14.626	19.680
Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	0.827	0.865	0.142	2.668	2.461	1.631
Pendidikan, Kebudayaan, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olahraga	23.184	13.297	0.000	11.200	8.065	9.729
Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	0.000	0.000	0.000	0.378	0.062	0.324
Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	12.673	4.446	0.253	3.523	5.935	7.001
Perumahan dan Pemukiman	15.202	7.538	0.000	13.557	6.032	5.926
Agama	0.741	1.425	0.330	1.078	2.650	4.986
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	0.210	0.721	0.059	2.135	2.946	1.716
Hukum	0.105	0.202	0.000	0.217	0.589	0.230
Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	8.479	15.908	22.850	14.266	16.300	18.338
Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	0.211	1.077	0.017	1.032	1.273	1.913
Keamanan dan Ketertiban Umum	0.000	0.000	3.065	0.407	0.496	0.102
Subsidi Pembangunan Kepada daerah Bawah	0.000	0.000	0.669	1.762	0.000	0.000

Sumber : BPS " Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2000-2002" dan "telah diolah kembali"

Alokasi belanja modal per sektor untuk Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung tahun 2000-2002 dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.13.
Alokasi Belanja Modal Per Sektor
Pemerintah Kota Padang Panjang dan Payakumbuh
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2002(%)

Sektor	Kota Padang Panjang			Kota Payakumbuh		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
Industri	0.881	0.383	1.023	0.193	0.299	0.561
Pertanian dan Kehutanan	6.726	6.029	1.315	2.276	0.790	1.859
Sumber Daya Air dan Irigasi	0.948	4.489	0.477	0.000	0.399	12.034
Tenaga Kerja	0.000	1.027	0.461	0.000	0.000	0.186
Perdagangan, Peng.Usaha Daerah, Keuangan&Koperasi	9.274	13.555	5.563	3.567	2.174	11.059
Transportasi, Metereologi & Geofisika	24.577	23.869	34.084	29.151	58.633	21.651
Pertambangan dan Energi	0.434	0.341	0.496	0.000	0.000	0.000
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	2.994	1.386	3.772	1.604	0.647	0.810
Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	1.073	0.313	0.180	0.717	2.823	2.431
Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	2.081	1.865	4.014	0.096	1.628	1.781
Pendidikan, Kebudayaan, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olahraga	24.469	12.697	12.176	20.356	1.395	7.129
Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.055
Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	1.454	0.727	4.545	13.295	2.513	6.152
Perumahan dan Pemukiman	9.144	3.408	23.657	20.796	8.648	5.091
Agama	0.676	1.326	1.437	0.482	0.269	1.106
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	0.673	1.587	0.564	0.804	0.000	0.890
Hukum	0.784	0.526	0.610	0.083	0.076	0.064
Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	13.213	26.456	5.172	6.580	19.686	27.007
Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	0.447	0.016	0.325	0.000	0.018	0.134
Keamanan dan Ketertiban Umum	0.153	0.000	0.129	0.000	0.000	0.000
Subsidi Pembangunan Kepada daerah Bawahan	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Sumber : BPS " Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2000-2002" dan "telah diolah kembali"

Dari tabel 3.10 untuk Kabupaten Pesisir Selatan, sektor Transportasi, Metereologi & Geofisika mendapat porsi yang paling besar untuk tahun 2000 sebesar 40,512%, tahun 2001 sebesar 34,912% dan tahun 2002 sebesar 26,563%.

Sedangkan untuk Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, sektor Transportasi, Metereologi & Geofisika juga mendapat porsi yang paling besar untuk tahun 2000

Tabel 3.14.
Alokasi Belanja Modal Per Sektor
Pemerintah Kota Sawahlunto dan Solok
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2002(%)

Sektor	Kota Sawahlunto			Kota Solok		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
Industri	0.837	1.953	0.266	0.969	1.309	0.298
Pertanian dan Kehutanan	3.142	4.013	0.782	4.894	8.491	3.701
Sumber Daya Air dan Irigasi	0.125	1.319	1.167	2.057	1.867	2.857
Tenaga Kerja	0.672	0.107	0.879	0.000	0.579	0.443
Perdagangan, Peng.Usaha Daerah, Keuangan&Koperasi	5.862	6.298	4.195	8.979	15.520	29.715
Transportasi, Metereologi & Geofisika	23.096	23.369	34.487	26.201	11.808	6.584
Pertambangan dan Energi	0.000	0.000	1.566	0.422	0.000	0.000
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	5.227	2.140	2.026	1.801	0.749	1.204
Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	1.390	7.509	6.498	7.051	7.552	6.057
Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	1.655	2.430	2.264	1.220	1.961	0.820
Pendidikan, Kebudayaan, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olahraga	26.545	9.880	9.450	17.299	4.619	11.056
Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.071
Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	6.348	7.615	5.894	3.448	6.949	5.344
Perumahan dan Pemukiman	5.483	6.561	1.774	6.980	7.585	1.856
Agama	0.000	0.196	0.000	1.074	2.230	0.724
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.606	4.151	3.227	1.475	0.000	0.899
Hukum	0.204	0.321	0.000	0.916	0.427	0.765
Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	17.807	22.139	24.834	13.867	25.870	24.489
Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	0.000	0.000	0.000	1.012	1.336	0.487
Keamanan dan Ketertiban Umum	0.000	0.000	0.690	0.337	1.148	2.630
Subsidi Pembangunan Kepada daerah Bawahan	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Sumber : BPS " Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2000-2002" dan "telah diolah kembali"

sebesar 23,917%, tahun 2001 sebesar 41,228% . Sedangkan untuk tahun 2002 sektor Perdagangan, Peng.Usaha Daerah, Keuangan & Koperasi mendapat porsi yang paling besar yaitu 51,101%.

Alokasi belanja modal per sektor untuk Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar tahun 2000-2002 dapat dilihat pada tabel 3.11. Dari tabel 3.11 untuk

Kabupaten Solok, sektor Transportasi, Meteorologi & Geofisika mendapat porsi yang paling besar untuk tahun 2000 sebesar 38,387%, tahun 2001 sebesar 34,949% dan tahun 2002 sebesar 37,522%.

Sedangkan untuk Kabupaten Tanah Datar, sektor Transportasi, Meteorologi & Geofisika juga mendapat porsi yang paling besar untuk tahun 2000 sebesar 21,663%, tahun 2001 sebesar 38,692% . Sedangkan untuk tahun 2002 sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi mendapat porsi terbesar yaitu 30,739%.

Alokasi belanja modal per sektor untuk Kota Bukittinggi dan Kota Padang tahun 2000-2002 dapat dilihat pada tabel 3.12. Dari tabel 3.12 untuk Kota Bukittinggi, sektor Transportasi, Meteorologi & Geofisika mendapat porsi yang paling besar untuk tahun 2000 sebesar 30,227%, tahun 2001 sebesar 28,737% . Sedangkan untuk tahun 2002 sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi mendapat porsi yang paling besar yaitu 69,538%.

Sedangkan untuk Kota Padang, sektor Transportasi, Meteorologi & Geofisika juga mendapat porsi yang paling besar untuk tahun 2000 sebesar 28,762%, tahun 2001 sebesar 19,802%. Sedangkan untuk tahun 2002 sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi mendapat porsi yang paling besar yaitu 19,680%.

Alokasi belanja modal per sektor untuk Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh tahun 2000-2002 dapat dilihat pada tabel 3.13. Dari tabel 3.13 untuk Kota Padang Panjang, sektor Transportasi, Meteorologi & Geofisika mendapat porsi yang paling besar untuk tahun 2000 sebesar 24,577% dan tahun 2002 sebesar 34,084%. Sedangkan tahun 2001, sektor yang mendapat porsi belanja terbesar adalah sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan sebesar 26,456%.

Sedangkan untuk Kota Payakumbuh, sektor Transportasi, Meteorologi & Geofisika juga mendapat porsi yang paling besar untuk tahun 2000 sebesar 29,151%, tahun 2001 sebesar 58,633%. Untuk tahun 2002, sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan mendapat porsi terbesar yakni 27,007%.

Alokasi belanja modal per sektor untuk Kota Sawahlunto dan Kota Solok tahun 2000-2002 dapat dilihat pada tabel 3.14. Dari tabel 3.14 untuk Kota Sawahlunto, sektor Pendidikan, Kebudayaan, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olahraga mendapat porsi terbesar untuk tahun 2000 sebesar

26,545%. Sedangkan sektor Transportasi, Metereologi & Geofisika mendapat porsi yang paling besar untuk tahun 2001 sebesar 23,369% dan tahun 2002 sebesar 34,487%.

Sedangkan untuk Kota Solok, sektor Transportasi, Metereologi & Geofisika juga mendapat porsi yang paling besar untuk tahun 2000 sebesar 26,201%. Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan mendapat porsi terbesar tahun 2001 sebesar 25,870%. Sedangkan untuk tahun 2002 sektor Perdagangan, Peng.Usaha Daerah, Keuangan & Koperasi mendapat porsi yang paling besar yaitu 29,715%.

Dari penjelasan kondisi perekonomian makro dan kondisi keuangan di Provinsi Sumatera Barat tahun 1996-2006, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (2000-2006), terdapat perbedaan yang cukup besar antara PDRB Kota Padang dengan PDRB Kabupaten/Kota lainnya. Kemudian dari kontribusi nilai tambah per sektor terhadap PDRB, sektor pertanian mempunyai kontribusi paling besar untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan kontribusi sektor Jasa Pemerintahan terhadap PDRB Kabupaten/Kota berkisar antara 9,02% - 18,36% tahun 2000. Kontribusi sektor Jasa Pemerintahan bervariasi naik dan turun diantara Kabupaten/Kota setelah tahun 2000. Dari kontribusi sektor Jasa Pemerintahan terhadap PDRB, kita dapat memfokuskan pada kontribusi dari belanja modal pemerintah terhadap PDRB Kabupaten/Kota.

Untuk Kabupaten di Sumatera Barat tahun 2000, tingkat inflasi berkisar antara 4,12% - 6,59%. Untuk Kota di Sumatera Barat, tingkat inflasi berkisar antara 4,07% - 6,3% tahun 2000. Secara umum tingkat inflasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat meningkat di tahun 2001 dan 2002. Di tahun 2003 dan 2004, tingkat inflasi kembali mengalami penurunan dan kecenderungan menaik di tahun 2005 dan 2006.

Tingkat pengangguran untuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2004 berkisar antara 8,16% - 18,9%. Tingkat pengangguran untuk Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2004 berkisar antara 9,53% - 20,99%. Tingkat pengangguran masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat bervariasi sesudah tahun 2004.

Pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat meningkat

dari tahun ke tahun, baik yang berasal dari sumber penerimaan sendiri berupa pendapatan asli daerah maupun yang berasal dari pemerintah pusat seperti dana perimbangan. Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000 masih rendah yakni sekitar 2,07% - 23%. Sedangkan untuk Kota Padang dan Kota Bukittinggi, persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah cukup tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat yakni 23,38% dan 12,17%.

Belanja Daerah juga meningkat dari tahun ke tahun baik untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (sebelum tahun 2003), maupun belanja Aparatur Daerah maupun belanja Pelayanan Publik (setelah tahun 2003).

Persentase Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah bervariasi diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2003. Untuk tahun 2003, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai persentase Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah cukup tinggi berkisar antara 30,17% - 46,59%. yakni Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang. Bila dilakukan perbandingan belanja modal dengan PDRB masing-masing Kabupaten/kota, persentase menjadi semakin kecil apalagi untuk Kabupaten/Kota yang persentase belanja Modal terhadap Belanja Daerah lebih rendah.

Data perekonomian makro seperti data pertumbuhan PDRB masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat digunakan untuk spesifikasi model sebagai variabel dependen. Data Belanja Daerah yang tercakup didalamnya belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota, digunakan untuk menentukan variabel independen seperti Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan analisis hasil regresi yang akan dilakukan pada bab V, data PDRB masing-masing Kabupaten/Kota dapat memberikan informasi tambahan terhadap hasil regresi yang diperoleh.

Kita dapat melakukan analisis sektor ekonomi mana yang mengalami pertumbuhan dikaitkan dengan kenaikan belanja modal pemerintah atau investasi swasta. Kenaikan PDRB masing-masing sektor ekonomi untuk Kabupaten/Kota yang terjadi setiap tahun, dapat kita hubungkan dengan kenaikan belanja modal

pemerintah atau investasi swasta pada sektor tertentu yang terjadi setiap tahun. Namun demikian, untuk penelitian ini yang lebih difokuskan adalah apakah kenaikan belanja modal pemerintah atau kenaikan investasi swasta tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam bentuk pertumbuhan PDRB.

BAB 4 : METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Spesifikasi Model.

Spesifikasi model mengarah kepada tujuan penelitian dan menguji hipotesis dari penelitian. Spesifikasi model melihat pengaruh belanja modal pemerintah, investasi swasta, dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto.

Spesifikasi model berdasarkan model Harrod Domar. Adapun spesifikasi modelnya umumnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln(\Delta Y)_{i,t} = & \alpha_0 + \alpha_1 \ln(\Delta K_{pdaerah i,t}) + \alpha_2 \ln(\Delta K_{pprov i,t}) \\ & + \alpha_3 \ln(\Delta K_{ppus i,t}) + \alpha_4 \ln(\Delta K_{s i,t}) \\ & + \alpha_5 \ln(POP_{i,t}) + \varepsilon \end{aligned} \quad (4.1.)$$

Dimana:

- $\Delta Y_{i,t}$ = perubahan output riil pada kabupaten/kota i dan tahun t
- α = konstanta regresi
- $\Delta K_{pdaerah i,t}$ = pertambahan modal pemerintah kabupaten/kota i dan tahun t
- $\Delta K_{pprov i,t}$ = pertambahan modal pemerintah provinsi pada kabupaten/kota i dan tahun t
- $\Delta K_{ppus i,t}$ = pertambahan modal pemerintah pusat pada kabupaten/kota i dan tahun t
- $\Delta K_{s i,t}$ = pertambahan modal swasta pada kabupaten/kota i dan tahun t
- $POP_{i,t}$ = jumlah penduduk pada kabupaten/kota i dan tahun t
- ε = error term

Pada spesifikasi model, ΔK sebagai perubahan modal diasumsikan sama dengan Belanja Modal Pemerintah maupun Investasi Swasta pada Kabupaten/Kota tahun t. Kemudian, pertimbangan fokus penelitian dan kemudahan mendapatkan data, spesifikasi model tidak memasukkan belanja modal pemerintah provinsi dan belanja modal pemerintah pusat pada kabupaten/kota.

Penyesuaian pada ΔK , dimana belanja modal pemerintah hanya pada Kabupaten/Kota bersangkutan, serta output riil yang disamakan dengan PDRB riil

Kabupaten/Kota bersangkutan. Kemudian variabel dummy juga digunakan untuk membedakan Kabupaten dengan Kota. Spesifikasi model penelitian menjadi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln(\Delta PDRB)_{i,t} = & \alpha_0 + \alpha_1 \ln(BMP_{i,t}) + \alpha_2 \ln(IS_{i,t}) \\ & + \alpha_3 \ln(POP_{i,t}) + \alpha_4 D + \varepsilon \end{aligned} \quad (4.2.)$$

Dimana:

- $\Delta PDRB_{i,t}$ = perubahan PDRB riil pada kabupaten/kota i dan tahun t
- α = konstanta regresi
- $BMP_{i,t}$ = belanja modal pemerintah riil pada kabupaten/kota i dan tahun t
- $IS_{i,t}$ = investasi swasta riil pada kabupaten/kota i dan tahun t
- $POP_{i,t}$ = jumlah penduduk pada kabupaten/kota i dan tahun t
- D = variabel dummy ($D = 0$ untuk Kabupaten, $D = 1$ untuk Kota)
- ε = error term

Untuk menentukan besarnya $\Delta PDRB_{i,t}$ terlebih dahulu ditentukan besarnya PDRB tahun t Kabupaten/Kota_i dengan PDRB tahun t-1 Kabupaten/Kota_i. Perubahan PDRB_{i,t} ($\Delta PDRB_{i,t}$) menjadi sebagai berikut:

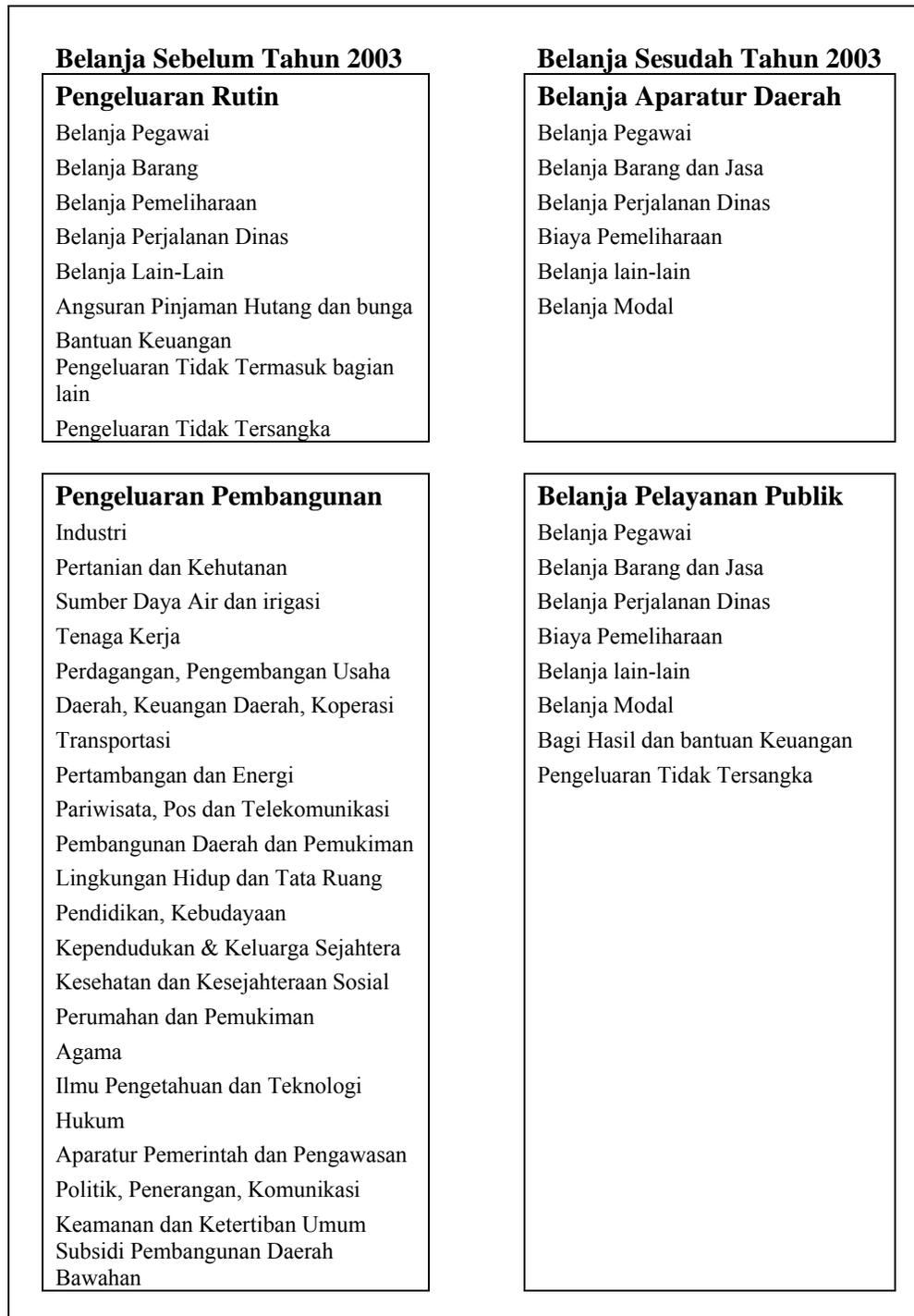
$$PDRB_{i,t} - PDRB_{i,t-1}$$

$BMP_{i,t}$ ditentukan dari belanja modal pemerintah kabupaten/kota_i pada tahun t. Yang menjadi penekanan disini adalah belanja modal pemerintah yang berasal dari belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk memperjelas belanja modal pemerintah, perlu didefinisikan terlebih dahulu apa komponen yang termasuk ke dalam belanja modal pemerintah. Apa yang tercakup ke dalam belanja modal pemerintah, terlebih dahulu kita melihat struktur belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sebelum tahun 2003 dan setelah tahun 2003. Pemisahan dilakukan karena terjadinya perbedaan pengelompokan belanja sebelum dan sesudah tahun 2003.

Komponen belanja daerah sebelum tahun 2003 dikelompokkan kepada pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Selanjutnya pengeluaran rutin dapat diperinci lagi berdasarkan komponen-komponennya. Begitu juga dengan pengeluaran pembangunan dapat diperinci lagi berdasarkan komponen-komponen

Gambar 4.1.



Perbandingan Pengelompokan Belanja Daerah
Sebelum Tahun 2003 dan Setelah tahun 2003 APBD Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat

Sumber :”telah diolah kembali”

nya. Sedangkan komponen belanja daerah setelah tahun 2003 dikelompokkan kepada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik.

Dari perbandingan struktur belanja tersebut, kita menemukan perbedaan hanya menyangkut pengelompokan masing-masing jenis belanja.

Komponen Pengeluaran Rutin pada kelompok belanja sebelum tahun 2003 berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Lain-lain dikelompokkan kedalam Belanja Aparatur Daerah pada kelompok belanja setelah tahun 2003. Angsuran pinjaman hutang dan bunga, bantuan keuangan, pengeluaran tidak termasuk bagian lain dikelompokkan kedalam bagi hasil dan bantuan keuangan. Sedangkan untuk pengeluaran tidak terduga yang termasuk pengeluaran rutin, pada kelompok belanja setelah tahun 2003 dimasukkan kedalam kelompok Belanja Pelayanan Publik.

Belanja pelayanan publikpun dapat diperinci lagi berdasarkan komponen-komponennya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dapat dilihat pada gambar 4.1.

Komponen pengeluaran pembangunan pada kelompok belanja sebelum tahun 2003, disajikan per sektor kegiatan. Dengan demikian, masing-masing sektor mempunyai rincian jenis belanja. Sedangkan untuk kelompok belanja setelah tahun 2003, tidak menyajikan persektor tetapi berdasarkan jenis belanja.

Sesuai dengan spesifikasi model diatas, yang diperlukan adalah berapa belanja modal pemerintah untuk masing-masing Kabupaten/Kota per tahun (2000-2006).

Untuk periode sebelum tahun 2003, pengeluaran pembangunan per sektor dapat dimasukkan ke dalam belanja modal. Jumlah total pengeluaran pembangunan per sektor merupakan belanja modal pemerintah untuk masing-masing kabupaten/kota. Untuk periode setelah tahun 2003, belanja modal telah disajikan secara tersendiri.

Satu hal lagi yang muncul, menyangkut tahun anggaran sebelum tahun 2000, dimana kita menggunakan lag 1 dan 2 tahun untuk belanja modal pemerintah tahun 1999 dan 1998. Periode anggaran dimulai bulan April sampai dengan Maret tahun berikutnya. Sebagai contoh untuk tahun 1998 tercakup dalam periode

anggaran 1997/1998 (Januari-Maret 1998) dan periode anggaran 1998/1999 (April-Desember 1998). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, belanja modal pemerintah tahun 1998 diambil dari $\frac{1}{4}$ bagian dari total belanja modal pemerintah tahun anggaran 1997/1998 dan $\frac{3}{4}$ bagian dari total belanja modal pemerintah tahun anggaran 1998/1999.

Sedangkan untuk tahun 1999 tercakup dalam periode anggaran 1998/1999 (Januari-Maret 1999) dan periode anggaran 1999/2000 (April-Desember 1999). Belanja modal pemerintah tahun 1999, diambil dari $\frac{1}{4}$ bagian dari total belanja modal pemerintah tahun anggaran 1998/1999 dan $\frac{3}{4}$ bagian dari total belanja modal pemerintah tahun anggaran 1999/2000.

Untuk periode setelah tahun 2003, belanja daerah dikelompokkan berdasarkan jenis belanja. Untuk menentukan besarnya belanja modal pemerintah mengacu kepada besarnya belanja modal untuk masing-masing tahun. Namun demikian, untuk mendapatkan belanja modal pemerintah riil, belanja modal pemerintah dibagi dengan PDRB deflator.

Belanja Modal Pemerintah Riil $_{i,t}$ menjadi sebagai berikut:

$$BMP_{i,t} = \frac{BMPD_{i,t}}{PDRB \text{ Deflator}}$$

IS $_{i,t}$ ditentukan dari investasi swasta pada Kabupaten/Kota $_i$ pada tahun t . Yang tercakup kepada investasi swasta adalah jumlah investasi baik yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) dalam satu tahun ditambah dengan jumlah kredit bank untuk investasi baik KIK dan KMKP pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Untuk mendapatkan investasi swasta riil, investasi swasta dibagi dengan PDRB deflator.

Investasi Swasta Riil $_{i,t}$ menjadi sebagai berikut:

$$IS_{i,t} = \frac{ISD_{i,t}}{PDRB \text{ Deflator}}$$

Untuk menentukan besarnya POP $_{i,t}$ ditentukan dari besarnya jumlah penduduk Kabupaten/Kota $_i$ pada tahun t .

Jumlah penduduk $_{i,t}$ menjadi sebagai berikut:

$$POP_{i,t} = \text{JumlahPendudukKab / Kota}_{i,t}$$

Setelah mendapatkan besarnya proksi untuk variabel $\Delta PDRB_{i,t}$, $BMP_{i,t}$, $IS_{i,t}$ dan $POP_{i,t}$ langkah selanjutnya melakukan regresi menggunakan metode OLS. Data yang digunakan disini adalah data cross section Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat serta data time series masing-masing Kabupaten/Kota (2000-2006). Dengan demikian data yang digunakan adalah data panel.

Analisis juga dapat dilakukan dengan menggunakan kelambanan 1 tahun dan 2 tahun pada Belanja Modal Pemerintah. Proyek pemerintah adakalanya melebihi jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi satu atau dua tahun berikutnya.

Bila spesifikasi model menggunakan lag 1 tahun, spesifikasi model menjadi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ln}(\Delta PDRB)_{i,t} = & \alpha_0 + \alpha_1 \text{Ln}(BMP_{i,t-1}) + \alpha_2 \text{Ln}(IS_{i,t-1}) \\ & + \alpha_3 \text{Ln}(POP_{i,t}) + \alpha_4 D + \varepsilon \end{aligned} \quad (4.3.)$$

Dimana:

- $\Delta PDRB_{i,t}$ = perubahan PDRB riil pada kabupaten/kota i dan tahun t
- α = konstanta regresi
- $BMP_{i,t-1}$ = belanja modal pemerintah riil pada kabupaten/kota i dan tahun t-1
- $IS_{i,t-1}$ = investasi swasta riil pada kabupaten/kota i dan tahun t-1
- $POP_{i,t}$ = jumlah penduduk pada kabupaten/kota i dan tahun t
- D = variabel dummy ($D = 0$ untuk Kabupaten, $D = 1$ untuk Kota)
- ε = error term

Dengan cara yang sama, spesifikasi model menggunakan lag 2 tahun sehingga menjadi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ln}(\Delta PDRB)_{i,t} = & \alpha_0 + \alpha_1 \text{Ln}(BMP_{i,t-2}) + \alpha_2 \text{Ln}(IS_{i,t-2}) \\ & + \alpha_3 \text{Ln}(POP_{i,t}) + \alpha_4 D + \varepsilon \end{aligned} \quad (4.4.)$$

Dimana:

- $\Delta PDRB_{i,t}$ = perubahan PDRB riil pada kabupaten/kota i dan tahun t

- α = konstanta regresi
 $BMP_{i,t-2}$ = belanja modal pemerintah riil pada kabupaten/kota i dan tahun t-2
 $IS_{i,t-2}$ = investasi swasta riil pada kabupaten/kota i dan tahun t-2
 $POP_{i,t}$ = jumlah penduduk pada kabupaten/kota i dan tahun t
 D = variabel dummy ($D = 0$ untuk Kabupaten, $D = 1$ untuk Kota)
 ε = error term

Kita juga dapat melihat hubungan antara belanja modal pemerintah dengan PDRB riil Kabupaten/Kota bersangkutan. Bila hal ini dilakukan, spesifikasi model penelitian menjadi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Ln(PDRB)_{i,t} = & \alpha_0 + \alpha_1 Ln(BMP_{i,t}) + \alpha_2 Ln(IS_{i,t}) \\
 & + \alpha_3 Ln(POP_{i,t}) + \alpha_4 D + \varepsilon
 \end{aligned}
 \tag{4.5.}$$

Dimana:

- $PDRB_{i,t}$ = PDRB riil pada kabupaten/kota i dan tahun t
 α = konstanta regresi
 $BMP_{i,t}$ = belanja modal pemerintah riil pada kabupaten/kota i dan tahun t
 $IS_{i,t}$ = investasi swasta riil pada kabupaten/kota i dan tahun t
 $POP_{i,t}$ = jumlah penduduk pada kabupaten/kota i dan tahun t
 D = variabel dummy ($D = 0$ untuk Kabupaten, $D = 1$ untuk Kota)
 ε = error term

Analisis juga dapat dilakukan dengan menggunakan kelambanan 1 tahun dan 2 tahun pada Belanja Modal Pemerintah. Proyek pemerintah adakalanya melebihi jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dampak terhadap Produk Domestik Regional Bruto terjadi satu atau dua tahun berikutnya.

4.2. Asumsi Model

Berdasarkan kepada model Harrod-Domar ada beberapa asumsi pada model yang digunakan. Dari sisi tenaga kerja, tidak ada tenaga kerja yang menganggur sehingga tidak ada batasan pada penawaran tenaga kerja. Kemudian dari sisi produksi, produksi proporsional terhadap stok mesin.

4.3. Perumusan Model

4.3.1. Modelling Ekonometrika

Menurut Hendry dan Richard bahwa: model yang dipilih untuk dianalisis harus memenuhi beberapa kriteria berikut ini:

- a) Prediksi yang dibuat dari model harus masuk nalar.
- b) Harus konsisten dengan teori.
- c) Mempunyai variabel independen yang tidak berkorelasi dengan variabel gangguan.
- d) Menunjukkan adanya konsistensi parameter.
- e) Menunjukkan data yang koheren.
- f) Model harus komplit yaitu mencakup semua model yang sudah ada (rival models) (51:3-33)

Pada dasarnya ada lima kesalahan spesifikasi model yaitu:

- a) Mengeluarkan variabel independen yang relevan.
- b) Memasukkan variabel independen yang tidak relevan.
- c) Menggunakan bentuk fungsi model yang salah.
- d) Kesalahan pengukuran
- e) Spesifikasi yang salah tentang variabel gangguan (Gujarati 509)

Kesalahan spesifikasi no.1 – 4 dikenal dengan kesalahan spesifikasi model (model specification errors). Dalam hal ini kita mengetahui model yang benar tetapi tidak mengestimasi model yang benar. Sedangkan kesalahan spesifikasi kedua muncul karena kita tidak mengetahui model mana yang benar (model misspecification errors) (Widarjono 177-8)

4.3.2. Model Regresi Linier dan Berganda

“Perhatian utama regresi pada dasarnya adalah menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen” (Widarjono 17).

“Persamaan regresi populasi hanya dapat diestimasi dengan menggunakan data sampel” (Widarjono 19).

“Persoalan penting didalam membuat garis regresi sampel adalah bagaimana kita bisa mendapatkan garis regresi yang baik. Garis regresi sampel yang baik ini

terjadi jika nilai prediksinya sedekat mungkin dengan data aktualnya” (Widarjono 20).

4.3.3. Uji t Koefisien Regresi Parsial

Perbedaan uji t regresi berganda dengan lebih dari satu variabel independen dengan regresi sederhana dengan hanya satu variabel independen terletak pada besarnya derajat *degree of freedom* (df) dimana untuk regresi sederhana df-nya sebesar $n-2$ sedangkan regresi berganda tergantung dari jumlah variabel independen ditambah dengan konstanta (Widarjono 70).

Pada uji statistik t, keputusan kita menolak hipotesis nol jika nilai absolut statistik t hitung lebih besar dari nilai t kritis dari distribusi tabel t. Sementara itu, pada prosedur uji probabilitas statistik t atau nilai ρ kita hanya membandingkan nilai probabilitas ρ dengan nilai signifikansi α . Jika nilai probabilitas ρ lebih kecil dari nilai α yang dipilih maka kita menolak hipotesis nol (H_0) atau menerima hipotesis alternatif (H_a) dan sebaliknya jika nilai probabilitas ρ lebih besar dari nilai α maka kita menerima hipotesis nol atau menolak hipotesis alternatif (Widarjono 50).

4.3.4. Uji Hipotesis Koefisien Regresi Secara Menyeluruh: Uji F

Walaupun uji F menunjukkan adanya penolakan hipotesis nol yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen, namun hal ini bukan berarti secara individual variabel independen mempengaruhi variabel dependen melalui uji t. Keadaan ini terjadi karena kemungkinan adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen. Kondisi ini menyebabkan *standard error* sangat tinggi dan rendahnya nilai t hitung meskipun model secara umum mampu menjelaskan data dengan baik (Widarjono 74).

4.4. Model Regresi Data Panel

Menurut Baltagi, keuntungan menggunakan panel data sebagai berikut:

- a) Panel data dikaitkan dengan individu, perusahaan, negara dan

seterusnya sehingga adanya heterogen dalam unit ini.

- b) Dengan kombinasi observasi time series dan cross section, panel data memberikan lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, lebih rendah kolinieritas diantara variabel, lebih tinggi degree of freedom dan lebih efisien.
- c) Dengan penelitian yang berulang-ulang observasi cross section, panel data lebih cocok untuk penelitian perubahan dinamik.
- d) Panel data lebih baik mendeteksi dan mengukur efek yang tidak dapat diobservasi dari cross section dan time series awal.
- e) Panel data mampu untuk meneliti lebih rumit perilaku dari model .
- f) Dengan membuat ketersediaan data untuk beribu-ribu unit, panel data dapat meminimumkan bias yang mungkin dihasilkan seandainya kita mengelompokkan individu atau perusahaan kedalam agregat yang luas (Baltagi 3-6).

“Data untuk pekerjaan ekonometrika terdiri dari tiga jenis yaitu data time series, cross section, dan data panel” (Widarjono 249).

Regresi dengan menggunakan data panel disebut model regresi data panel. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel yang merupakan gabungan dua data time series dan cross section mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (omitted-variabel) (Widarjono 249-50).

Secara umum dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan intersep dan slope koefisien yang berbeda. Oleh karena itu di dalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi yang kita buat tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya. (Widarjono 251).

Ada beberapa kemungkinan yang muncul yaitu:

- a) Diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu dan perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh variabel

gangguan.

- b) Diasumsikan slope adalah tetap tetapi intersep berbeda antar individu.
- c) Diasumsikan slope tetap tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun antar individu.
- d) Diasumsikan inetersep dan slope berbeda antar individu.
- e) Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu (Widarjono 251).

4.4.1. Koefisien tetap antar waktu dan individu (common effect)

Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah hanya dengan mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Metode ini dikenal dengan estimasi common effect (Widarjono 251).

4.4.2. Slope konstan tetapi intersep berbeda antar individu (Fixed effect).

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep didalam persamaan dikenal dengan model regresi fixed effect. Teknik model fixed effect adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian fixed effect ini didasarkan adanya perbedaan intersep antar perusahaan namun intersepanya sama antar waktu (time invariant). Disamping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu (Widarjono 253).

4.4.3. Estimasi Dengan Pendekatan Random Effects.

Dimasukkannya variabel dummy didalam model fixed effect bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun ini, juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (error terms) dikenal sebagai metode random effect. Didalam model ini kita akan mengestimasi data panel dimana variabel

gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu (Widarjono 256).

4.4.4. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel.

Dalam pembahasan teknik estimasi model regresi data panel sebelumnya, ada tiga teknik yang bisa digunakan yaitu model dengan metode OLS (common), model fixed effect dan model random effect. Pertanyaan yang muncul adalah teknik mana yang sebaiknya dipilih untuk regresi data panel (Widarjono 258).

Pertama uji statistik F digunakan untuk memilih metode OLS tanpa variabel dummy atau fixed effect. Kedua, uji Langrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara OLS tanpa variabel dummy atau random effect. Terakhir untuk memilih antara fixed effect atau random effect digunakan uji yang dikemukakan oleh Hausman (Widarjono 258).

4.5. Asumsi Dasar

4.5.1. Multikolinieritas

“Adanya hubungan antara variabel independen dalam satu regresi menyangkut dengan multikolinieritas” (Widarjono 111).

“Adanya multikolinieritas masih menghasilkan estimator yang blue, tetapi menyebabkan suatu model mempunyai varian yang besar (Widarjono 112).

Model yang mempunyai standar error besar dan nilai t statistik yang rendah, dengan demikian merupakan indikasi awal adanya masalah multikolinieritas dalam model. Namun multikolinieritas dapat terjadi jika model yang kita punyai merupakan model yang kurang bagus (Widarjono 113).

4.5.2. Heteroskedastisitas

Dalam kenyataannya seringkali varian variabel gangguan adalah tidak konstan atau disebut dengan heteroskedastisitas. Tidak adanya heteroskedastisitas dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$E(e_i) = \sigma^2 \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (4.6)$$

(Widarjono 125).

“Apa konsekuensinya terhadap estimator OLS jika ada masalah

heterokedastisitas dan kita tetap mempertahankan asumsi metode OLS yang lain” (Widarjono 126).

“Jadi dengan adanya heterokedastisitas, estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) hanya Linear Unbiased Estimator (LUE)”(Widarjono 127).

4.5.3. Autokorelasi

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain (Widarjono 155).

Sedangkan salah satu asumsi penting metode OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara variabel gangguan satu dengan variabel gangguan yang lain. Tidak adanya serial korelasi antara variabel gangguan ini sebelumnya dinyatakan sebagai berikut:

$$E(e_i, e_j) = 0 \quad i \neq j \quad (4.7)$$

(Widarjono 155).

Dengan demikian jika ada autokorelasi dalam regresi maka estimator yang kita dapatkan akan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a) Estimator metode OLS masih linier.
- b) Estimator metode OLS masih tidak bias.
- c) Namun estimator metode OLS tidak mempunyai varian yang minimum lagi (no longer best) (Widarjono 158).

BAB 5 : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Data Hasil Regresi

Hasil regresi dari spesifikasi model menggunakan data panel dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000-2006, sebagaimana disajikan pada tabel 5.1.

Tabel.5.1
Hasil Regresi Model

	Variabel Dependen: Ln(Perubahan PDRB)		
	CEM	FEM	REM
Konstanta	9.04E+00		
s.e	2.85E+00		
t statistik	3.17017		
Ln(Belanja Modal Pemerintah)	-5.14E-02		
s.e	1.18E-01		
t statistik	-0.434654		
Ln(Investasi Swasta)	2.00E-01		
s.e	8.26E-02		
t statistik	2.415966		
Ln(Jumlah Penduduk)	9.70E-01		
s.e	1.46E-01		
t statistik	6.63671		
Dummy	0.170351		
s.e	0.212824		
t statistik	0.80043		

Sumber: “telah diolah kembali”

Pada spesifikasi model diatas, kita memfokuskan hubungan antara variabel belanja modal pemerintah, investasi swasta, jumlah penduduk dan dummy terhadap perubahan PDRB. Artinya kita akan menjawab hipotesis penelitian dengan menggunakan panel data.

Pada tabel 5.1., hasil regresi kolom pertama, kolom kedua dan kolom ketiga menggunakan variabel independen yang sama yaitu belanja modal pemerintah, investasi swasta, jumlah penduduk dan dummy untuk kabupaten dengan Kota. Perbedaannya adalah kolom pertama menggunakan metode

common effect, kolom kedua menggunakan metode fixed effect dan kolom ketiga menggunakan metode random effect.

Tabel.5.1
Hasil Regresi Model
“sambungan”

	Variabel Dependen: Ln(Perubahan PDRB)		
	CEM	FEM	REM
Fixed & Random Effects (Cross)			
KAB.AGAM—C			
KAB.LIMAPULUHKOTA—C			
KAB. PADANG PARIAMAN—C			
KAB. PASAMAN—C			
KAB.PESISIR SELATAN—C			
KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG—C			
KAB.SOLOK—C			
KAB. TANAHDATAR—C			
KOTA BUKITTINGGI—C			
KOTA PADANG—C			
KOTA PADANG PANJANG—C			
KOTA PAYAKUMBUH—C			
KOTA SAWAHLUNTO—C			
KOTA SOLOK—C			
Fixed Effects (Period)			
2000—C			
2001—C			
2002—C			
2003—C			
2004—C			
2005—C			
2006—C			
R ²	0.79129		
F statistik	84.35738		
S.E.E	5.34E-01		

Sumber: “telah diolah kembali”

Akan tetapi, hasil pengolahan data hanya dapat dilakukan dengan metode common effect.

Kita tidak perlu melakukan uji signifikansi antara metode common

effect (kolom pertama) dan fixed effect (kolom kedua). Demikian pula uji signifikansi antara metode common effect (kolom pertama) dan metode random effect (kolom ketiga) juga tidak perlu dilakukan.

Uji t dilakukan terhadap pengaruh variabel belanja modal pemerintah terhadap perubahan PDRB. Nilai t hitung adalah -0.434654. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha=1\%$, $\alpha=5\%$, $\alpha=10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Dari uji t, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel belanja modal pemerintah tidak signifikan berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB. Artinya kita percaya bahwa dari kasus pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana belanja modal pemerintah tidak berpengaruh terhadap perubahan PDRB. Dengan demikian, kesimpulan ini berbeda dengan hipotesis penelitian.

Uji t terhadap pengaruh variabel investasi swasta terhadap perubahan PDRB. Nilai t hitung adalah 2.415966. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha=1\%$, $\alpha=5\%$, $\alpha=10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Kita menyimpulkan bahwa variabel investasi swasta signifikan pada $\alpha=1\%$. Artinya dengan tingkat signifikan 1%, kita percaya bahwa 99% dari kasus di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana investasi swasta berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB.

Uji t terhadap pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap perubahan PDRB. Nilai t hitung adalah 6.63671. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha=1\%$, $\alpha=5\%$, $\alpha=10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Dengan demikian, variabel jumlah penduduk signifikan pada $\alpha=1\%$. Artinya dengan tingkat signifikan 1%, kita percaya bahwa 99% dari kasus di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB.

Uji t terhadap pengaruh variabel dummy terhadap perubahan PDRB. Nilai t hitung adalah 0.80043. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha=1\%$, $\alpha=5\%$, $\alpha=10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Dari uji t, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel dummy tidak signifikan berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB. Artinya kita

percaya bahwa dari kasus pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana variabel dummy tidak berpengaruh terhadap perubahan PDRB.

Uji hipotesis koefisien secara menyeluruh dengan menggunakan uji F. Nilai F kritis pada $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan $df(4,93)$ diperoleh sebesar 3.48, 2.45 dan 1.99. Nilai F hitung sebesar 84.35738, yang berarti lebih besar dari nilai F kritis. Artinya belanja modal pemerintah, investasi swasta, jumlah penduduk dan dummy secara bersama-sama berpengaruh terhadap perubahan PDRB riil Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000-2006. Hal ini didukung oleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.79129.

Tanda parameter estimasi menunjukkan bahwa koefisien belanja modal pemerintah bertanda negatif. Hal ini berbeda dengan estimasi tanda pada hipotesis penelitian.

Slope koefisien belanja modal pemerintah sebesar -0.0514. Dengan model log-log pada spesifikasi model, slope koefisien belanja modal pemerintah menunjukkan elastisitas belanja modal pemerintah terhadap perubahan PDRB. Kita tidak mengartikan slope koefisien belanja modal pemerintah karena uji statistik tidak menunjukkan signifikan.

Slope koefisien investasi swasta sebesar 0.2. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa jika terjadi kenaikan (penurunan) investasi swasta sebesar 1% maka perubahan PDRB akan naik (turun) sebesar 0.2%. Sedangkan untuk slope koefisien jumlah penduduk sebesar 0.97. Dengan demikian, jika terjadi kenaikan (penurunan) jumlah penduduk sebesar 1% maka perubahan PDRB akan naik (turun) sebesar 0.97%.

Berdasarkan hasil regresi model diatas, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Dengan menggunakan metode common effect, variabel belanja modal pemerintah tidak signifikan berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB.

Hasil kesimpulan yang diperoleh dibandingkan dengan hipotesis dan tujuan penelitian pada bab I. Seperti yang diungkapkan pada bab IV, spesifikasi model untuk menjawab hipotesis penelitian.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, hipotesis penelitian ditolak karena

belanja modal pemerintah tidak signifikan berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB.

Dengan melihat kepada tujuan penelitian, kita dapat menyimpulkan besarnya belanja modal pemerintah tidak berpengaruh atau mempunyai pengaruh negatif terhadap perubahan PDRB.

Namun demikian, pada spesifikasi model diatas, kita belum memasukkan data kelambanan satu tahun pada belanja modal pemerintah sebagai variabel independen. Hasil regresi dengan menggunakan variabel belanja modal pemerintah kelambanan satu tahun yang disajikan pada tabel 5.2.

Tabel.5.2
Hasil Regresi Model

	Variabel Dependen: Ln(Perubahan PDRB)		
	CEM	FEM	REM
Konstanta	1.04E+01		
s.e	2.51E+00		
t statistik	4.129062		
Ln(Belanja Modal Pemerintah (t-1))	-7.54E-02		
s.e	1.05E-01		
t statistik	-0.720287		
Ln(Investasi Swasta (t-1))	8.60E-02		
s.e	7.91E-02		
t statistik	1.086916		
Ln(Jumlah Penduduk)	1.14E+00		
s.e	1.43E-01		
t statistik	7.973169		
Dummy	3.42E-01		
s.e	2.16E-01		
t statistik	1.585775		

Sumber: "telah diolah kembali"

Pada spesifikasi model ini, kita memfokuskan hubungan antara variabel belanja modal pemerintah (t-1), investasi swasta (t-1), jumlah penduduk dan dummy terhadap perubahan PDRB. Artinya kita akan menjawab hipotesis penelitian dengan menggunakan panel data.

Tabel.5.2
 Hasil Regresi Model
 “sambungan”

	Variabel Dependen: Ln(Perubahan PDRB)		
	CEM	FEM	REM
Fixed & Random Effects (Cross)			
KAB.AGAM—C			
KAB.LIMAPULUHKOTA—C			
KAB. PADANG PARIAMAN—C			
KAB. PASAMAN—C			
KAB.PESISIR SELATAN—C			
KAB. SAWAHLUNTO			
SIJUNJUNG—C			
KAB.SOLOK—C			
KAB. TANAH DATAR—C			
KOTA BUKITTINGGI—C			
KOTA PADANG—C			
KOTA PADANG PANJANG—C			
KOTA PAYAKUMBUH—C			
KOTA SAWAHLUNTO—C			
KOTA SOLOK—C			
Fixed Effects (Period)			
2000—C			
2001—C			
2002—C			
2003—C			
2004—C			
2005—C			
2006—C			
R ²	0.781093		
F statistik	79.39156		
S.E.E	5.47E-01		

Sumber: “telah diolah kembali”

Pada tabel 5.2., hasil regresi kolom pertama, kolom kedua dan kolom ketiga menggunakan variabel independen yang sama yaitu belanja modal pemerintah (t-1), investasi swasta (t-1), jumlah penduduk dan dummy untuk kabupaten dengan Kota. Perbedaannya adalah kolom pertama menggunakan metode common effect, kolom kedua menggunakan metode fixed effect dan kolom ketiga menggunakan metode random effect.

Namun demikian, hasil pengolahan data hanya dapat dilakukan dengan metode common effect.

Uji t dilakukan terhadap pengaruh variabel belanja modal pemerintah (t-1) terhadap perubahan PDRB. Nilai t hitung adalah -0.720287. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Dari uji t, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel belanja modal pemerintah (t-1) tidak signifikan berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB. Artinya kita percaya bahwa dari kasus pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana belanja modal pemerintah (t-1) tidak berpengaruh terhadap perubahan PDRB. Dengan demikian, kesimpulan ini berbeda dengan hipotesis penelitian.

Uji t terhadap pengaruh variabel investasi swasta (t-1) terhadap perubahan PDRB. Nilai t hitung adalah 1.086916. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Kita menyimpulkan bahwa variabel investasi swasta (t-1) tidak signifikan berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB. Artinya kita percaya bahwa dari kasus pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana investasi swasta (t-1) tidak berpengaruh terhadap perubahan PDRB.

Uji t terhadap pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap perubahan PDRB. Nilai t hitung adalah 7.973169. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Dengan demikian, variabel jumlah penduduk signifikan pada $\alpha = 1\%$. Artinya dengan tingkat signifikan 1%, kita percaya bahwa 99% dari kasus di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB.

Uji t terhadap pengaruh variabel dummy terhadap perubahan PDRB. Nilai t hitung adalah 1.585775. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Dengan demikian, variabel dummy signifikan pada $\alpha = 10\%$. Artinya dengan tingkat signifikan 10%, kita percaya bahwa 90% dari kasus di

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana variabel dummy berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB.

Uji hipotesis koefisien secara menyeluruh dengan menggunakan uji F. Nilai F kritis pada $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan $df(4,93)$ diperoleh sebesar 3.48, 2.45 dan 1.99. Nilai F hitung sebesar 79.39156, yang berarti lebih besar dari nilai F kritis. Artinya belanja modal pemerintah (t-1), investasi swasta (t-1), jumlah penduduk dan dummy secara bersama-sama berpengaruh terhadap perubahan PDRB riil Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000-2006. Hal ini didukung oleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.781093.

Tanda parameter estimasi menunjukkan bahwa koefisien belanja modal pemerintah (t-1) bertanda negatif. Hal ini berbeda dengan estimasi tanda pada hipotesis penelitian.

Kita tidak mengartikan slope koefisien belanja modal pemerintah (t-1) karena uji statistik tidak menunjukkan signifikan.

Slope koefisien investasi swasta (t-1) juga tidak diartikan karena tidak signifikan. Sedangkan untuk slope koefisien jumlah penduduk sebesar 1.14. Dengan demikian, jika terjadi kenaikan (penurunan) jumlah penduduk sebesar 1% maka perubahan PDRB akan naik (turun) sebesar 1.14%.

Berdasarkan hasil regresi model diatas, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Dengan menggunakan metode common effect, variabel belanja modal pemerintah (t-1) tidak signifikan berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB.

Hasil kesimpulan yang diperoleh dibandingkan dengan hipotesis dan tujuan penelitian pada bab I. Seperti yang diungkapkan pada bab IV, spesifikasi model untuk menjawab hipotesis penelitian.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, hipotesis penelitian ditolak karena belanja modal pemerintah (t-1) tidak signifikan berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB.

Dengan melihat kepada tujuan penelitian, kita dapat menyimpulkan besarnya belanja modal pemerintah (t-1) tidak berpengaruh atau mempunyai pengaruh negatif terhadap perubahan PDRB.

Kita melanjutkan analisis dengan menggunakan variabel kelambanan dua tahun pada belanja modal pemerintah sebagai variabel independen. Hasil regresi disajikan pada tabel 5.3.

Tabel.5.3
Hasil Regresi Model

	Variabel Dependen: Ln(Perubahan PDRB)		
	CEM	FEM	REM
Konstanta	8.49E+00		
s.e	2.21E+00		
t statistik	3.848728		
Ln(Belanja Modal Pemerintah (t-2))	-2.77E-02		
s.e	9.27E-02		
t statistik	-0.299058		
Ln(Investasi Swasta (t-2))	2.25E-01		
s.e	8.06E-02		
t statistik	2.795667		
Ln(Jumlah Penduduk)	9.21E-01		
s.e	1.46E-01		
t statistik	6.324998		
Dummy	1.17E-01		
s.e	2.13E-01		
t statistik	0.549692		

Sumber: "telah diolah kembali"

Pada spesifikasi model ini, kita memfokuskan hubungan antara variabel belanja modal pemerintah (t-2), investasi swasta (t-2), jumlah penduduk dan dummy terhadap perubahan PDRB. Artinya kita akan menjawab hipotesis penelitian dengan menggunakan panel data.

Pada tabel 5.3., hasil regresi kolom pertama, kolom kedua dan kolom ketiga menggunakan variabel independen yang sama yaitu belanja modal pemerintah (t-2), investasi swasta (t-2), jumlah penduduk dan dummy untuk kabupaten dengan Kota. Perbedaannya adalah kolom pertama menggunakan metode common effect, kolom kedua menggunakan metode fixed effect dan kolom ketiga menggunakan metode random effect.

Tabel.5.3.
Hasil Regresi Model
“sambungan”

	Variabel Dependen: Ln(Perubahan PDRB)		
	CEM	FEM	REM
Fixed & Random Effects (Cross)			
KAB.AGAM—C			
KAB.LIMAPULUHKOTA—C			
KAB. PADANG PARIAMAN—C			
KAB. PASAMAN—C			
KAB.PESISIR SELATAN—C			
KAB. SAWAHLUNTO			
SIJUNJUNG—C			
KAB.SOLOK—C			
KAB.TANAHDATAR—C			
KOTA BUKITTINGGI—C			
KOTA PADANG—C			
KOTA PADANG PANJANG—C			
KOTA PAYAKUMBUH—C			
KOTA SAWAHLUNTO—C			
KOTA SOLOK—C			
Fixed Effects (Period)			
2000—C			
2001—C			
2002—C			
2003—C			
2004—C			
2005—C			
2006—C			
R ²	0.795461		
F statistik	86.53102		
S.E.E	5.28E-01		

Sumber: “telah diolah kembali”

Namun demikian, hasil pengolahan data hanya dapat dilakukan dengan metode common effect.

Uji t dilakukan terhadap pengaruh variabel belanja modal pemerintah (t-2) terhadap perubahan PDRB. Nilai t hitung adalah -0.299058. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Dari uji t, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel belanja modal pemerintah (t-2) tidak signifikan berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB. Artinya kita percaya bahwa dari kasus pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana belanja modal pemerintah (t-2) tidak berpengaruh terhadap perubahan PDRB. Dengan demikian, kesimpulan ini berbeda dengan hipotesis penelitian.

Uji t terhadap pengaruh variabel investasi swasta (t-2) terhadap perubahan PDRB. Nilai t hitung adalah 2.795667. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Dengan demikian, variabel investasi swasta (t-2) signifikan pada $\alpha = 1\%$. Artinya dengan tingkat signifikan 1%, kita percaya bahwa 99% dari kasus di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana investasi swasta (t-2) berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB.

Uji t terhadap pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap perubahan PDRB. Nilai t hitung adalah 6.324998. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Dengan demikian, variabel jumlah penduduk signifikan pada $\alpha = 1\%$. Artinya dengan tingkat signifikan 1%, kita percaya bahwa 99% dari kasus di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB.

Uji t terhadap pengaruh variabel dummy terhadap perubahan PDRB. Nilai t hitung adalah 0.549692. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Dari uji t, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel dummy tidak signifikan berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB. Artinya kita percaya bahwa dari kasus pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana variabel dummy tidak berpengaruh terhadap perubahan PDRB.

Uji hipotesis koefisien secara menyeluruh dengan menggunakan uji F. Nilai F kritis pada $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan df(4,93) diperoleh sebesar 3.48, 2.45 dan 1.99. Nilai F hitung sebesar 86.53102, yang berarti lebih besar dari nilai F kritis. Artinya belanja modal pemerintah (t-2), investasi swasta (t-2), jumlah penduduk dan dummy secara bersama-sama berpengaruh

terhadap perubahan PDRB riil Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000-2006. Hal ini didukung oleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.795461.

Tanda parameter estimasi menunjukkan bahwa koefisien belanja modal pemerintah (t-2) bertanda negatif. Hal ini berbeda dengan estimasi tanda pada hipotesis penelitian.

Kita tidak mengartikan slope koefisien belanja modal pemerintah (t-2) karena uji statistik tidak menunjukkan signifikan.

Slope koefisien investasi swasta (t-2) sebesar 0.225. Dengan demikian, jika terjadi kenaikan (penurunan) investasi swasta (t-2) sebesar 1% maka perubahan PDRB akan naik (turun) sebesar 0.225%.

Sedangkan untuk slope koefisien jumlah penduduk sebesar 0.921. Dengan demikian, jika terjadi kenaikan (penurunan) jumlah penduduk sebesar 1% maka perubahan PDRB akan naik (turun) sebesar 0.921%.

Berdasarkan hasil regresi model diatas, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Dengan menggunakan metode common effect, variabel belanja modal pemerintah (t-2) tidak signifikan berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB.

Hasil kesimpulan yang diperoleh dibandingkan dengan hipotesis dan tujuan penelitian pada bab I. Seperti yang diungkapkan pada bab IV, spesifikasi model untuk menjawab hipotesis penelitian.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, hipotesis penelitian ditolak karena belanja modal pemerintah (t-2) tidak signifikan berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB.

Dengan melihat kepada tujuan penelitian, kita dapat menyimpulkan besarnya belanja modal pemerintah (t-2) tidak berpengaruh atau mempunyai pengaruh negatif terhadap perubahan PDRB.

Kita melakukan regresi tambahan dengan menggunakan Produk Domestik Bruto sebagai variabel dependen. Tujuannya adalah melihat hubungan antara variabel belanja modal pemerintah, investasi swasta, dan jumlah penduduk terhadap PDRB

Pada regresi awal, kita memfokuskan hubungan antara variabel belanja

modal pemerintah, investasi swasta, jumlah penduduk dan dummy terhadap PDRB. Artinya kita akan menjawab hipotesis penelitian dengan menggunakan panel data. Hasil regresi disajikan pada tabel 5.4.

Tabel.5.4.
Hasil Regresi Model

	Variabel Dependen: Ln(PDRB)		
	CEM	FEM	REM
Konstanta	1.34E+01		1.51E+01
s.e	8.72E-01		1.17E+00
t statistik	15.39194		12.87301
Ln(Belanja Modal Pemerintah)	-2.66E-03		-2.04E-03
s.e	3.61E-02		1.37E-02
t statistik	-0.073837		-0.148717
Ln(Investasi Swasta)	4.75E-02		3.73E-02
s.e	2.49E-02		1.19E-02
t statistik	1.906346		3.130118
Ln(Jumlah Penduduk)	1.06E+00		9.52E-01
s.e	4.40E-02		9.28E-02
t statistik	24.17934		10.25932
Dummy	5.25E-01		3.60E-01
s.e	6.52E-02		1.91E-01
t statistik	8.043998		1.886396

Sumber: “telah diolah kembali”

Pada tabel 5.4., hasil regresi kolom pertama, kolom kedua dan kolom ketiga menggunakan variabel independen yang sama yaitu belanja modal pemerintah, investasi swasta, jumlah penduduk dan dummy untuk Kabupaten dengan Kota. Perbedaannya adalah kolom pertama menggunakan metode common effect, kolom kedua menggunakan metode fixed effect dan kolom ketiga menggunakan metode random effect.

Kita hanya memperoleh hasil pengolahan data dari metode common effect, dan random effect. Metode manakah dari common effect atau random effect yang paling tepat digunakan untuk menjawab hubungan antara variabel belanja modal pemerintah, investasi swasta, jumlah penduduk dan dummy

terhadap PDRB. Kita akan menguji untuk hasil regresi model diantara kolom pertama, dan kolom ketiga.

Tabel.5.4.
Hasil Regresi Model
“sambungan”

	Variabel Dependen: Ln(PDRB)		
	CEM	FEM	REM
Fixed & Random Effects (Cross)			
KAB.AGAM—C			2.31E-02
KAB.LIMPULUHKOTA—C			2.28E-01
KAB. PADANG PARIAMAN—C			9.93E-02
KAB. PASAMAN—C			-2.41E-03
KAB.PESISIR SELATAN—C			-2.68E-01
KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG—C			-8.45E-03
KAB.SOLOK—C			-1.76E-01
KAB. TANAH DATAR—C			1.04E-01
KOTA BUKITTINGGI—C			-6.15E-02
KOTA PADANG—C			3.66E-01
KOTA PADANG PANJANG— C			-1.23E-01
KOTA PAYAKUMBUH—C			-2.35E-01
KOTA SAWAHLUNTO—C			1.22E-01
KOTA SOLOK—C			-6.87E-02
Fixed Effects (Period)			
2000—C			-6.14E-02
2001—C			-4.49E-02
2002—C			-0.028376
2003—C			-0.014205
2004—C			0.010855
2005—C			0.050439
2006—C			0.087547
R ²	0.968195		0.670094
F statistik	707.7716		4.72E+01
S.E.E	1.66E-01		0.039219

Sumber: “telah diolah kembali”

Kita melakukan uji signifikansi antara metode common effect (kolom pertama) dan metode random effect (kolom ketiga) dengan melakukan perhitungan statistik LM sebagai berikut:

$$LM = \frac{14(7)}{2(7-1)} \left[\frac{1,43E-01}{2,571788} - 1 \right]^2 = 7,283428$$

Nilai kritis tabel distribusi chi squares dengan df sebesar 4 pada $\alpha = 1\%$ dan $\alpha = 5\%$ sebesar 13.2767 dan 9.43773. Karena nilai F hitung lebih kecil dari nilai F kritis berarti metode common effect lebih baik dari metode random effect. Dari uji tersebut, kita akan menggunakan metode common effect.

Uji t dilakukan terhadap pengaruh variabel belanja modal pemerintah terhadap PDRB. Nilai t hitung adalah -0.073837. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Dari uji t, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel belanja modal pemerintah tidak signifikan berpengaruh positif terhadap PDRB. Artinya kita percaya bahwa dari kasus pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana belanja modal pemerintah tidak berpengaruh terhadap PDRB.

Uji t terhadap pengaruh variabel investasi swasta terhadap PDRB. Nilai t hitung adalah 1.906346. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Kita menyimpulkan bahwa variabel investasi swasta signifikan pada $\alpha = 5\%$. Artinya dengan tingkat signifikan 5%, kita percaya bahwa 95% dari kasus di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana investasi swasta berpengaruh positif terhadap PDRB.

Uji t terhadap pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap PDRB. Nilai t hitung adalah 24.17934. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Dengan demikian, variabel jumlah penduduk signifikan pada $\alpha = 1\%$. Artinya dengan tingkat signifikan 1%, kita percaya bahwa 99% dari kasus di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PDRB.

Uji t terhadap pengaruh variabel dummy terhadap perubahan PDRB. Nilai t hitung adalah 8.043998. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Dengan demikian, variabel dummy signifikan pada $\alpha = 1\%$. Artinya

dengan tingkat signifikan 1%, kita percaya bahwa 99% dari kasus di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana variabel dummy berpengaruh positif terhadap PDRB.

Uji hipotesis koefisien secara menyeluruh dengan menggunakan uji F. Nilai F kritis pada $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan $df(4,93)$ diperoleh sebesar 3.48, 2.45 dan 1.99. Nilai F hitung sebesar 707.7716, yang berarti lebih besar dari nilai F kritis. Artinya belanja modal pemerintah, investasi swasta, jumlah penduduk dan dummy secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB riil Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000-2006. Hal ini didukung oleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.968195.

Tanda parameter estimasi menunjukkan bahwa koefisien belanja modal pemerintah bertanda negatif. Hal ini berbeda dengan estimasi tanda pada hipotesis penelitian.

Slope koefisien belanja modal pemerintah sebesar -0.00266. Dengan model log-log pada spesifikasi model, slope koefisien belanja modal pemerintah menunjukkan elastisitas belanja modal pemerintah terhadap PDRB. Kita tidak mengartikan slope koefisien belanja modal pemerintah karena uji statistik tidak menunjukkan signifikan.

Slope koefisien investasi swasta sebesar 0.0475. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa jika terjadi kenaikan (penurunan) investasi swasta sebesar 1% maka PDRB akan naik (turun) sebesar 0.0475%. Sedangkan untuk slope koefisien jumlah penduduk sebesar 1.066. Dengan demikian, jika terjadi kenaikan (penurunan) jumlah penduduk sebesar 1% maka PDRB akan naik (turun) sebesar 1.066%.

Berdasarkan hasil regresi model diatas, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Dengan menggunakan metode common effect, variabel belanja modal pemerintah tidak signifikan berpengaruh positif terhadap PDRB.

Hasil kesimpulan yang diperoleh dibandingkan dengan hipotesis dan tujuan penelitian pada bab I. Seperti yang diungkapkan pada bab IV, spesifikasi model untuk menjawab hipotesis penelitian.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, hipotesis penelitian ditolak karena belanja modal pemerintah tidak signifikan berpengaruh positif terhadap

PDRB.

Dengan melihat kepada tujuan penelitian, kita dapat menyimpulkan besarnya belanja modal pemerintah tidak berpengaruh atau mempunyai pengaruh negatif terhadap PDRB.

Namun demikian, spesifikasi model diatas belum memasukkan data kelambanan satu atau dua tahun pada belanja modal pemerintah. Kita menambahkan variabel kelambanan satu tahun pada belanja modal pemerintah sebagai variabel independen, sebagaimana hasil regresi yang disajikan pada tabel 5.5.

Tabel.5.5.
Hasil Regresi Model

	Variabel Dependen: Ln(PDRB)		
	CEM	FEM	REM
Konstanta	1.35E+01		1.40E+01
s.e	7.29E-01		1.18E+00
t statistik	18.4681		11.83116
Ln(Belanja Modal Pemerintah (t-1))	-8.16E-03		3.08E-03
s.e	3.07E-02		1.26E-02
t statistik	-0.266332		0.244571
Ln(Investasi Swasta (t-1))	5.98E-02		5.18E-02
s.e	2.29E-02		1.23E-02
t statistik	2.607759		4.206078
Ln(Jumlah Penduduk)	1.05E+00		1.00E+00
s.e	4.12E-02		9.65E-02
t statistik	25.39157		10.37589
Dummy	5.01E-01		4.38E-01
s.e	6.36E-02		1.99E-01
t statistik	7.86443		2.20314

Sumber: "telah diolah kembali"

Dengan demikian kita memfokuskan hubungan antara variabel belanja modal pemerintah (t-1), investasi swasta (t-1), jumlah penduduk dan dummy terhadap PDRB. Artinya kita akan menjawab hipotesis penelitian dengan menggunakan panel data.

Tabel.5.5.
Hasil Regresi Model
“sambungan”

	Variabel Dependen: Ln(PDRB)		
	CEM	FEM	REM
Fixed & Random Effects (Cross)			
KAB.AGAM—C			2.29E-02
KAB.LIMAPULUHKOTA—C			2.52E-01
KAB. PADANG PARIAMAN—C			9.70E-02
KAB. PASAMAN—C			-2.88E-02
KAB.PESISIR SELATAN—C			-2.53E-01
KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG—C			-2.17E-02
KAB.SOLOK—C			-1.90E-01
KAB. TANAHDATAR—C			1.22E-01
KOTA BUKITTINGGI—C			-6.57E-02
KOTA PADANG—C			2.20E-01
KOTA PADANG PANJANG— C			-6.11E-02
KOTA PAYAKUMBUH—C			-2.33E-01
KOTA SAWAHLUNTO—C			1.60E-01
KOTA SOLOK—C			-1.99E-02
Fixed Effects (Period)			
2000—C			-3.58E-02
2001—C			-3.34E-02
2002—C			-3.02E-02
2003—C			-0.011518
2004—C			0.004944
2005—C			0.043247
2006—C			0.062709
R ²	0.969212		0.700398
F statistik	731.9035		54.35308
S.E.E	1.64E-01		0.041913

Sumber: “telah diolah kembali”

Pada tabel 5.5., hasil regresi kolom pertama, kolom kedua dan kolom ketiga menggunakan variabel independen yang sama yaitu belanja modal pemerintah (t-1), investasi swasta (t-1), jumlah penduduk dan dummy untuk Kabupaten dengan Kota. Perbedaannya adalah kolom pertama menggunakan metode common effect, kolom kedua menggunakan metode fixed effect dan kolom ketiga menggunakan metode random effect.

Kita hanya memperoleh hasil pengolahan data dari metode common effect, dan random effect. Metode manakah dari common effect atau random effect yang paling tepat digunakan untuk menjawab hubungan antara variabel belanja modal pemerintah (t-1), investasi swasta (t-1), jumlah penduduk dan dummy terhadap PDRB. Kita akan menguji untuk hasil regresi model diantara kolom pertama, dan kolom ketiga.

Kita melakukan uji signifikansi antara metode common effect (kolom pertama) dan metode random effect (kolom ketiga) dengan melakukan perhitungan statistik LM sebagai berikut:

$$LM = \frac{14(7)}{2(7-1)} \left[\frac{0.16337}{2,489603} - 1 \right]^2 = 7,130025$$

Nilai kritis tabel distribusi chi squares dengan df sebesar 4 pada $\alpha = 1\%$ dan $\alpha = 5\%$ sebesar 13.2767 dan 9.43773. Karena nilai F hitung lebih kecil dari nilai F kritis berarti metode common effect lebih baik dari metode random effect. Dari uji tersebut, kita akan menggunakan metode common effect.

Uji t dilakukan terhadap pengaruh variabel belanja modal pemerintah (t-1) terhadap PDRB. Nilai t hitung adalah -0.266332. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Dari uji t, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel belanja modal pemerintah (t-1) tidak signifikan berpengaruh positif terhadap PDRB. Artinya kita percaya bahwa dari kasus pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana belanja modal pemerintah (t-1) tidak berpengaruh terhadap PDRB.

Uji t terhadap pengaruh variabel investasi swasta (t-1) terhadap PDRB. Nilai t hitung adalah 2.607759. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Kita menyimpulkan bahwa variabel investasi swasta (t-1) signifikan pada $\alpha = 1\%$. Artinya dengan tingkat signifikan 1%, kita percaya bahwa 99% dari kasus di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana investasi swasta (t-1) berpengaruh positif terhadap PDRB.

Uji t terhadap pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap PDRB.

Nilai t hitung adalah 25.39157. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha=1\%$, $\alpha=5\%$, $\alpha=10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Dengan demikian, variabel jumlah penduduk signifikan pada $\alpha=1\%$. Artinya dengan tingkat signifikan 1%, kita percaya bahwa 99% dari kasus di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PDRB.

Uji t terhadap pengaruh variabel dummy terhadap perubahan PDRB. Nilai t hitung adalah 7.86443. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha=1\%$, $\alpha=5\%$, $\alpha=10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Dengan demikian, variabel dummy signifikan pada $\alpha=1\%$. Artinya dengan tingkat signifikan 1%, kita percaya bahwa 99% dari kasus di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana variabel dummy berpengaruh positif terhadap PDRB.

Uji hipotesis koefisien secara menyeluruh dengan menggunakan uji F. Nilai F kritis pada $\alpha=1\%$, $\alpha=5\%$, $\alpha=10\%$ dengan df(4,93) diperoleh sebesar 3.48, 2.45 dan 1.99. Nilai F hitung sebesar 731.9035, yang berarti lebih besar dari nilai F kritis. Artinya belanja modal pemerintah (t-1), investasi swasta (t-1), jumlah penduduk dan dummy secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB riil Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000-2006. Hal ini didukung oleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.969212.

Tanda parameter estimasi menunjukkan bahwa koefisien belanja modal pemerintah (t-1) bertanda negatif. Hal ini berbeda dengan estimasi tanda pada hipotesis penelitian.

Slope koefisien belanja modal pemerintah (t-1) sebesar -0.00816. Dengan model log-log pada spesifikasi model, slope koefisien belanja modal pemerintah menunjukkan elastisitas belanja modal pemerintah (t-1) terhadap PDRB. Kita tidak mengartikan slope koefisien belanja modal pemerintah (t-1) karena uji statistik tidak menunjukkan signifikan.

Slope koefisien investasi swasta (t-1) sebesar 0.0598. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa jika terjadi kenaikan (penurunan) investasi swasta (t-1) sebesar 1% maka PDRB akan naik (turun) sebesar

0.0598%. Sedangkan untuk slope koefisien jumlah penduduk sebesar 1.05. Dengan demikian, jika terjadi kenaikan (penurunan) jumlah penduduk sebesar 1% maka PDRB akan naik (turun) sebesar 1.05%.

Berdasarkan hasil regresi model diatas, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Dengan menggunakan metode common effect, variabel belanja modal pemerintah (t-1) tidak signifikan berpengaruh positif terhadap PDRB.

Hasil kesimpulan yang diperoleh dibandingkan dengan hipotesis dan tujuan penelitian pada bab I. Seperti yang diungkapkan pada bab IV, spesifikasi model untuk menjawab hipotesis penelitian.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, hipotesis penelitian ditolak karena belanja modal pemerintah (t-1) tidak signifikan berpengaruh positif terhadap PDRB.

Dengan melihat kepada tujuan penelitian, kita dapat menyimpulkan besarnya belanja modal pemerintah (t-1) tidak berpengaruh atau mempunyai pengaruh negatif terhadap PDRB.

Kita melanjutkan dengan menambahkan variabel kelambanan dua tahun pada belanja modal pemerintah sebagai variabel independen, sebagaimana hasil regresi yang disajikan pada tabel 5.6.

Dengan demikian kita memfokuskan hubungan antara variabel belanja modal pemerintah (t-2), investasi swasta (t-2), jumlah penduduk dan dummy terhadap PDRB. Artinya kita akan menjawab hipotesis penelitian dengan menggunakan panel data.

Pada tabel 5.6., hasil regresi kolom pertama, kolom kedua dan kolom ketiga menggunakan variabel independen yang sama yaitu belanja modal pemerintah (t-2), investasi swasta (t-2), jumlah penduduk dan dummy untuk Kabupaten dengan Kota. Perbedaannya adalah kolom pertama menggunakan metode common effect, kolom kedua menggunakan metode fixed effect dan kolom ketiga menggunakan metode random effect.

Kita hanya memperoleh hasil pengolahan data dari metode common effect, dan random effect. Metode manakah dari common effect atau random effect yang paling tepat digunakan untuk menjawab hubungan antara variabel belanja modal pemerintah (t-2), investasi swasta (t-2), jumlah penduduk dan

dummy terhadap PDRB. Kita akan menguji untuk hasil regresi model diantara kolom pertama, dan kolom ketiga.

Tabel.5.6.
Hasil Regresi Model

	Variabel Dependen: Ln(PDRB)		
	CEM	FEM	REM
Konstanta	1.27E+01		1.54E+01
s.e	6.59E-01		1.10E+00
t statistik	19.28177		14.04559
Ln(Belanja Modal Pemerintah (t-2))	3.03E-02		1.49E-02
s.e	2.80E-02		1.23E-02
t statistik	1.082956		1.210616
Ln(Investasi Swasta (t-2))	5.64E-02		1.44E-02
s.e	2.40E-02		1.36E-02
t statistik	2.349742		1.052701
Ln(Jumlah Penduduk)	1.04E+00		9.45E-01
s.e	4.31E-02		8.62E-02
t statistik	24.16785		10.96367
Dummy	5.14E-01		3.51E-01
s.e	6.48E-02		1.74E-01
t statistik	7.936684		2.018182

Sumber: “telah diolah kembali”

Kita melakukan uji signifikansi antara metode common effect (kolom pertama) dan metode random effect (kolom ketiga) dengan melakukan perhitungan statistik LM sebagai berikut:

$$LM = \frac{14(7)}{2(7-1)} \left[\frac{0,136815}{2,474332} - 1 \right]^2 = 7,288505$$

Nilai kritis tabel distribusi chi squares dengan df sebesar 4 pada $\alpha = 1\%$ dan $\alpha = 5\%$ sebesar 13.2767 dan 9.43773. Karena nilai F hitung lebih kecil dari nilai F kritis berarti metode common effect lebih baik dari metode random effect. Dari uji tersebut, kita akan menggunakan metode common effect.

Tabel.5.6.
Hasil Regresi Model
“sambungan”

	Variabel Dependen: Ln(PDRB)		
	CEM	FEM	REM
Fixed & Random Effects (Cross)			
KAB.AGAM—C			1.65E-02
KAB.LIMAPULUHKOTA—C			2.05E-01
KAB. PADANG PARIAMAN— C			8.84E-02
KAB. PASAMAN—C			2.21E-02
KAB.PESISIR SELATAN—C			-2.84E-01
KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG—C			1.41E-02
KAB.SOLOK—C			-1.58E-01
KAB. TANAH DATAR—C			9.54E-02
KOTA BUKITTINGGI—C			-4.94E-02
KOTA PADANG—C			4.37E-01
KOTA PADANG PANJANG—C			-1.53E-01
KOTA PAYAKUMBUH—C			-2.48E-01
KOTA SAWAHLUNTO—C			9.95E-02
KOTA SOLOK—C			-8.67E-02
Fixed Effects (Period)			
2000—C			-6.40E-02
2001—C			-3.62E-02
2002—C			-3.55E-02
2003—C			-0.019013
2004—C			0.007623
2005—C			0.053581
2006—C			0.093533
R ²	0.9694		0.689968
F statistik	736.564		51.74218
S.E.E	1.63E-01		0.038355

Sumber: “telah diolah kembali”

Uji t dilakukan terhadap pengaruh variabel belanja modal pemerintah (t-2) terhadap PDRB. Nilai t hitung adalah 1.082956. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Dari uji t, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel belanja modal pemerintah (t-2) tidak signifikan berpengaruh positif terhadap PDRB. Artinya kita percaya bahwa dari kasus pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera

Barat dimana belanja modal pemerintah (t-2) tidak berpengaruh terhadap PDRB.

Uji t terhadap pengaruh variabel investasi swasta (t-2) terhadap PDRB. Nilai t hitung adalah 2.349742. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Kita menyimpulkan bahwa variabel investasi swasta (t-2) signifikan pada $\alpha = 5\%$. Artinya dengan tingkat signifikan 5%, kita percaya bahwa 95% dari kasus di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana investasi swasta (t-2) berpengaruh positif terhadap PDRB.

Uji t terhadap pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap PDRB. Nilai t hitung adalah 24.16785. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Dengan demikian, variabel jumlah penduduk signifikan pada $\alpha = 1\%$. Artinya dengan tingkat signifikan 1%, kita percaya bahwa 99% dari kasus di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PDRB.

Uji t terhadap pengaruh variabel dummy terhadap perubahan PDRB. Nilai t hitung adalah 7.936684. Sedangkan nilai t table untuk $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan df 93 sebesar 2.358, 1.658 dan 1.289.

Dengan demikian, variabel dummy signifikan pada $\alpha = 1\%$. Artinya dengan tingkat signifikan 1%, kita percaya bahwa 99% dari kasus di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dimana variabel dummy berpengaruh positif terhadap PDRB.

Uji hipotesis koefisien secara menyeluruh dengan menggunakan uji F. Nilai F kritis pada $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$ dengan df(4,93) diperoleh sebesar 3.48, 2.45 dan 1.99. Nilai F hitung sebesar 736.564, yang berarti lebih besar dari nilai F kritis. Artinya belanja modal pemerintah (t-2), investasi swasta (t-2), jumlah penduduk dan dummy secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB riil Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000-2006. Hal ini didukung oleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9694.

Tanda parameter estimasi menunjukkan bahwa koefisien belanja modal pemerintah (t-2) bertanda negatif. Hal ini berbeda dengan estimasi tanda pada

hipotesis penelitian.

Slope koefisien belanja modal pemerintah (t-2) sebesar -0.0303. Dengan model log-log pada spesifikasi model, slope koefisien belanja modal pemerintah menunjukkan elastisitas belanja modal pemerintah (t-2) terhadap PDRB. Kita tidak mengartikan slope koefisien belanja modal pemerintah (t-2) karena uji statistik tidak menunjukkan signifikan.

Slope koefisien investasi swasta (t-2) sebesar 0.0564. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa jika terjadi kenaikan (penurunan) investasi swasta (t-1) sebesar 1% maka PDRB akan naik (turun) sebesar 0.0564%. Sedangkan untuk slope koefisien jumlah penduduk sebesar 1.04. Dengan demikian, jika terjadi kenaikan (penurunan) jumlah penduduk sebesar 1% maka PDRB akan naik (turun) sebesar 1.04%.

Berdasarkan hasil regresi model diatas, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Dengan menggunakan metode common effect, variabel belanja modal pemerintah (t-2) tidak signifikan berpengaruh positif terhadap PDRB.

Hasil kesimpulan yang diperoleh dibandingkan dengan hipotesis dan tujuan penelitian pada bab I. Seperti yang diungkapkan pada bab IV, spesifikasi model untuk menjawab hipotesis penelitian.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, hipotesis penelitian ditolak karena belanja modal pemerintah (t-2) tidak signifikan berpengaruh positif terhadap PDRB.

Dengan melihat kepada tujuan penelitian, kita dapat menyimpulkan besarnya belanja modal pemerintah (t-2) tidak berpengaruh atau mempunyai pengaruh negatif terhadap PDRB.

5.2. Analisis Uji Asumsi Dasar.

Kita dapat melakukan uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi dari spesifikasi model yang digunakan. Dari hasil uji, menunjukkan tidak terdapat masalah multikolinieritas, heterokedastisitas dan autokorelasi.

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan.

Tesis ini bertujuan untuk melihat pengaruh Belanja Modal Pemerintah terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (2000-2006).

Berdasarkan tujuan penelitian, telah dimunculkan hipotesis menyangkut dengan besarnya Belanja Modal Pemerintah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun (2000-2006). Hasil analisis regresi menunjukkan Belanja Modal Pemerintah tidak signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB. Hal ini didukung oleh uji statistik dimana belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB.

Dengan demikian hipotesis penelitian, dimana Belanja Modal Pemerintah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun (2000-2006) tidak sesuai dengan hasil penelitian. Ini berarti, hipotesis penelitian ditolak berdasarkan hasil analisis regresi.

Hal ini disebabkan oleh belanja modal pemerintah kabupaten/kota tidak berpengaruh cukup besar pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Dari analisis belanja modal Kabupaten/Kota untuk tahun 2000-2006, lebih banyak dialokasikan kepada belanja modal transportasi. Disisi lain pertumbuhan PDRB lebih besar di sektor pertanian namun tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan Belanja Modal Pemerintah. Dengan demikian dapat kita simpulkan, pengeluaran belanja modal transportasi tidak dialokasikan lebih besar kepada pembangunan sarana transportasi ke daerah-daerah produksi pertanian namun untuk perbaikan infrastruktur transportasi yang sudah ada seperti pemeliharaan sarana jalan. Selain belanja modal pemerintah kabupaten/kota, belanja modal pemerintah provinsi pada Kabupaten/Kota dan belanja modal pemerintah pusat pada Kabupaten/Kota juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, Belanja Modal Pemerintah Propinsi pada

Kabupaten/Kota maupun Belanja Modal Pemerintah Pusat pada Kabupaten/Kota tidak dimasukkan sebagai variabel independen pada penelitian ini.

6.2. Saran Untuk Studi Lebih Lanjut.

Dampak Belanja Modal Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, menunjukkan hasil yang berbeda untuk berbagai penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, penelitian sebaiknya mencakup rentang waktu sekitar 20 atau 30 tahun. Oleh karenanya, penulis menyarankan bagi yang tertarik dengan kajian ini, untuk menggunakan rentang waktu yang lebih panjang.

Ruang lingkup penelitian dapat diperluas sehingga hasil analisis lebih lengkap. Analisis dapat dilakukan antara propinsi, maupun antara kabupaten/kota dari propinsi yang berbeda.

Kemudian variabel-variabel lain dapat dimasukkan seperti data perdagangan antar daerah dan ekspor daerah.

6.3. Rekomendasi Kebijakan.

Era setelah otonomi daerah, dimana peran pemerintah daerah dituntut mengelola tanggung jawab keuangan yang lebih besar. Sejalan dengan hal tersebut maka sepantasnya pemerintah daerah berusaha menggerakkan investasi daerah baik dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota maupun sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Beberapa hal yang menjadi saran dari penulis sebagai berikut:

- a) Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, tidak dapat bergantung kepada konsumsi pemerintah dan swasta. Dorongan lebih besar berasal dari belanja modal pemerintah dan investasi swasta disebabkan dorongan dari konsumsi dibatasi oleh besarnya pendapatan yang tentunya tergantung kepada besarnya Produk Domestik Regional Bruto.
- b) Belanja Modal pemerintah sangat dibatasi oleh sumber penerimaan yang lebih banyak berasal dari pemerintah pusat. Ditambah lagi, sumber penerimaan tersebut lebih banyak tersedot untuk belanja rutin

sehingga alokasi anggaran untuk Belanja Modal Pemerintah menjadi terbatas. Dengan Belanja Modal Pemerintah yang tersedia, seharusnya dialokasikan secara tepat kepada proyek investasi yang mempunyai dampak multiplier yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal lebih diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang menopang pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan jalan ke daerah-daerah produksi.

- c) Untuk meningkatkan investasi swasta dengan jalan peningkatan penyediaan fasilitas untuk mendorong investasi swasta tersebut. Fasilitas yang dimaksud seperti: peraturan daerah yang jelas tentang investasi, kemudahan investasi, penyediaan informasi yang jelas dan akurat tentang peluang investasi, dan yang tidak kalah pentingnya iklim yang kondusif untuk investasi swasta seperti keamanan.

DAFTAR REFERENSI

- Amarullah, T. *Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia*. Tesis Program MPKP. Universitas Indonesia, 2006.
- Aschauer, D.A. "Is Public Investment Productive?." *Journal of Monetary Economics* 23(1989). 177-200.
- Azwar. *Analisis Peranan Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Kesempatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Suatu Studi Empiris*. Tesis Program MPKP. Universitas Indonesia, 2000.
- Baltagi, B. and Pinnoi, N. "Public Capital Stock and State Productive Growth: Further Evidence from an Error Components model." *Empirical Economics* 20:2 (1995). 351-359.
- Baltagi, B. *Econometric Analysis of Panel Data*, New York: John Wiley and Sons, 1995.
- Barro, R.J, "Economic Growth in a Cross Section of Countries," *Quarterly Journal of Economics* (1991B). 407-443.
- Barth, J. and Cordes, J., "Substitutability, Complementarity, and The Impact of Government Spending on Economic Activity." *Journal of Economic and Business* Spring/Summer(1980). 235-242.
- Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Statistik Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006*.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Biro Pusat Statistik Sumatera Barat. *Sumbar Dalam Angka Tahun 2000-2006*.
- Bank Indonesia Cabang Padang, *Statistik Keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006*.
- Biro Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2001-2003*.
- Biro Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2003-2004*.
- Biro Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2004-2005*.

- Biro Pusat Statistik Sumatera Barat. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2006*.
- Biro Pusat Statistik Sumatera Barat. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2000-2002*.
- Biro Pusat Statistik Sumatera Barat. *PDRB menurut Kabupaten/Kota Tahun 2002-2006*.
- Biro Pusat Statistik Sumatera Barat. *PDRB menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000-2004*.
- Biro Pusat Statistik Sumatera Barat. *PDRB menurut Kabupaten/Kota Tahun 1997-1999*.
- Cashin, P. "Government Spending, Taxes, and Economic Growth." *IMF Staff Papers* 42 June(1995). 237-269.
- Chen, S.T. and Lee C.C. "Government Size and Economic Growth in Taiwan: A Threshold Regression Approach." *Journal of Policy Modeling* 27(2005). 1051-1066.
- Devarajan, S., Swaroop, V. and Zhou, H. "The Composition of Public Expenditure and Economic Growth." *Journal of Monetary Economics* 37:3(1996). 313-344.
- Easterly, W. and Rebelo, S. "Fiscal Policy and Economic Growth." *Journal of Monetary Economics* 32:3(1993). 417-458.
- Erden, L. and Holcombe, R.G. "The Linkage Between Public and Private Investment: A Co-Integration Analysis of A Panel of Developing Countries." *Eastern Economic Journal* 32:3(2006). 479.
- Gonzales-Paramo, J.M. and Martinez, D. "Convergence across Spanish Regions: New Evidence on the Effect of Public Investment" *Review of Regional Studies* 33(2003). 184-205.
- Gujarati, D.N. *Basic Econometric*. New York: Mc Graw-Hill, 2003.
- Hendry, D.F. and Richard, J.F. "The Econometric Analysis of Economic Time Series" *International Statistical Review* 51(1983). 3-33.
- Holtz-Eakin, D. "Public Sector Capital and The Productive Puzzle." *Review Economics and Statistics* February(1994). 12-21.
- Jorgenson, D."Fragile Statistical foundation; The Macroeconomics of Public

- Infrastructure Investment.” Paper presented at Infrastructure Needs and Policy Options for the 90’s, February 1991. Washington, .D.C.: American Enterprise Institute, 1991.
- Karim, S. *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Tesis Program MPKP. Universitas Indonesia, 2007.
- Kelly, T. “Public Investment and Growth: Testing The Non-Linearity Hypothesis.” *International Review of Applied Economics* 11:2(1997). 249.
- Khan, M.S. and Kumar, M.S. “Public Investment, Productivity, and Economic Growth in Developing Countries.” *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 9:3(1997). 440-466.
- Lin, S.A. “Government Spending and Economic Growth.” *Applied Economics* 26 (1994). 83-94.
- Looney, R. *Economic Policymaking in Mexico*. Durnham, N.C.: Duke University Press, 1985.
- Munnell, A. “Why Has Productivity Growth Declined? Productivity and Public Investment.” *New England Economic Review* Boston: Federal Reserve Bank of Boston January/February(1990), 3-22.
- Pascual, M and Alvares-Garcia, S. “Government Spending and Economic Growth in The European Countries : An Empirical Approach.”
< <http://papers.ssrn.com>>.
- Ram, R. “Government Size and Economic Growth: A New Framework and some Evidence from Cross-Section and Time-Series Data.” *American Economic Review* 76(1986). 191-203.
- Ramirez, M. D. “Stabilization and Trade Reform in Mexico: 1983-1989.” *Journal of Developing Areas* 24 Desember(1993). 173-199.
- . “Public and Private Investment in Mexico, 1950-1990: An Empirical Analysis” *Southern Economic Journal* 61:1(1994). 1-17.
- Razmi, N. and Ramirez, M.D. “Public and Private Investment and Economic Growth in Mexico.” *Contemporary Economic Policy* 15:1(1997). 65.
- Riedel, J. *Public Investment and Growth in Latin America*. Baltimore, Md: The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Draft Manuscript, 1992.

- Robles, B.S. "Infrastrucutre Invesment and Growth: Some Empirical Evidence." *Contemporary Economic Policy* Jan(1998). 98-108.
- Shah, A. "Public Infrastructure and Private Sector Profitability and Productivity in Mexico." *The World Bank, Working Paper* No.100, September 1988, (1988), 1-37.
- Widarjono, A. *Ekonometrika : Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- World Bank. *World Development Report*. Washington, D.C.: 1994.
- "Bidang Perdagangan dan Jasa." (2008).
< <http://www.bukittinggikota.go.id>>.
- Cortright, J. "New Growth Theory, Technology and Learning: A Practitioners Guide". (2001).
<<http://www.eda.gov>>.
- "Industri dan Perdagangan"
< <http://www.sijunjung.go.id>>.
- "Kebijakan Fiskal 2008 Diarahkan Pada Daya Beli dan Investasi." (2007). 30 Maret 2007.
<<http://www.kapanlagi.com>>.
- Nurjoni. "Outlook Pembangunan Infrastruktur 2008, Mengguyur Dana, Menggapai Asa". (2008). 24 Januari 2008.
<<http://www.madani-ri.com>>.
- "Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi Makro." (2007). 28 Mei 2007.
< <http://www.depkominfo.go.id>>.
- "Perimbangan Keuangan." (2008). 15 Desember 2008.
< <http://www.sumbarprov.go.id>>.
- "Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2006-2010." (2008). 19 Desember 2008.
< <http://www.sumbarprov.go.id>>.
- "Potensi Sektor Unggulan Sumatera Barat; Hinterland Bagi Daerah Lain." (2008) . 24 April 2008.
< <http://www.vibiznews.com>>.
- "Produktivitas Anggaran dan Infrastruktur Daerah" (2007). 21 Juli 2007.

- <<http://www.suarakarya-online.com>>.
- “Profil Ekonomi.” (2009).
< <http://www.pasamankab.go.id>>.
- “Profil PIsik Provinsi Sumatera Barat.” (2009). 28 April 2009.
< <http://www.sumbarprov.go.id>>.
- “RAPBN 2008:Memelihara Momentum Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Meningkatkan Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan.” (2007). 16 Agustus 2007.
< <http://www.fiskal.depkeu.go.id>>.
- “Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Posyandu di Kota Padang Panjang.” (2009).
< <http://www.padangpanjangkota.go.id>>.
- “Sarana dan Prasarana.” (2009). 20 Mei 2009.
< <http://www.padang.go.id>>.
- “ Solow Growth Model ”.
<<http://www.econ.iastate.edu>>.
- Thornton, “ The Harrod-Domar Model ”. (2006).
<<http://www.econ.washington.edu>>.
- Watkins, T., Valley, S., Alley, T. “Theoretical Models of Economic Growth The Harrod-Domar Growth Model”.
<<http://www.sjsu.edu>>.
- Wei, C. “Economic Growth and Convergence Across Canada”. (2004). Maret 2004.
<<http://ir.lib.sfu.ca.com>>.

LAMPIRAN

Tabel 3.15.

Nilai Tambah Sektor Pertanian Terhadap Total PDRB
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2000-2006 (dalam milyar rupiah)

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	562.09	589.67	632.01	685.61	749.06	813.82	884.51
Kab. Lima Puluh Kota	550.72	582.27	617.25	659.18	701.26	745.85	789.14
Kab. Padang Pariaman	790.99	821.48	855.35	895.27	940.17	984.64	1012.44
Kab. Pasaman	784.83	841.15	912.25	989.96	1075.69	1155.07	1232.41
Kab. Pesisir Selatan	434.12	449.92	468.52	489.73	512.45	531.87	554.75
Kab. Sawahlunto Sijunjung	468.04	492.68	528.93	570.35	602.31	627.67	657.15
Kab. Solok	671.97	701.54	742.71	785.29	829.47	875.98	924.50
Kab. Tanah Datar	596.01	616.41	638.65	662.92	697.53	738.31	782.24
Kota Bukittinggi	32.59	33.69	34.38	20.05	20.33	20.78	20.98
Kota Padang	370.87	390.18	407.40	426.29	446.45	468.55	494.41
Kota Padang Panjang	29.26	29.83	30.70	31.70	33.52	35.73	37.51
Kota Payakumbuh	58.04	60.39	63.30	66.18	69.62	72.51	75.52
Kota Sawahlunto	21.38	22.83	24.44	26.46	28.39	30.67	32.16
Kota Solok	29.71	30.52	31.50	33.60	34.84	36.15	37.32

Sumber: BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2006 dan "telah diolah kembali"

Tabel 3.16.
 Persentase Kontribusi Nilai Tambah Sektor Pertanian
 Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
 Tahun 2000-2006

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	31.215	31.470	32.200	33.175	34.191	35.001	35.828
Kab. Lima Puluh Kota	33.006	33.571	34.078	34.621	34.899	35.088	34.994
Kab. Padang Pariaman	34.657	34.634	34.375	34.293	34.269	33.240	29.933
Kab. Pasaman	33.927	34.871	36.031	37.038	37.949	38.362	38.556
Kab. Pesisir Selatan	33.019	33.095	33.092	33.148	33.129	32.716	32.431
Kab. Sawahlunto Sijunjung	31.785	32.051	32.873	33.893	33.953	33.575	33.132
Kab. Solok	40.784	40.980	41.540	41.869	41.900	41.813	41.639
Kab. Tanah Datar	38.069	38.100	37.904	37.504	37.432	37.634	37.678
Kota Bukittinggi	5.518	5.462	5.322	2.947	2.824	2.726	2.591
Kota Padang	5.249	5.306	5.262	5.217	5.160	5.143	5.162
Kota Padang Panjang	11.900	11.726	11.549	11.347	11.391	11.481	11.360
Kota Payakumbuh	11.505	11.534	11.536	11.473	11.428	11.253	11.037
Kota Sawahlunto	4.878	5.346	5.740	6.312	6.510	6.898	7.165
Kota Solok	9.551	9.420	9.319	9.513	9.357	9.169	8.916

“Sumber: BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2006 dan ”telah diolah kembali”

Tabel 3.17.

Nilai Tambah Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap
Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2000-2006 (dalam milyar rupiah)

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	74.90	76.31	78.40	80.21	84.65	88.98	93.59
Kab. Lima Puluh Kota	103.01	108.28	114.02	118.30	123.97	130.14	138.56
Kab. Padang Pariaman	81.04	83.79	89.69	94.99	101.81	99.52	99.09
Kab. Pasaman	37.23	38.23	39.46	40.87	42.34	44.20	46.25
Kab. Pesisir Selatan	19.65	20.58	21.57	22.57	23.67	24.90	26.28
Kab. Sawahlunto Sijunjung	166.39	178.71	185.06	176.53	182.74	200.59	209.15
Kab. Solok	65.94	68.48	70.09	72.72	78.03	84.36	91.20
Kab. Tanah Datar	30.83	31.34	31.91	33.02	34.71	36.18	37.74
Kota Bukittinggi	0.23	0.25	0.25	0.29	0.33	0.35	0.20
Kota Padang	118.73	122.43	125.01	126.70	131.66	138.37	146.76
Kota Padang Panjang	3.52	3.66	3.68	3.12	2.75	1.37	1.40
Kota Payakumbuh	2.02	2.11	2.21	2.33	2.46	2.58	2.68
Kota Sawahlunto	160.19	143.23	130.64	121.15	123.30	117.39	106.30
Kota Solok	2.22	2.25	2.27	2.30	2.43	2.55	2.67

Sumber: BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2006 dan "telah diolah kembali"

Tabel 3.18.

Persentase Kontribusi Nilai Tambah Sektor Pertambangan dan Penggalian
Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	4.159	4.073	3.994	3.881	3.864	3.827	3.791
Kab. Lima Puluh Kota	6.174	6.243	6.295	6.213	6.169	6.122	6.144
Kab. Padang Pariaman	3.551	3.533	3.605	3.639	3.711	3.360	2.930
Kab. Pasaman	1.610	1.585	1.558	1.529	1.494	1.468	1.447
Kab. Pesisir Selatan	1.495	1.514	1.523	1.528	1.530	1.532	1.536
Kab. Sawahlunto Sijunjung	11.300	11.626	11.502	10.490	10.302	10.730	10.545
Kab. Solok	4.002	4.000	3.920	3.877	3.941	4.027	4.108
Kab. Tanah Datar	1.969	1.937	1.894	1.868	1.863	1.844	1.818
Kota Bukittinggi	0.039	0.040	0.039	0.043	0.046	0.045	0.024
Kota Padang	1.680	1.665	1.615	1.550	1.522	1.519	1.532
Kota Padang Panjang	1.434	1.440	1.385	1.117	0.936	0.440	0.423
Kota Payakumbuh	0.400	0.402	0.402	0.403	0.404	0.400	0.392
Kota Sawahlunto	36.549	33.541	30.691	28.902	28.271	26.400	23.678
Kota Solok	0.713	0.693	0.672	0.650	0.652	0.646	0.638

Sumber: BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2006 dan "telah diolah kembali"

Tabel 3.19.
 Nilai Tambah Sektor Industri dan Pengolahan
 Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
 Tahun 1996-2006 (dalam milyar rupiah)

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	277.65	287.73	296.67	304.97	314.60	327.92	341.88
Kab. Lima Puluh Kota	179.42	180.63	184.71	189.79	196.97	205.28	214.66
Kab. Padang Pariaman	301.51	311.64	328.93	346.40	366.86	377.16	398.53
Kab. Pasaman	414.78	425.94	437.86	455.17	477.88	504.20	533.05
Kab. Pesisir Selatan	156.40	161.89	172.90	182.94	195.27	207.53	221.04
Kab. Sawahlunto Sijunjung	90.31	92.28	93.39	96.88	103.85	110.23	116.99
Kab. Solok	134.41	139.39	144.06	150.17	157.54	167.80	177.76
Kab. Tanah Datar	182.71	188.54	198.77	210.83	223.84	237.35	252.82
Kota Bukittinggi	66.17	67.25	70.15	75.55	79.82	84.05	87.90
Kota Padang	1,278.97	1,322.00	1,392.44	1,423.31	1,475.53	1,547.69	1,625.75
Kota Padang Panjang	25.90	26.99	27.84	29.07	29.83	31.71	33.25
Kota Payakumbuh	33.46	35.11	37.05	38.84	40.86	43.98	46.13
Kota Sawahlunto	45.78	47.97	49.58	50.59	53.18	56.63	58.39
Kota Solok	31.00	32.21	33.42	34.28	36.81	39.34	41.80

Sumber: BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/ Kota Tahun 1996-2006 dan "telah diolah kembali"

Tabel 3.20.
 Persentase Kontribusi Nilai Tambah Sektor Industri dan Pengolahan
 Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota
 di Provinsi Sumatera Barat 2000-2006

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	15.419	15.355	15.115	14.757	14.36	14.103	13.848
Kab. Lima Puluh Kota	10.753	10.414	10.198	9.968	9.802	9.657	9.519
Kab. Padang Pariaman	13.211	13.139	13.219	13.269	13.372	12.732	11.783
Kab. Pasaman	17.93	17.658	17.294	17.03	16.859	16.746	16.677
Kab. Pesisir Selatan	11.895	11.908	12.212	12.383	12.624	12.765	12.922
Kab. Sawahlunto Sijunjung	6.133	6.003	5.804	5.757	5.854	5.896	5.898
Kab. Solok	8.158	8.142	8.057	8.007	7.958	8.009	8.006
Kab. Tanah Datar	11.670	11.654	11.797	11.928	12.012	12.098	12.177
Kota Bukittinggi	11.205	10.903	10.861	11.102	11.089	11.024	10.857
Kota Padang	18.102	17.979	17.984	17.417	17.052	16.988	16.975
Kota Padang Panjang	10.533	10.611	10.473	10.404	10.136	10.191	10.069
Kota Payakumbuh	6.632	6.706	6.752	6.733	6.708	6.826	6.742
Kota Sawahlunto	10.445	11.234	11.647	12.068	12.194	12.734	13.007
Kota Solok	9.968	9.942	9.885	9.706	9.884	9.98	9.986

Sumber: BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2006 dan "telah diolah kembali"

Tabel 3.21.
 Nilai Tambah Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih
 Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
 Tahun 2000-2006 (dalam milyar rupiah)

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	13.26	15.64	17.97	18.69	19.84	21.23	22.75
Kab. Lima Puluh Kota	4.17	4.71	5.33	6.19	7.25	8.59	9.31
Kab. Padang Pariaman	22.43	25.14	28.08	30.35	32.72	35.40	39.33
Kab. Pasaman	5.04	5.18	5.37	5.61	5.89	6.19	6.58
Kab. Pesisir Selatan	6.21	6.84	7.55	8.37	8.95	9.72	10.55
Kab. Sawahlunto Sijunjung	11.64	12.79	13.64	14.49	15.63	17.49	21.98
Kab. Solok	7.07	7.61	7.91	8.36	8.83	9.55	10.38
Kab. Tanah Datar	9.40	10.87	12.27	13.88	15.33	16.69	18.22
Kota Bukittinggi	14.11	14.78	15.61	16.43	17.15	18.66	19.04
Kota Padang	106.16	120.93	132.98	143.40	145.94	152.10	160.03
Kota Padang Panjang	4.94	5.50	6.05	6.65	6.83	7.77	8.70
Kota Payakumbuh	6.28	7.06	7.67	8.08	8.56	9.08	9.62
Kota Sawahlunto	1.81	2.04	2.25	2.44	2.58	2.83	3.12
Kota Solok	7.36	8.28	8.91	9.51	10.40	11.48	12.43

Sumber: BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2006 dan "telah diolah kembali"

Tabel 3.22.
 Persentase Kontribusi Nilai Tambah Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih
 Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota
 di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	0.736	0.835	0.916	0.904	0.906	0.913	0.922
Kab. Lima Puluh Kota	0.25	0.272	0.295	0.325	0.361	0.404	0.413
Kab. Padang Pariaman	0.983	1.06	1.129	1.163	1.193	1.195	1.163
Kab. Pasaman	0.218	0.215	0.212	0.21	0.208	0.206	0.206
Kab. Pesisir Selatan	0.473	0.503	0.534	0.567	0.579	0.598	0.617
Kab. Sawahlunto Sijunjung	0.79	0.832	0.848	0.861	0.881	0.936	1.108
Kab. Solok	0.429	0.445	0.442	0.446	0.446	0.456	0.467
Kab. Tanah Datar	0.601	0.672	0.728	0.785	0.823	0.851	0.878
Kota Bukittinggi	2.389	2.396	2.417	2.415	2.382	2.447	2.352
Kota Padang	1.503	1.645	1.718	1.755	1.687	1.669	1.671
Kota Padang Panjang	2.007	2.161	2.276	2.38	2.321	2.497	2.636
Kota Payakumbuh	1.245	1.349	1.397	1.4	1.406	1.408	1.406
Kota Sawahlunto	0.413	0.478	0.529	0.583	0.592	0.636	0.695
Kota Solok	2.367	2.556	2.636	2.694	2.792	2.912	2.97

Sumber: BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2006 dan "telah diolah kembali"

Tabel 3.23.
 Nilai Tambah Sektor Bangunan
 Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
 Tahun 2000-2006 (dalam milyar rupiah)

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	87.70	89.68	92.22	94.33	98.49	103.55	108.91
Kab. Lima Puluh Kota	43.37	44.39	46.10	48.37	51.05	54.50	58.76
Kab. Padang Pariaman	113.19	121.44	131.32	141.85	154.40	162.45	173.32
Kab. Pasaman	77.95	80.03	83.67	86.98	90.69	95.34	100.95
Kab. Pesisir Selatan	50.57	53.02	55.61	57.45	59.90	63.86	68.12
Kab. Sawahlunto Sijunjung	143.89	148.32	150.37	168.51	182.93	195.07	211.72
Kab. Solok	90.46	94.73	98.68	104.90	113.68	121.95	131.60
Kab. Tanah Datar	117.24	120.84	126.64	131.98	138.30	143.80	151.63
Kota Bukittinggi	24.13	24.98	26.14	27.08	27.81	28.99	30.25
Kota Padang	294.38	305.47	318.51	332.87	351.11	375.15	404.26
Kota Padang Panjang	16.55	16.99	17.86	19.10	20.67	22.50	24.54
Kota Payakumbuh	35.55	37.09	39.82	42.39	44.70	46.93	49.08
Kota Sawahlunto	19.13	19.68	20.55	20.98	22.01	22.80	25.05
Kota Solok	40.24	41.64	43.13	44.51	46.57	48.75	51.90

Sumber: BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2006 dan "telah diolah kembali"

Tabel 3.24.
 Persentase Kontribusi Nilai Tambah Sektor Bangunan
 Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
 Tahun 2000-2006

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	4.871	4.786	4.698	4.564	4.495	4.454	4.411
Kab. Lima Puluh Kota	2.599	2.559	2.545	2.54	2.541	2.564	2.606
Kab. Padang Pariaman	4.959	5.12	5.278	5.434	5.628	5.484	5.124
Kab. Pasaman	3.37	3.318	3.305	3.254	3.199	3.166	3.158
Kab. Pesisir Selatan	3.846	3.9	3.928	3.889	3.873	3.928	3.982
Kab. Sawahlunto Sijunjung	9.772	9.649	9.345	10.014	10.312	10.434	10.675
Kab. Solok	5.49	5.534	5.519	5.593	5.742	5.821	5.927
Kab. Tanah Datar	7.488	7.469	7.516	7.467	7.422	7.33	7.304
Kota Bukittinggi	4.085	4.049	4.048	3.98	3.863	3.802	3.736
Kota Padang	4.166	4.154	4.114	4.073	4.058	4.118	4.221
Kota Padang Panjang	6.73	6.677	6.717	6.837	7.024	7.232	7.432
Kota Payakumbuh	7.047	7.084	7.257	7.349	7.338	7.282	7.174
Kota Sawahlunto	4.364	4.609	4.827	5.006	5.047	5.127	5.58
Kota Solok	12.936	12.854	12.758	12.601	12.506	12.367	12.4

Sumber: BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2006 dan "telah diolah kembali"

Tabel 3.25.

Nilai Tambah Sektor Perdagangan dan Hotel & Restoran
Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2000-2006 (dalam milyar rupiah)

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	320.25	331.92	346.53	364.41	383.68	407.57	432.92
Kab. Lima Puluh Kota	369.19	385.78	402.81	424.92	452.16	482.86	520.49
Kab. Padang Pariaman	356.71	368.71	384.61	402.00	420.35	436.89	456.16
Kab. Pasaman	506.21	522.69	540.43	564.18	592.97	634.39	679.27
Kab. Pesisir Selatan	288.53	299.60	312.72	326.51	342.36	360.14	379.85
Kab. Sawahlunto Sijunjung	177.81	183.19	188.43	194.77	206.00	214.85	227.50
Kab. Solok	247.94	257.86	268.39	281.10	295.93	314.62	335.97
Kab. Tanah Datar	202.79	210.06	219.16	229.88	244.52	258.85	275.28
Kota Bukittinggi	97.53	104.85	113.03	138.57	148.50	158.24	168.11
Kota Padang	1,580.23	1,640.84	1,727.93	1,802.83	1,887.28	1,998.67	2,135.32
Kota Padang Panjang	30.40	31.58	32.74	33.75	34.91	36.37	38.61
Kota Payakumbuh	95.64	99.34	103.55	109.17	114.34	119.85	125.73
Kota Sawahlunto	43.08	42.45	43.23	41.34	43.15	43.25	43.88
Kota Solok	33.42	35.70	37.02	38.61	40.59	43.05	45.93

Sumber: BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2006 dan "telah diolah kembali"

Tabel 3.26.

Persentase Kontribusi Nilai Tambah Sektor Perdagangan dan Hotel & Restoran Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	17.785	17.714	17.655	17.633	17.513	17.529	17.536
Kab. Lima Puluh Kota	22.127	22.242	22.239	22.317	22.502	22.716	23.08
Kab. Padang Pariaman	15.629	15.545	15.457	15.399	15.322	14.749	13.487
Kab. Pasaman	21.882	21.669	21.346	21.108	20.92	21.069	21.251
Kab. Pesisir Selatan	21.945	22.038	22.088	22.1	22.133	22.152	22.206
Kab. Sawahlunto Sijunjung	12.075	11.918	11.711	11.574	11.613	11.493	11.47
Kab. Solok	15.048	15.063	15.011	14.987	14.948	15.018	15.132
Kab. Tanah Datar	12.953	12.984	13.007	13.006	13.122	13.194	13.26
Kota Bukittinggi	16.515	16.999	17.5	20.362	20.63	20.755	20.764
Kota Padang	22.365	22.315	22.318	22.062	21.811	21.938	22.295
Kota Padang Panjang	12.363	12.411	12.315	12.081	11.864	11.688	11.694
Kota Payakumbuh	18.958	18.974	18.871	18.925	18.769	18.599	18.375
Kota Sawahlunto	9.828	9.94	10.156	9.861	9.895	9.726	9.774
Kota Solok	10.744	11.019	10.951	10.932	10.9	10.919	10.973

Sumber: BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2006 dan "telah diolah kembali"

Tabel 3.27.

Nilai Tambah Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2000-2006 (dalam milyar rupiah)

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	76.62	84.24	88.12	92.80	98.71	102.69	107.25
Kab. Lima Puluh Kota	78.55	80.60	82.78	85.94	90.87	96.21	103.42
Kab. Padang Pariaman	131.55	137.22	144.18	151.73	158.30	277.35	590.14
Kab. Pasaman	88.35	91.95	96.21	100.09	104.98	110.33	117.16
Kab. Pesisir Selatan	34.65	35.87	37.66	39.58	41.79	44.00	46.80
Kab. Sawahlunto Sijunjung	95.80	97.97	102.60	108.06	114.52	120.11	130.24
Kab. Solok	145.71	150.32	157.07	164.09	175.53	187.40	200.30
Kab. Tanah Datar	84.54	87.63	92.21	96.93	102.16	106.57	113.08
Kota Bukittinggi	133.02	138.55	147.62	153.25	163.21	176.13	190.11
Kota Padang	1,586.32	1,640.47	1,758.36	1,947.90	2,148.80	2,240.17	2,263.33
Kota Padang Panjang	48.76	50.64	52.34	55.09	59.16	63.62	68.17
Kota Payakumbuh	94.23	96.51	101.54	107.33	117.02	128.60	141.96
Kota Sawahlunto	36.19	35.10	35.21	32.10	34.00	35.90	38.34
Kota Solok	61.55	64.38	69.02	72.84	78.09	84.23	90.93

Sumber: BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2006 dan "telah diolah kembali"

Tabel 3.28.

Persentase Kontribusi Nilai Tambah Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2000-2006

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	4.255	4.496	4.489	4.49	4.506	4.417	4.344
Kab. Lima Puluh Kota	4.708	4.647	4.57	4.514	4.522	4.526	4.586
Kab. Padang Pariaman	5.764	5.785	5.795	5.812	5.77	9.363	17.448
Kab. Pasaman	3.819	3.812	3.8	3.745	3.704	3.664	3.665
Kab. Pesisir Selatan	2.636	2.639	2.66	2.679	2.702	2.707	2.736
Kab. Sawahlunto Sijunjung	6.506	6.374	6.376	6.421	6.456	6.425	6.566
Kab. Solok	8.843	8.781	8.785	8.749	8.867	8.945	9.021
Kab. Tanah Datar	5.4	5.416	5.472	5.484	5.482	5.432	5.447
Kota Bukittinggi	22.524	22.462	22.855	22.52	22.673	23.101	23.482
Kota Padang	22.452	22.31	22.711	23.837	24.833	24.588	23.632
Kota Padang Panjang	19.832	19.906	19.691	19.716	20.104	20.446	20.646
Kota Payakumbuh	18.677	18.434	18.506	18.606	19.209	19.958	20.748
Kota Sawahlunto	8.258	8.221	8.272	7.658	7.795	8.073	8.541
Kota Solok	19.787	19.871	20.416	20.621	20.97	21.366	21.724

Sumber: BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2006 dan "telah diolah kembali"

Tabel 3.29.
 Nilai Tambah Sektor Keuangan
 Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
 Tahun 2000-2006 (dalam milyar rupiah)

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	63.29	65.24	70.12	73.69	78.82	82.44	86.43
Kab. Lima Puluh Kota	45.25	47.41	49.80	51.76	54.31	57.25	61.33
Kab. Padang Pariaman	77.61	82.69	85.51	89.77	94.26	98.91	105.04
Kab. Pasaman	65.82	67.85	69.35	72.15	75.31	78.70	82.53
Kab. Pesisir Selatan	54.22	56.32	57.32	59.49	62.10	64.92	68.01
Kab. Sawahlunto Sijunjung	57.64	58.72	59.89	61.77	66.91	70.63	74.84
Kab. Solok	36.65	37.78	38.94	40.40	41.84	43.53	46.19
Kab. Tanah Datar	72.71	74.76	76.64	58.89	62.94	66.26	70.88
Kota Bukittinggi	57.24	62.10	62.93	66.67	71.29	74.89	79.59
Kota Padang	516.61	542.14	561.64	591.22	639.57	690.67	748.77
Kota Padang Panjang	21.73	22.61	24.00	25.82	28.58	31.08	33.64
Kota Payakumbuh	49.99	51.68	54.34	56.00	59.14	61.38	66.32
Kota Sawahlunto	18.80	19.55	20.31	20.88	22.14	23.10	24.43
Kota Solok	22.43	23.47	24.77	26.24	28.47	30.42	32.46

Sumber: BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2006 dan "telah diolah kembali"

Tabel 3.30.
 Persentase Kontribusi Nilai Tambah Sektor Keuangan
 Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
 Tahun 2000-2006

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	3.515	3.482	3.573	3.566	3.598	3.545	3.501
Kab. Lima Puluh Kota	2.712	2.734	2.749	2.718	2.703	2.693	2.72
Kab. Padang Pariaman	3.4	3.486	3.437	3.439	3.436	3.339	3.106
Kab. Pasaman	2.845	2.813	2.739	2.699	2.657	2.614	2.582
Kab. Pesisir Selatan	4.124	4.143	4.049	4.027	4.014	3.993	3.976
Kab. Sawahlunto Sijunjung	3.915	3.82	3.722	3.671	3.772	3.778	3.773
Kab. Solok	2.225	2.207	2.178	2.154	2.113	2.078	2.08
Kab. Tanah Datar	4.644	4.621	4.549	3.331	3.378	3.377	3.414
Kota Bukittinggi	9.692	10.067	9.743	9.797	9.903	9.823	9.83
Kota Padang	7.312	7.373	7.254	7.235	7.391	7.581	7.818
Kota Padang Panjang	8.838	8.887	9.029	9.241	9.711	9.988	10.19
Kota Payakumbuh	9.909	9.872	9.903	9.707	9.708	9.525	9.692
Kota Sawahlunto	4.289	4.578	4.77	4.981	5.077	5.196	5.442
Kota Solok	7.212	7.245	7.328	7.429	7.646	7.715	7.754

Sumber: BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2006 dan "telah diolah kembali"

Tabel 3.31.
 Nilai Tambah Sektor Jasa Pemerintahan
 Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
 Tahun 2000-2006 (dalam milyar rupiah)

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	284.75	291.70	298.42	307.04	315.22	326.99	338.19
Kab. Lima Puluh Kota	255.96	260.75	267.82	277.16	287.06	298.11	309.83
Kab. Padang Pariaman	330.36	339.92	357.51	371.24	383.48	395.20	408.36
Kab. Pasaman	294.56	299.29	306.13	314.99	324.28	336.38	350.21
Kab. Pesisir Selatan	230.46	234.42	239.74	246.86	254.22	270.32	284.14
Kab. Sawahlunto Sijunjung	221.29	231.46	242.55	246.59	253.54	265.04	283.08
Kab. Solok	188.42	191.88	195.46	200.82	207.98	215.68	224.82
Kab. Tanah Datar	188.77	193.85	201.94	238.79	248.67	255.90	265.07
Kota Bukittinggi	90.41	90.85	92.50	95.91	99.02	102.38	107.31
Kota Padang	637.55	655.34	678.11	702.17	716.07	745.26	789.67
Kota Padang Panjang	45.14	46.08	49.19	52.13	53.59	55.12	56.74
Kota Payakumbuh	86.08	89.34	92.72	98.07	102.01	105.96	111.10
Kota Sawahlunto	45.63	46.65	48.52	49.96	51.02	52.47	54.03
Kota Solok	47.39	48.48	49.60	51.34	52.73	54.41	56.53

Sumber: BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2006 dan "telah diolah kembali"

Tabel 3.32.
 Persentase Kontribusi Nilai Tambah Sektor Jasa Pemerintahan
 Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
 Tahun 2000-2006

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	15.814	15.567	15.204	14.857	14.388	14.063	13.699
Kab. Lima Puluh Kota	15.34	15.033	14.786	14.557	14.286	14.024	13.739
Kab. Padang Pariaman	14.474	14.331	14.368	14.22	13.978	13.341	12.073
Kab. Pasaman	12.733	12.408	12.091	11.785	11.44	11.172	10.956
Kab. Pesisir Selatan	17.528	17.243	16.933	16.709	16.435	16.628	16.611
Kab. Sawahlunto Sijunjung	15.028	15.058	15.074	14.653	14.292	14.177	14.272
Kab. Solok	11.436	11.208	10.932	10.707	10.506	10.295	10.126
Kab. Tanah Datar	12.057	11.982	11.985	13.509	13.344	13.044	12.767
Kota Bukittinggi	15.308	14.729	14.322	14.093	13.757	13.428	13.255
Kota Padang	9.023	8.912	8.758	8.593	8.275	8.18	8.245
Kota Padang Panjang	18.36	18.114	18.505	18.656	18.211	17.713	17.185
Kota Payakumbuh	17.063	17.065	16.898	17.001	16.746	16.443	16.237
Kota Sawahlunto	10.41	10.925	11.399	11.919	11.699	11.799	12.036
Kota Solok	15.234	14.965	14.673	14.536	14.161	13.802	13.505

Sumber: BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2006 dan "telah diolah kembali"

Tabel 3.33.
 Nilai Tambah Sektor Jasa Swasta
 Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
 Tahun 2000-2006 (dalam milyar rupiah)

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	40.18	41.65	42.33	44.90	47.73	49.95	52.34
Kab. Lima Puluh Kota	38.89	39.66	40.68	42.40	44.53	46.86	49.61
Kab. Padang Pariaman	76.96	79.87	83.07	87.01	91.18	94.70	99.94
Kab. Pasaman	38.56	39.84	41.08	42.80	44.51	46.15	47.98
Kab. Pesisir Selatan	39.97	41.03	42.20	43.90	46.11	48.46	51.02
Kab. Sawahlunto Sijunjung	39.72	41.03	44.17	44.87	45.50	47.79	50.80
Kab. Solok	59.05	62.31	64.63	67.76	70.83	74.11	77.55
Kab. Tanah Datar	80.60	83.58	86.75	90.46	95.49	101.92	109.16
Kota Bukittinggi	75.15	79.54	83.28	86.71	92.37	97.97	106.13
Kota Padang	575.70	613.29	640.08	675.15	710.48	754.08	809.19
Kota Padang Panjang	19.68	20.52	21.42	22.97	24.43	25.90	27.61
Kota Payakumbuh	43.21	44.92	46.52	48.46	50.47	53.52	56.09
Kota Sawahlunto	46.31	47.52	50.94	53.28	56.34	59.64	63.21
Kota Solok	35.73	37.05	38.41	39.98	41.46	43.85	46.60

Sumber: BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2006 dan "telah diolah kembali"

Tabel 3.34.
 Persentase Kontribusi Nilai Tambah Sektor Jasa Swasta
 Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
 Tahun 2000-2006

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kab. Agam	2.232	2.223	2.156	2.172	2.179	2.148	2.12
Kab. Lima Puluh Kota	2.331	2.286	2.246	2.227	2.216	2.205	2.2
Kab. Padang Pariaman	3.372	3.367	3.338	3.333	3.323	3.197	2.955
Kab. Pasaman	1.667	1.652	1.623	1.601	1.57	1.533	1.501
Kab. Pesisir Selatan	3.04	3.018	2.981	2.971	2.981	2.981	2.982
Kab. Sawahlunto Sijunjung	2.698	2.669	2.745	2.666	2.565	2.557	2.561
Kab. Solok	3.584	3.64	3.615	3.613	3.578	3.537	3.493
Kab. Tanah Datar	5.148	5.166	5.149	5.118	5.124	5.195	5.258
Kota Bukittinggi	12.724	12.894	12.894	12.742	12.832	12.85	13.109
Kota Padang	8.148	8.341	8.267	8.262	8.211	8.277	8.449
Kota Padang Panjang	8.005	8.066	8.059	8.22	8.303	8.323	8.364
Kota Payakumbuh	8.565	8.579	8.478	8.4	8.284	8.306	8.197
Kota Sawahlunto	10.566	11.128	11.967	12.711	12.919	13.412	14.081
Kota Solok	11.487	11.436	11.362	11.318	11.134	11.124	11.134

Sumber: BPS Sumatera Barat "PDRB menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2006 dan "telah diolah kembali"